



PEMERINTAH PROVINSI BALI LAPORAN KEUANGAN AUDITED



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah dan telah di AUDIT Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali


Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si

NIP. 19690510 199603 1 007



D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
2.1. Ekonomi Makro	
2.2. Kebijakan Keuangan	
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD.....	34
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	
Bab IV Kebijakan akuntansi	38
4.1. Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada OPD	
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD.....	70
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	
5.2. Neraca	
5.3. Laporan Operasional	
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	
Bab.VI Pengungkapan Lainnya	100
Bab.VII Penutup.....	101

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
2. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2025
3. Berita Acara Rekonsiliasi Pengeluaran Bulan Desember 2025
4. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Urusan Akuntansi dengan Pengurus Barang Tahun 2025
5. Rekening Koran, STS dan Penutupan Kas Bendahara bulan Desember 2025
6. Bukti Pembayaran Listrik, Telpon dan Air Bulan Desember 2025
7. Laporan Mutasi Barang Persediaan Tahun 2025
8. Berita Acara Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Tahun 2025
9. Berita Acara Penghapusan Aset Rusak Berat Tahun 2025
10. Daftar Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025
11. Daftar Rincian Barang Ekstra Kompatibel Tahun 2025



ຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງສັນ ໃຫ້ດີກວ່າ

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091
Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Denpasar, 22 Mei 2026

Kepala Dinas,

Tri Arya Dhyana Kubontubuh,SE.,M.Si
NIP.19690510 199603 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp 21.169.609.316,61- atau mencapai 91,92% dari anggarannya.

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.105.797.052,00 atau 90,56% dari anggarannya. Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 12.197.970.208,30- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 84.883.100,00- atau mencapai 0,69% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 12.113.087.108,30 atau mencapai 99,30% dari seluruh aset. Sedangkan aset lain-lain jumlahnya Rp.00,00 atau mencapai 00,00% dari seluruh aset dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 11.678.576.234,30

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,00.-

Realisasi Beban Tahun 2025 sebesar Rp 20.757.497.699,00

Realisasi Defisit Operasional Tahun 2025 sebesar Rp (20.757.497.699,00)



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

02 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

AUDITED

kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	= (4 / 3) * 10	6
5	BELANJA DAERAH	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92	23.791.258.861,75
5.1	BELANJA OPERASI	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	91,83	23.137.155.320,06
5.1.01	Belanja Pegawai	13.114.769.179,00	12.157.539.336,00	92,70	10.801.409.908,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.951.116.204,00	8.105.797.052,00	90,56	12.310.745.412,06
5.1.04	Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	91,83	23.137.155.320,06
5.2	BELANJA MODAL	955.055.300,00	897.272.928,61	93,95	654.103.541,69
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.055.300,00	629.293.989,00	92,13	468.817.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	185.286.041,69
	JUMLAH BELANJA MODAL	955.055.300,00	897.272.928,61	93,95	654.103.541,69
	JUMLAH BELANJA	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92	23.791.258.861,75
	SURPLUS/DEFISIT	(23.029.940.683,00)	(21.169.609.316,61)	91,92	(23.791.258.861,75)

Provinsi Bali, 22 Mei 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
2 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025
AUDITED

Dalam Rupiah

ode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	(2.474.500.698,06)	(10,65)
8.1	BEBAN OPERASI	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	- 2.474.500.698,06	-10,65
8.1.01	Beban Pegawai	12.248.548.182,00	10.709.689.650,00	1.538.858.532,00	14,37
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.104.978.957,00	12.232.255.086,06	(4.127.276.129,06)	(33,74)
8.1.04	Beban Subsidi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	(64,00)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	394.970.560,00	265.053.661,00	129.916.899,00	49,02
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	-2.474.500.698,06	-10,65
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)	2.474.500.698,06	(10,65)

Provinsi Bali, 22 Mei 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
2 Januari 2025 Sampai 1 Januari 2026

(Dalam Rupiah)

ode Rekenir	Uraian	2025	2024
1	ASET	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69
1.1	ASET LANCAR	84.883.100,00	80.777.400,00
	JUMLAH ASET LANCAR	84.883.100,00	80.777.400,00
1.3	ASET TETAP	12.113.087.108,30	11.610.784.739,69
	JUMLAH ASET TETAP	12.113.087.108,30	11.610.784.739,69
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69
2	KEWAJIBAN	519.393.974,00	425.097.523,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	519.393.974,00	425.097.523,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	519.393.974,00	425.097.523,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	519.393.974,00	425.097.523,00
3	EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69
3.1	EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69
	JUMLAH EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69

Provinsi Bali, 22 Mei 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
2 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-20.757.497.699,00	-23.231.998.397,06
RK PPKD	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
LAIN-LAIN	-	-
EKUITAS AKHIR	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69

Provinsi Bali, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah


Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007





බිම්බිලාප්‍රාප්තිකම්
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 දික්කළාගාර්‍යාමාලා කළාමාලා කළාමාලා
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 කළාමාලා කළාමාලා කළාමාලා - කළාමාලා (1000000000) / කළාමාලා (1000000000) / කළාමාලා
 Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091
 Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, hasil Operasi dan Perubahan Ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 1425).
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
 - i) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - j) Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

- 1. Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beralamat di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar;
- 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakanteknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 3. Jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 136 orang berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga Non ASN (kontrak) adalah :

PangkatGolongan IV/c	:	1 orang
Pangkat/Golongan IV/b	:	4 orang
Pangkat/Golongan IV/a	:	4 orang
Pangkat/Golongan III/d	:	16 orang

Pangkat/Golongan III/c	:	3 orang
Pangkat/Golongan III/b	:	16 orang
Pangkat/Golongan III/a	:	3 orang
Pangkat/Golongan II/d	:	2 orang
Pangkat/Golongan II/c	:	1 orang
Pangkat/Golongan II/b	:	0 orang
Pangkat/Golongan I/d	:	0 orang
Pegawai PPPK	:	36 orang
Pegawai PPPK PW	:	43 orang
Pegawai Non ASN	:	28 orang
Jumlah	:	157 orang



1.4 .SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2025, kondisi ekonomi makro Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang semakin menguat seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta membaiknya konsumsi domestik turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator sosial ekonomi.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,72 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49 persen.
3. Indeks Gini (Gini Rasio) sebesar 0,353.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,37.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,82 persen.
6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 3,45 persen.
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp324,15,44 triliun.

Indikator-indikator makroekonomi tersebut secara komprehensif menggambarkan kinerja perekonomian Provinsi Bali Tahun 2025 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabilitas yang terjaga. Adapun uraian analisis lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,72 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun 2024-2025
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,25	4,00	3,72	Turun 0,28 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	193,78	184,43	173,24	Turun 11,19 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	Turun 0,56 persen poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2025 (keadaan Maret 2025) sebesar 3,72 persen mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4 persen. Capaian tersebut turun 0,28 persen poin terhadap Maret 2024. Jika dianalisis dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 11,19 ribu orang terhadap Maret 2024.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,553	0,499	0,560	Naik 0,061 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,528	1,461	1,365	Turun 0,096 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	2	Turun 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Kedalaman kemiskinan (P_1) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 merupakan rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan berarti semakin jauh rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode Maret 2025, indikator ini meningkat 0,061 poin yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun perubahan tingkat kemiskinan secara persentase mungkin relatif terbatas, beban ekonomi yang ditanggung penduduk miskin cenderung meningkat, sehingga mereka berada pada posisi yang semakin rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Secara peringkat, Provinsi Bali menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Selatan yang menduduki peringkat pertama pada Maret 2025.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,102	0,090	0,117	Naik 0,027 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,377	0,347	0,319	Turun 0,028 poin
3	Peringkat Provinsi	1	1	3	Turun 2 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang disajikan pada Tabel 2.3 merupakan variasi pengeluaran di antara orang miskin, dengan kata lain makin tinggi indeks keparahan kemiskinan berarti semakin bervariasi pengeluaran antara penduduk miskin. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) sebesar 0,027 poin menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Artinya, tidak hanya rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dan yang relatif lebih mendekati garis kemiskinan juga semakin besar. Secara peringkat, capaian Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami

penurunan dimana peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul oleh DKI Jakarta di posisi kedua.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
- 2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
- 3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
- 4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,49 persen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2025)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	2,69	1,79	1,49	Turun 0,30 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	4,85	Turun 0,06 persen poin
3	Peringkat Provinsi	3	2	1	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025*

Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali tercatat sebesar 1,49 persen, menurun dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 1,79 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di Bali. Selain itu, TPT Bali tetap jauh lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 4,85 persen, menegaskan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Secara nasional, Bali juga konsisten berada dalam kelompok provinsi dengan TPT terendah. Pada tahun 2023, Bali menempati peringkat ketiga terendah setelah Sulawesi Barat dan Papua, sementara pada tahun 2024 posisi terendah TPT secara nasional ditempati oleh Papua Pegunungan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika antarwilayah, kinerja ketenagakerjaan Bali tetap berada pada level yang sangat kompetitif secara nasional.

Jumlah penduduk angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31 persen. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang.

Mayoritas penduduk bekerja di Bali masih berada pada sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,47 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Agustus 2024, yang menandakan proses formalisasi tenaga kerja masih terus berlangsung secara bertahap. Dari sisi pendidikan, tantangan ketenagakerjaan masih terlihat pada lulusan pendidikan menengah kejuruan dan vokasi. Pada Agustus 2025, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Diploma I/II/III, yakni sebesar 3,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga memerlukan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

- 1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
- 2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
- 3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data BPS Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,353 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2025)

No	Gini Rasio	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Tingkat Provinsi	0,362	0,361	0,353	Turun 0,008 poin
2	Tingkat Nasional	0,388	0,379	0,375	Turun 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	21	25	24	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2023, Maret 2024, dan Maret 2025*

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan yang nyata. Hal ini tercermin dari nilai Gini Rasio yang tercatat sebesar 0,353, turun 0,008 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 0,361. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat di Bali semakin merata, sekaligus menegaskan keberlanjutan tren perbaikan kualitas pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi ketimpangan secara nasional, yang menempatkan Bali pada posisi yang lebih baik dalam konteks pemerataan hasil pembangunan. Jika ditinjau menggunakan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2025 mencapai 18,67 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh porsi pengeluaran yang cukup besar dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan proporsi tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali berada dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, tetapi juga mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat bawah, sehingga memperkuat inklusivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

- 1. Rendah (< 60)
- 2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, IPM di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai 79,37. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi capaian IPM Indonesia yang berada pada angka 75,90. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat IPM sebesar 78,63, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun 2024-2025
1	Jembrana	74,80	75,32	75,94	Naik 0,62 poin
2	Tabanan	77,87	78,83	79,70	Naik 0,87 poin
3	Badung	83,00	83,73	84,27	Naik 0,54 poin
4	Gianyar	79,69	80,23	80,96	Naik 0,73 poin
5	Klungkung	74,18	75,15	75,89	Naik 0,74 poin
6	Bangli	71,99	72,51	73,22	Naik 0,71 poin
7	Karangasem	70,09	70,91	71,89	Naik 0,98 poin
8	Buleleng	74,87	75,35	76,06	Naik 0,71 poin
9	Denpasar	84,68	85,11	85,63	Naik 0,52 poin
10	Provinsi Bali	78,01	78,63	79,37	Naik 0,74 poin
11	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90	Naik 0,88 poin
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023, 2024, dan 2025*

IPM Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembangunan manusia pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada capaian status pembangunan manusia “tinggi” atau “sangat tinggi”. Tiga wilayah yang memiliki status pembangunan “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$) yaitu Kota Denpasar dengan capaian IPM sebesar 85,63; Kabupaten Badung sebesar 84,27; dan Kabupaten Gianyar sebesar 80,96. Sedangkan enam wilayah lainnya yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem berada pada status pembangunan “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,82 persen meningkat dari capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,49	9,97	
	Tabanan	15,47	16,24	
	Badung	35,55	37,67	
	Gianyar	18,87	19,90	
	Klungkung	6,04	6,35	
	Bangli	4,67	4,88	
	Karangasem	11,18	11,66	
	Buleleng	23,28	24,45	
	Denpasar	36,00	38,00	
	Provinsi Bali	159,46	168,20	177,99
	Indonesia	12.301,45	12.920,53	13.580,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	3,66	4,98	
	Tabanan	3,56	4,94	
	Badung	11,29	5,94	
	Gianyar	5,06	5,47	
	Klungkung	4,70	5,08	
	Bangli	3,50	4,54	
	Karangasem	3,10	4,33	
	Buleleng	3,64	5,04	
	Denpasar	5,69	5,55	
	Provinsi Bali	5,72	5,48	5,82
	Indonesia	5,05	5,03	5,11
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	5	6	
	Tabanan	7	7	
	Badung	1	1	
	Gianyar	3	3	

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Klungkung	4	4	
	Bangli	8	8	
	Karangasem	9	9	
	Buleleng	6	5	
	Denpasar	2	2	
4	Peringkat Nasional	5	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Perekonomian Provinsi Bali pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (*c-to-c*), dengan ekspansi yang terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB. Capaian ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin merata, terutama ditopang oleh menguatnya kembali aktivitas pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Selain dorongan dari sektor pariwisata, peningkatan belanja pegawai khususnya pada sektor pemerintahan turut memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2025. Dari pendekatan produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,99 persen. Kinerja ini diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Bali yang tumbuh 10,25 persen, serta Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh komponen pengeluaran, dengan ekspor luar negeri sebagai pendorong utama yang tumbuh 8,22 persen, diikuti impor luar negeri sebesar 6,29 persen dan PMTB (investasi) sebesar 6,03 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan 5,47 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 3,90 persen. Di sisi lain, pengeluaran LNPRM menjadi satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi, yakni sebesar 3,97 persen

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

- 1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
- 2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30 persen per tahun.
- 3. Inflasi Berat (*High Inflation*) – Mencapai kisaran 30-100 persen per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
- 4. Hiperinflasi (*Hyperinflation*) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100 persen per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	2,44	2,70
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	1,98	2,37
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,31	1,93	2,51
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,54	2,69	3,45
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	2,34	2,91
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1*	
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	4**	

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2023, 2024, 2025*

Pada Desember 2025, perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan secara *year-on-year*. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/*service*, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.381.630,98	3.815.640,37	4.141.691,04
	2. Pertambangan dan Penggalian	130.296,98	134.832,81	138.575,66
	3. Industri Pengolahan	826.377,27	888.418,27	945.522,88
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	23.839,96	24.216,47	25.084,01
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.363,43	11.894,25	12.678,26
	6. Konstruksi	1.590.389,71	1.623.412,95	1.731.285,22
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.648.399,89	1.711.991,78	1.868.153,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.281.484,63	2.505.118,37	2.709.891,52
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.915.053,52	2.112.996,33	2.388.520,45
	10. Informasi dan Komunikasi	962.912,12	1.006.944,06	1.055.413,30

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	642.046,66	731.776,53	761.241,97
	12. Real Estate	711.528,20	724.717,33	765.120,79
	13. Jasa Perusahaan	131.173,23	142.718,57	154.756,54
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	407.500,36	426.835,69	467.846,28
	15. Jasa Pendidikan	326.228,55	337.600,10	367.359,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.560,11	386.767,10	423.768,00
	17. Jasa Lainnya	247.491,35	259.128,71	279.402,59
	PDRB ADH Berlaku	15.613.276,95	16.845.009,69	18.236.311,81
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.723.710,40	6.169.684,07	6.544.710,10
	2. Pertambangan dan Penggalian	280.999,77	288.304,05	287.542,23
	3. Industri Pengolahan	1.518.608,39	1.686.305,21	1.845.916,91
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.261,63	33.476,61	36.057,13
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.832,49	42.378,80	44.707,24
	6. Konstruksi	2.501.179,21	2.591.319,38	2.720.233,84
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.319.825,21	2.440.374,29	2.670.692,96
	8. Transportasi dan Pergudangan	424.495,67	470.216,05	522.952,09
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.743.839,60	5.530.900,57	6.257.232,77
	10. Informasi dan Komunikasi	1.480.998,95	1.544.631,17	1.632.906,46
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.158.586,29	1.337.744,33	1.389.559,59
	12. Real Estate	1.290.459,70	1.335.134,83	1.454.084,93
	13. Jasa Perusahaan	283.012,53	313.062,58	346.454,80
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.653,99	2.008.567,44	2.208.824,14
	15. Jasa Pendidikan	470.255,13	487.272,02	521.642,77
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	693.729,77	716.370,05	774.924,53
	17. Jasa Lainnya	606.245,20	654.056,26	725.400,47
	PDRB ADH Berlaku	25.531.693,93	27.649.797,71	29.983.842,96
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.152.829,32	4.418.709,58	4.724.545,49
	2. Pertambangan dan Penggalian	176.424,08	175.537,09	173.694,91
	3. Industri Pengolahan	2.447.355,08	2.609.050,99	2.827.515,10

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	98.010,62	101.104,90	107.551,09
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.721,84	144.254,69	151.350,92
	6. Konstruksi	5.831.279,10	5.936.588,64	6.313.728,28
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.740.948,09	5.023.681,41	5.481.307,85
	8. Transportasi dan Pergudangan	19.128.495,84	21.326.037,51	22.903.154,51
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.877.404,33	19.318.413,47	21.746.704,50
	10. Informasi dan Komunikasi	4.216.549,63	4.474.419,94	4.670.822,90
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.043.883,80	2.441.594,87	2.559.973,49
	12. Real Estate	2.278.749,26	2.370.020,26	2.499.935,42
	13. Jasa Perusahaan	508.423,39	564.326,22	617.979,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.184.119,45	2.458.991,02	2.835.975,21
	15. Jasa Pendidikan	1.980.372,32	2.004.091,16	2.176.087,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	986.583,93	1.022.096,32	1.115.884,41
	17. Jasa Lainnya	611.145,40	674.808,97	756.959,08
	PDRB ADH Berlaku	68.396.295,48	75.063.727,04	81.663.170,23
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675.839,89	3.891.726,30	4.097.613,73
	2. Pertambangan dan Penggalian	400.329,48	419.974,31	446.764,85
	3. Industri Pengolahan	3.702.588,93	3.987.517,87	4.318.455,53
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	35.993,58	39.498,26	43.094,17
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36.914,45	39.844,01	41.417,63
	6. Konstruksi	3.748.697,89	3.811.078,29	4.165.576,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.519.746,62	2.699.847,80	2.930.152,53
	8. Transportasi dan Pergudangan	278.927,26	312.035,20	334.028,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.809.142,28	7.853.299,40	9.035.673,50
	10. Informasi dan Komunikasi	2.022.467,54	2.185.675,15	2.233.785,69
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.470.144,23	1.616.080,27	1.681.268,34
	12. Real Estate	1.348.206,25	1.369.136,50	1.461.391,24
	13. Jasa Perusahaan	407.992,81	448.403,69	484.994,43
	14. Administrasi	1.603.134,89	1.736.920,82	1.964.488,96

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	694.994,47	735.679,20	811.178,34
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.127.533,03	1.186.379,33	1.281.571,56
	17. Jasa Lainnya	646.762,67	713.502,61	785.414,50
	PDRB ADH Berlaku	30.529.416,27	33.046.599,01	36.116.870,72
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.184.286,74	2.429.551,82	2.558.267,67
	2. Pertambangan dan Penggalian	295.100,52	312.759,48	327.505,29
	3. Industri Pengolahan	951.253,24	1.024.071,76	1.128.859,59
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	12.862,85	14.893,69	15.921,51
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19.316,40	20.615,55	21.776,40
	6. Konstruksi	1.007.661,23	1.050.024,51	1.116.707,55
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	875.010,35	917.712,34	1.025.417,10
	8. Transportasi dan Pergudangan	255.309,30	308.267,67	367.963,82
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208.761,79	1.455.499,58	1.698.243,26
	10. Informasi dan Komunikasi	913.977,88	964.968,84	1.004.260,18
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	474.210,75	530.410,20	545.072,07
	12. Real Estate	232.428,12	244.020,72	257.461,87
	13. Jasa Perusahaan	103.802,93	117.940,92	131.392,14
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	553.753,78	587.891,46	649.815,91
	15. Jasa Pendidikan	230.940,31	243.654,61	268.964,66
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	484.075,44	501.955,32	561.731,87
	17. Jasa Lainnya	269.463,75	291.246,90	324.367,98
	PDRB ADH Berlaku	10.072.215,38	11.015.485,37	12.003.728,87
6	Bangli			
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.159.462,75	2.305.078,49	2.474.801,64
	Pertambangan dan Penggalian	139.860,70	141.074,92	147.613,01
	Industri Pengolahan	681.839,42	706.341,00	732.702,34
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.481,68	3.643,35	3.985,19
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.879,57	4.899,17	5.228,93

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Konstruksi	675.513,40	685.416,40	724.129,51
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	807.988,58	831.315,69	908.822,95
	Transportasi dan Pergudangan	89.153,81	97.253,93	99.497,80
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964.649,92	1.138.978,65	1.303.066,09
	Informasi dan Komunikasi	354.235,97	374.687,21	388.929,34
	Jasa Keuangan dan Asuransi	257.966,62	298.905,38	314.377,46
	Real Estate	241.140,91	247.720,41	259.701,91
	Jasa Perusahaan	42.964,87	47.956,89	53.280,99
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	895.256,27	956.295,79	1.050.067,30
	Jasa Pendidikan	181.363,75	186.771,51	204.525,22
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.989,83	130.919,24	139.178,71
	Jasa Lainnya	283.561,43	308.344,91	345.094,27
	PDRB ADH Berlaku	7.908.309,48	8.465.602,94	9.155.002,66
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.883.332,90	5.136.046,48	5.408.960,39
	2. Pertambangan dan Penggalian	676.062,20	732.501,48	768.391,65
	3. Industri Pengolahan	774.052,10	812.244,50	885.278,65
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.350,10	19.583,50	21.122,88
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24.557,10	26.065,36	26.777,51
	6. Konstruksi	1.318.015,90	1.388.940,76	1.463.968,91
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.082.719,70	1.083.924,05	1.214.909,76
	8. Transportasi dan Pergudangan	3.070.993,40	3.239.840,33	3.539.433,97
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.410,30	1.963.789,48	2.237.371,58
	10. Informasi dan Komunikasi	653.175,20	688.430,29	732.728,13
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.929,80	1.194.490,15	1.228.541,66
	12. Real Estate	754.932,90	796.748,39	846.901,34
	13. Jasa Perusahaan	152.030,40	166.652,96	185.064,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.395,50	1.470.849,27	1.637.060,85
	15. Jasa Pendidikan	467.122,00	505.366,70	539.687,91
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	442.879,10	472.299,19	507.147,23
	17. Jasa Lainnya	487.816,80	512.555,10	561.058,93

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	PDRB ADH Berlaku	18.974.775,40	20.210.327,99	21.804.405,92
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.004.808,88	8.445.133,84	9.027.020,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	327.936,72	346.694,92	363.273,69
	3. Industri Pengolahan	2.364.120,60	2.671.661,09	2.952.350,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	67.514,94	72.171,29	77.326,99
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42.908,86	42.068,50	43.865,09
	6. Konstruksi	3.541.541,69	3.716.363,13	3.979.787,81
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.727.916,99	5.023.231,19	5.552.965,40
	8. Transportasi dan Pergudangan	454.042,28	508.734,02	560.652,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.198.370,94	7.069.183,70	8.084.796,84
	10. Informasi dan Komunikasi	2.198.163,88	2.266.618,36	2.369.033,57
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.931.174,90	2.257.241,86	2.347.322,29
	12. Real Estate	1.763.266,42	1.852.223,07	1.964.574,23
	13. Jasa Perusahaan	281.872,31	303.807,00	331.904,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.994,79	2.129.695,24	2.362.569,42
	15. Jasa Pendidikan	2.726.839,41	2.849.266,95	3.124.219,73
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927.592,07	972.804,27	1.042.221,84
	17. Jasa Lainnya	791.295,42	860.853,44	936.629,31
	PDRB ADH Berlaku	38.351.361,10	41.387.751,87	45.120.514,82
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.949.625,79	3.778.610,97	3.837.463,68
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.875.731,94	4.206.282,45	4.487.141,40
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	347.657,68	409.059,32	430.414,00
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	136.499,25	134.263,81	144.638,45
	6. Konstruksi	6.689.585,29	6.820.641,59	7.409.557,07
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.041.481,81	6.453.315,98	7.107.080,77
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.773.632,76	1.918.713,85	2.083.262,79

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.328.513,00	16.682.509,16	18.728.527,81
	10. Informasi dan Komunikasi	2.844.638,21	2.975.124,08	3.105.158,31
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.210.391,02	5.023.714,55	5.257.465,91
	12. Real Estate	2.457.089,19	2.496.708,08	2.685.199,57
	13. Jasa Perusahaan	1.225.422,18	1.345.518,35	1.506.743,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.997.349,63	3.254.187,63	3.626.833,14
	15. Jasa Pendidikan	6.587.509,19	6.992.708,13	7.617.190,71
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.636.171,17	1.700.830,67	1.848.932,38
	17. Jasa Lainnya	999.003,56	1.108.025,10	1.223.512,19
	PDRB ADH Berlaku	60.100.301,67	65.300.213,72	71.099.121,41
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.744.646,70	40.069.823,24	42.528.777,42
	2. Pertambangan dan Penggalan	2.436.619,10	2.549.557,56	2.652.258,09
	3. Industri Pengolahan	17.115.768,99	18.664.578,60	20.185.046,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	640.751,91	717.467,90	760.528,38
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	446.923,22	458.724,81	483.368,76
	6. Konstruksi	26.805.931,83	27.563.207,76	29.253.400,09
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	24.560.349,18	25.893.433,87	28.450.847,02
	8. Transportasi dan Pergudangan	27.658.642,39	30.622.899,07	33.055.658,92
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.672.739,87	63.866.219,32	72.199.795,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.517.170,16	16.101.487,08	16.908.037,19
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.277.201,87	15.455.369,56	16.104.962,56
	12. Real Estate	11.055.527,30	11.449.017,85	12.112.517,64
	13. Jasa Perusahaan	3.159.502,42	3.445.130,35	3.819.555,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.902.185,23	14.955.848,50	16.666.176,67
	15. Jasa Pendidikan	13.669.131,84	14.244.438,05	15.509.082,88
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.809.768,37	7.085.731,87	7.682.945,41
	17. Jasa Lainnya	4.909.174,98	5.296.623,87	5.775.986,60
	PDRB ADH Berlaku	274.382.035,36	298.439.559,26	324.148.944,10

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
 - 2) Retribusi jasa usaha; dan
 - 3) Retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pemakaian Barang Milik Daerah, pendapatan dari pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pungutan bagi Wisatawan Asing.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Insentif Fiskal.
- b. Transfer Antar Daerah
- Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak; dan
 - 7) Melakukan Sinergitas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan

potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.

3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik

pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;

4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 8 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonisdengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal
- Prioritas 2: Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 3: Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan: UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
- Prioritas 4: Infrastruktur Darat, Laut, Udara, dan Transportasi
- Prioritas 5: Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Prioritas 6: Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
- Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.3.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD TA 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.3.1.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2025

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan poin 5 hal khusus lainnya pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 . Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir E.1.a. Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.603.057.858.136,00 atau 35,11% dari total belanja daerah sebesar Rp7.412.970.277.983,60, dengan realisasi mencapai Rp2.168.726.863.718,05 atau 33,09% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp6.555.001.412.634,62. Dengan demikian, alokasi tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital

- 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
- 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)
HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/*expo* siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*
Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual
Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

Alokasi anggaran dan realisasi belanja wajib fungsi pendidikan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp2.138.615.498.744,00 atau 35,24% dari total anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp6.068.805.441.963,60 dengan realisasi sebesar Rp1.788.117.115.228,62 atau 33,68% dari total realisasi anggaran belanja daerah diluar Belanja Transfer sebesar Rp5.308.662.002.331,59.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar Belanja Transfer. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2.3.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2025, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD TA 2025 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.

- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
- b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
- c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
- d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari-hari ataupun bencana;
- e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

f. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;
 - 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
- a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
 - c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

3. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2025 dirinci dalam *lampiran* 52.

4. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- b. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat

- c. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- d. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- e. Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - 1) Penggerakan Aksi Bergizi
 - Sasaran : Pelajar putri
 - Kegiatan : Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
 - 2) Penggerakan Bumil Sehat
 - Sasaran : Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
 - Kegiatan : Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
 - 3) Penggerakan Posyandu Aktif
 - Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
 - Kegiatan : Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
 - 4) Penggerakan Cegah Stunting
 - Sasaran : Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
 - Kegiatan : Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)
 - 5) Jambore Kader
 - Sasaran : Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)
 - Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan
 - Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

5. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi *off taker* pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa

- Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
 - i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp7.010.000.000
 - j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
 - 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
 - k. Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
 - 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan
- Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2025 dirinci dalam *lampiran 52*.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2025.Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 1.860.331.366,39- yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 23.029.940.683,00- terealisasi sebesar Rp. 21.169.609.316,61- atau 91,92%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp 21.169.609.316,61- atau 91,92% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92%	23.791.258.861,75
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.426.026.668,0	15.171.606.396,61	92,36%	13.955.406.701,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.343.902,00	84.564.932,00	82,63%	121.098.720,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.264.900,00	6.920.800,00	83,74%	5.815.750,00
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	92,73%	10.801.409.908,00
	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.997.800,00	9.901.200,00	90,03%	9.729.000,00
	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	48.405.800,00	36.311.500,00	75,01%	66.602.200,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.071.194,00	75.400.000,00	99,12%	54.200.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	14.501.920,00	67,45%	9.734.700,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	3.625.000,00	80,55%	4.500.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.573.000,00	33.821.696,00	68,22%	31.726.668,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	683.055.300,00	629.293.989,00	92,13%	615.903.541,69
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.900,00	1.270.000,00	63,69%	1.660.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	246.000.000,00	178.603.990,00	72,60%	189.026.790,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.216.668,00	691.452.404,00	98,75%	839.177.615,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	788.476.657,00	707.253.857,00	89,70%	755.227.380,00
	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	49.920.000,00	33.605.250,00	67,32%	40.920.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.538.368,00	457.640.522,61	97,46%	408.874.429,06
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	789.809.889,00	751.954.289,00	95,21%	148.079.420,00
	FasilitasIzin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	779.890.289,00	742.362.289,00	95,19%	142.787.420,00
	FasilitasIzin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KoperasiSimpanPinjam untukKoperasidengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.919.600,00	9.592.000,00	96,70%	5.292.000,00
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.397.105,00	74.975.265,00	96,87%	127.986.135,00
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	26.908.000,00	25.051.560,00	93,10%	36.267.910,00
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah,Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.489.105,00	49.923.705,00	98,88%	89.718.225,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	87.702.810,00	81.014.609,00	92,37%	175.150.930,00
	PeningkatanProduktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	61.553.210,00	55.462.310,00	90,10%	131.343.780,00
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26.149.600,00	25.552.299,00	97,71%	43.807.150,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	404.183.821,00	381.575.309,00	94,40%	925.679.759,00
	Menumbuhkembangkan UMKM untukmenjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri ehingga dapat Meningkatkan Penciptaan LapanganKerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan PengentasanKemiskinan	338.343.821,00	326.750.299,00	96,57%	875.991.259,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewiausahaan	65.840.000,00	54.825.010,00	83,27%	49.688.500,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	367.888.094,00	287.939.844,00	78,26%	394.362.810,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	174.608.394,00	161.399.821,00	92,43%	218.261.060,00
	Peningkatan Pemahamandan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	50.000.000,00	48.031.977,00	96,06%	176.101.750,00
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	97.119.700,00	54,261.768,00	55,87%	0
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	46.160.000,00	24,246.278,00	52,53%	0

	UPTD DIKLAT KOPERASI UMKM	4.876.932.296,00	4.420.543.604,00	90,64%	8.064.593.106,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	477.808.994,00	414.268.710,00	86,70%	375.868.514,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	699.600,00	616.050,00	88,06%	605.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.146.100,00	7.954.360,00	60,50%	2.269.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.904.050,00	56.404.040,00	99,12%	32.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	999.700,00	299.700,00	29,98%	650.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	990.000,00	0,00	0%	945.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.920.000,00	0	0,00%	1.980.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	989.100,00	630.000,00	63,69%	830.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	14.491.034,00	29,88%	14.187.234,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.265.968,00	160.265.968,00	100%	154.108.580,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.191.492,00	94.856.592,00	93,74%	87.347.440,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.070.000,00	1.885.000,00	91,06%	1.850.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.132.984,00	76.865.966,00	85,28%	78.596.280,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4.399.123.302,00	4.006.274.894,00	91,07	7.688.724.592,00
Jumlah		23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92%	23.791.258.861,75,00

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA 64).

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% ke bawah).

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 terdapat Kegiatan yang serapan belanjanya di bawah 80% yaitu:

Sub Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi(%)	Hambatan dan KendalaPencapaianTarget
PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	100	75,01	Hasil Negosiasi Pejabat Pengadaan Barang sehingga nilai perolehan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga yang tercantum pada DPA.
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	100	67,45	Hasil Negosiasi Pejabat Pengadaan Barang sehingga nilai perolehan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga yang tercantum pada DPA.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	68,22	Adanya surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali No 7054/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali 2025
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	63,69	Harga yang tercantum di DPA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran sedangkan volumenya sudah sesuai dengan DPA.
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	100	72,60	Sesuai Tagihan Rekening Pemakaian Listrik,Telpon dan Aiir sedangkan Bulan September-Desember listrik di kantor PLUT dibayar oleh kepolisian yang meminjam Gedung sesuai BA Pinjam Pakai No B.17.000/1287/SET/DISKOP.UKM tanggal 9 Mei 2025.
PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	100	67,32	Adanya surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali No 7054/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali 2025
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	100	55,87	Belanja Sewa Alat (kursi, meja dan tenda) tidak terealisasi karena waktu tidakmemungkinkan untuk pelaksanaan,Pembayaran Honorarium Narasumber tidak dicairkan sepenuhnya karena pelaksanaan Kegiatan di efisien kan
Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	100	52,53	Pembayaran Honorarium Narasumber tidak dicairkan sepenuhnya karena pelaksanaan Kegiatan di efisien kan
PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	100	60,50	Hasil Negosiasi Pejabat Pengadaan Barang sehingga nilai perolehan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga yang tercantum pada DPA.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	29,98	Hasil Negosiasi Pejabat Pengadaan Barang sehingga nilai perolehan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga yang tercantum pada DPA.
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	0	Adanya surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali No 7054/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali 2025
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	0	Adanya surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali No 7054/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Bali 2025
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	63,69	Harga yang tercantum di DPA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran sedangkan volumenya sudah sesuai dengan DPA.
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	100	29,88	Sesuai Tagihan Rekening Pemakaian Listrik,Telpon dan Aiir

3.2. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja KeuanganOPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPKD (SA OPKD) yang dilaksanakan pada OPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi AnggaranOPDdan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- e. Sosial
- 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
- 3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
- 4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
- 5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
- 6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
- 7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
- 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9. Dinas Perhubungan
- 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 13. Dinas Kebudayaan
- 14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
- 15. Dinas Kelautan dan Perikanan

16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrua mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan

11) Arus Kas.

- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak

terduga.

- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

- c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila

terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Transfer Lainnya;
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Bagi Hasil;
- f. Piutang Transfer Antar Daerah;
Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- g. Piutang Kelebihan Transfer
Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya
Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:
 - 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
 - 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 - 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- Pemberian pinjaman**
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

- b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah

daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

- a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi nonpermanen:

- a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

(1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana kooperatif.

(2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

(3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap

di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

- a. Komponen Biaya
 - 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.
- e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- f. Kapitalisasi Aset Tetap
- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu – Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. Aset Bersejarah
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- j. Penghentian dan Pelepasan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan

keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- Asuransi;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi
 - a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
 - d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

- 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
 - 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu

sebagai berikut:

- a. **Tagihan Jangka Panjang**
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - 1) **Tagihan Penjualan Angsuran**
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) **Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah**
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - 1) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa**
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.
 - 2) **Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).
 - 3) **Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)**
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - 4) **Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)**
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- c. **Aset Tidak Berwujud (ATB)**
Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
 - 1) **Goodwill**
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian

kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- d. Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban

memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian

akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 terdiri dari :

5.1.1 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Rincian BELANJA DAERAH

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	91,83	23.137.155.320,06
BELANJA MODAL	955.055.300,00	897.272.928,61	93,94	654.103.541,69
Jumlah	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92	23.791.258.861,75

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.621.649.545,14) atau -11,01%.

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Rincian BELANJA OPERASI

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	13.114.769.179,00	12.157.539.336,00	92,70	10.801.409.908,00
Belanja Barang dan Jasa	8.951.116.204,00	8.105.797.052,00	90,55	12.310.745.412,06
Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	91,83	23.137.155.320,06

Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.864.818.932,06) atau -12,38%.

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1 Rincian Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.103.225.383,00	5.883.861.052,00	96,40	4.455.475.657,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.011.543.796,00	6.273.678.284,00	89,47	6.278.434.251,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00
Jumlah	13.114.769.179,00	12.157.539.336,00	92,70	10.801.409.908,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.356.129.428,00 atau 12,55%.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1.1 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	3.921.953.210,00	3.843.364.024,00	97,99	3.240.763.431,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	370.406.952,00	363.238.952,00	98,06	309.166.666,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.638.750,00	203.880.000,00	97,25	171.860.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.629.165,00	116.629.165,00	100,00	137.119.900,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.295.000,00	116.240.000,00	99,10	85.120.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	202.776.000,00	200.748.240,00	99,00	157.296.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	767.497.060,00	700.993.474,00	91,33	47.861.619,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.626,00	52.971,00	79,50	39.131,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	349.477.475,00	306.292.814,00	87,64	279.783.186,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.291.699,00	8.105.405,00	87,23	6.616.343,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.887.028,00	24.316.007,00	87,19	19.849.141,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.306.418,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.103.225.383,00	5.883.861.052,00	96,40	4.455.475.657,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.428.385.395,00 atau 32,05%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Gaji Pokok ASN dengan realisasi baru sebesar Rp602.600.593,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja Gaji Pokok ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dengan realisasi baru sebesar Rp54.072.286,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja Tunjangan Keluarga ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dengan realisasi baru sebesar Rp32.020.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja Tunjangan Jabatan ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
4. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dengan realisasi baru sebesar Rp31.120.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja Fungsional Umum ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
5. Belanja Tunjangan Beras ASN dengan realisasi baru sebesar Rp43.452.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja Tunjangan Beras ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
6. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp653.131.855,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN mengalami peningkatan signifikan di Tahun 2025 disebabkan karena PPh Tambahan Penghasilan Pegawai di subsidi dari APBD sedangkan di TA 2024 PPh ditanggung oleh masing-masing PNS.
7. Belanja Pembulatan Gaji ASN belum optimal sebesar 79,50% dengan realisasi baru sebesar Rp13.840,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2025 Belanja Pembulatan Gaji ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
- 8. Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN dengan realisasi baru sebesar Rp26.509.628,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja Jaminan Kesehatan ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
- 9. Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dengan realisasi baru sebesar Rp1.489.062,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
- 10. Belanja Luran Jaminan Kematian ASN dengan realisasi baru sebesar Rp4.466.866,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 Belanja luran Jaminan Kematian ASN mengalami realisasi baru karena ada sebanyak 36 orang pegawai Non ASN diangkat menjadi Pegawai PPPK.
- 11. Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat di Tahun 2025 belum optimal disebabkan belum adanya arahan/instruksi untuk direalisasikan.

5.1.1.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.2.1 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.236.952.225,00	3.779.013.369,00	89,19	3.916.705.838,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	815.663.640,00	737.545.859,00	90,42	680.126.346,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.958.927.931,00	1.757.119.056,00	89,69	1.681.602.067,00
Jumlah	7.011.543.796,00	6.273.678.284,00	89,47	6.278.434.251,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp4.755.967,00) atau -0,07%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN dengan realisasi baru sebesar Rp57.419.513,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja di Tahun 2025 mengalami peningkatan disebabkan karena ada 3 orang PNS (PPPK) mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai..
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN dengan realisasi baru sebesar Rp75.516.989,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja di Tahun 2025 mengalami peningkatan disebabkan karena ada 3 orang PNS (PPPK) mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai..

5.1.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.3.1 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp67.500.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Honorarium belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp45.900.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 rekening Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya tidak lagi berada pada rekening Belanja Gaji dan Tunjangan melainkan pada Rekening Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp21.600.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 rekening Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya tidak lagi berada pada rekening Belanja Gaji dan Tunjangan melainkan pada Rekening Belanja Barang dan Jasa

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	1.755.970.244,00	1.620.849.751,00	92,30	2.768.637.762,00
Belanja Jasa	5.751.373.960,00	5.203.712.155,00	90,47	7.991.571.174,00
Belanja Pemeliharaan	220.790.000,00	127.227.250,00	57,62	442.163.869,06
Belanja Perjalanan Dinas	693.982.000,00	625.007.896,00	90,06	1.096.372.607,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	529.000.000,00	529.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Jumlah	8.951.116.204,00	8.105.797.052,00	90,55	12.310.745.412,06

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp4.204.948.360,06) atau -34,15%.

5.1.1.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1.1 Rincian Belanja Barang

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	1.755.970.244,00	1.620.849.751,00	92,30	2.768.637.762,00
Jumlah	1.755.970.244,00	1.620.849.751,00	92,30	2.768.637.762,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.147.788.011,00) atau -41,45%.

5.1.1.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.2.1 Rincian Belanja Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	5.219.709.576,00	4.737.550.034,00	90,76	6.468.493.044,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	304.916.984,00	278.156.450,00	91,22	246.578.130,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	71.497.400,00	32.755.671,00	45,81	60.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	155.250.000,00	155.250.000,00	100,00	1.216.500.000,00
Jumlah	5.751.373.960,00	5.203.712.155,00	90,47	7.991.571.174,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp2.787.859.019,00) atau -34,88%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan realisasi baru sebesar Rp31.578.320,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
2. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin belum optimal sebesar 45,81% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Di Tahun 2025 kegiatan Diklat dilaksanakan di Gedung PLUT dan di Kantor Desa/Kelurahan sehingga untuk sewa peralatan dan mesin tidak direalisasikan.
3. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dengan penurunan signifikan sebesar (Rp1.061.250.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Di Tahun 2025 kegiatan Diklat Sebagian besar dilaksanakan di Gedung PLUT dan di Kantor Desa/Kelurahan sehingga untuk sewa Gedung/bangunan untuk penganggaranya mengalami penurunan.

5.1.1.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.3.1 Rincian Belanja Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	220.790.000,00	127.227.250,00	57,62	191.981.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	250.182.869,06
Jumlah	220.790.000,00	127.227.250,00	57,62	442.163.869,06

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp314.936.619,06) atau -71,22%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin belum optimal sebesar 57,62% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Karena ada beberapa biaya pemeliharaan tidak dapat dicairkan lagi karena harga di e katalog melebihi anggaran di DPA untuk sisa dimasing-masing unit.
2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp250.182.869,06) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

5.1.1.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.4.1 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	693.982.000,00	625.007.896,00	90,06	1.096.372.607,00
Jumlah	693.982.000,00	625.007.896,00	90,06	1.096.372.607,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp471.364.711,00) atau -42,99%.

5.1.1.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.5.1 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	515.000.000,00	515.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	529.000.000,00	529.000.000,00	100,00	12.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp517.000.000,00 atau 4.308,33%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi baru sebesar Rp2.000.000,00 pada TA 2025 .
2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi baru sebesar Rp515.000.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2025 ada penganggaran Belanja Jasa untuk pembuatan Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada sebanyak 206 Koperasi.

5.1.1.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3.1 Rincian Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Subsidi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp16.000.000,00) atau -64,00%.

5.1.1.1.3.1 Belanja Subsidi kepada Koperasi

Berikut ini adalah Belanja Subsidi kepada Koperasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3.1.1 Rincian Belanja Subsidi kepada Koperasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Jumlah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Subsidi kepada Koperasi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp16.000.000,00) atau -64,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi kepada Koperasi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Subsidi kepada Koperasi dengan penurunan signifikan sebesar (Rp16.000.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Belanja Subsidi kepada Koperasi dengan penurunan signifikan sebesar (Rp16.000.000,00) pada TA 2025 disebabkan karena Tahun 2025 sebagian anggaran di belanja Subsidi dialihkan ke rekening Belanja Barang dan Jasa untuk Subsidi Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1 Rincian BELANJA MODAL

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.055.300,00	629.293.989,00	92,12	468.817.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	185.286.041,69
Jumlah	955.055.300,00	897.272.928,61	93,94	654.103.541,69

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp243.169.386,92 atau 37,17%.

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	27.640.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	126.592.400,00	120.007.889,00	94,79	152.791.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	205.608.100,00	199.529.500,00	97,04	102.421.000,00
Belanja Modal Komputer	350.854.800,00	309.756.600,00	88,28	185.965.000,00
Jumlah	683.055.300,00	629.293.989,00	92,12	468.817.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp160.476.489,00 atau 34,23%.

5.1.1.2.1.1 Belanja Modal Alat Angkutan

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Angkutan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.1.1 Rincian Belanja Modal Alat Angkutan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	27.640.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	27.640.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp27.640.000,00) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp27.640.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk belanja Modal Alat Angkutan sedangkan untuk penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan.

5.1.1.2.1.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.2.1 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	4.968.500,00	4.750.000,00	95,60	59.275.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	112.009.100,00	107.007.889,00	95,53	93.516.500,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.614.800,00	8.250.000,00	85,80	0,00
Jumlah	126.592.400,00	120.007.889,00	94,79	152.791.500,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp32.783.611,00) atau -21,45%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Alat Kantor dengan penurunan signifikan sebesar (Rp54.525.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk belanja Modal Alat Angkutan sedangkan untuk penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga dengan realisasi baru sebesar Rp13.491.389,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Tahun 2025 mengalami peningkatan karena ada penambahan pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di PLUT (UPT yang baru terbentuk
3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan realisasi baru sebesar Rp8.250.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Modal Meja dan Kursi/Rapat Pejabat Tahun 2025 mengalami peningkatan karena ada penambahan pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di PLUT (UPT yang baru terbentuk

5.1.1.2.1.3 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.3.1 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	205.608.100,00	199.529.500,00	97,04	102.421.000,00
Jumlah	205.608.100,00	199.529.500,00	97,04	102.421.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp97.108.500,00 atau 94,81%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Alat Studio dengan kenaikan signifikan sebesar Rp97.108.500,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Modal Alat Studio Tahun 2025 mengalami peningkatan karena ada penambahan pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di PLUT (UPT yang baru terbentuk

5.1.1.2.1.4 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.1.4.1 Rincian Belanja Modal Komputer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	320.214.800,00	289.843.200,00	90,51	157.327.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	30.640.000,00	19.913.400,00	64,99	28.638.000,00
Jumlah	350.854.800,00	309.756.600,00	88,28	185.965.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp123.791.600,00 atau 66,56%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Komputer Unit dengan kenaikan signifikan sebesar Rp132.516.200,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Belanja Modal Komputer Unit Tahun 2025 mengalami peningkatan karena ada penambahan pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di PLUT (UPT yang baru terbentuk)
2. Belanja Modal Peralatan Komputer belum optimal sebesar 64,99% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.2.1 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
Jumlah	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp267.978.939,61.

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Berikut ini adalah Belanja Modal Bangunan Gedung yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.2.1.1 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
Jumlah	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp267.978.939,61, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan realisasi baru sebesar Rp267.978.939,61 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 karena tahun 2025 ada kegiatan rehab Gedung Kantor pada Dinas.

5.1.1.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.3.1 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	185.286.041,69
Jumlah	0,00	0,00	0,00	185.286.041,69

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp185.286.041,69) atau -100,00%.

5.1.1.2.3.1 Belanja Modal Instalasi

Berikut ini adalah Belanja Modal Instalasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2.3.1.1 Rincian Belanja Modal Instalasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	115.481.041,69
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	69.805.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	185.286.041,69

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Instalasi TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp185.286.041,69) atau -100,00%, berikut penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024:

1. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp115.481.041,69) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk belanja Modal Alat Angkutan sedangkan untuk penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan
2. Belanja Modal Instalasi Lain belum optimal dengan penurunan signifikan sebesar (Rp69.805.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk belanja Modal Alat Angkutan sedangkan untuk penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan

5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1 Rincian ASET

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
ASET LANCAR	84.883.100,00	80.777.400,00	4.105.700,00	5,08
ASET TETAP	12.113.087.108,30	11.610.784.739,69	502.302.368,61	4,32
Jumlah	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69	506.408.068,61	4,33

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp506.408.068,61 atau 4,33%.

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1 Rincian ASET LANCAR

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Persediaan	84.883.100,00	80.777.400,00	4.105.700,00	5,08
Jumlah	84.883.100,00	80.777.400,00	4.105.700,00	5,08

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.105.700,00 atau 5,08%.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	84.883.100,00	80.777.400,00	4.105.700,00	5,08
Jumlah	84.883.100,00	80.777.400,00	4.105.700,00	5,08

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.105.700,00 atau 5,08%.

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.1.1.1.1 Rincian Barang Pakai Habis

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan	82.827.100,00	80.777.400,00	2.049.700,00	2,53
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00	100,00
Jumlah	84.883.100,00	80.777.400,00	4.105.700,00	5,08

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.105.700,00 atau 5,08%, berikut penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Komponen Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor mengalami saldo baru sebesar Rp2.056.000,00 .

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1 Rincian ASET TETAP

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.182.228.989,00	5.850.583.975,00	331.645.014,00	5,66
Gedung dan Bangunan	8.965.554.653,61	8.697.575.714,00	267.978.939,61	3,08
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.662.691,69	264.662.691,69	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.812.260,00	79.812.260,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.944.559.486,00)	(7.847.237.901,00)	(97.321.585,00)	1,24
Jumlah	12.113.087.108,30	11.610.784.739,69	502.302.368,61	4,32

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp502.302.368,61 atau 4,32%.

Mutasi ASET TETAP selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2 Mutasi ASET TETAP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		11.610.784.739,69
Mutasi Tambah:		
	Belanja Modal (SP2D-LS)	897.272.928,61
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	297.648.975,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.194.921.903,61
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	297.648.975,00
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	394.970.560,00
Jumlah Mutasi Kurang		692.619.535,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		12.113.087.108,30

Berdasarkan tabel di atas, ASET TETAP per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.113.087.108,30 merupakan saldo awal sebesar Rp11.610.784.739,69 ditambah mutasi tambah sebesar Rp1.194.921.903,61 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp692.619.535,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp502.302.368,61 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.1.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.1.1.1 Rincian Tanah

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Persil	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00
Jumlah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1 Rincian Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Angkutan	2.001.379.000,00	2.003.979.000,00	(2.600.000,00)	-0,12
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.540.399.489,00	2.530.378.675,00	10.020.814,00	0,39
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	517.433.500,00	349.204.000,00	168.229.500,00	48,17
Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00
Komputer	1.108.015.000,00	952.020.300,00	155.994.700,00	16,38
Jumlah	6.182.228.989,00	5.850.583.975,00	331.645.014,00	5,66

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp331.645.014,00 atau 5,66%.

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.2 Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	5.850.583.975,00
	Mutasi Tambah:	
	Belanja Modal (SP2D-LS)	629.293.989,00
	Jumlah Mutasi Tambah	629.293.989,00
	Mutasi Kurang:	
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	297.648.975,00
	Jumlah Mutasi Kurang	297.648.975,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2025	6.182.228.989,00

Berdasarkan tabel di atas, Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.182.228.989,00 merupakan saldo awal sebesar Rp5.850.583.975,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp629.293.989,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp297.648.975,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp331.645.014,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.1.1 Rincian Alat Angkutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	2.001.379.000,00	2.003.979.000,00	(2.600.000,00)	-0,12
Jumlah	2.001.379.000,00	2.003.979.000,00	(2.600.000,00)	-0,12

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.600.000,00) atau -0,12%.

Mutasi Alat Angkutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.1.2 Mutasi Alat Angkutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Awal 1 Januari 2025	2.003.979.000,00
	Mutasi Kurang:	

Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Dinas Koperasi UKM Prov.Bali	2.600.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		2.600.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		2.001.379.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.001.379.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp2.003.979.000,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp2.600.000,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp2.600.000,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.2 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.2.1 Rincian Alat Bengkel dan Alat Ukur

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.3.1 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Kantor	501.876.000,00	509.321.000,00	(7.445.000,00)	-1,46
Alat Rumah Tangga	1.867.641.689,00	1.856.045.800,00	11.595.889,00	0,62
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	170.881.800,00	165.011.875,00	5.869.925,00	3,55
Jumlah	2.540.399.489,00	2.530.378.675,00	10.020.814,00	0,39

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp10.020.814,00 atau 0,39%.

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.3.2 Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		2.530.378.675,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat berupa Kursi Kerja Pejabat Eselon II Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	8.250.000,00
2	Belanja Modal alat kantor lainnya berupa Screen Projector Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	4.750.000,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) berupa Mesin Potong Rumput Gendong, Sub. Keg. Pengadaan Perlaatan dan Mesin Lainnya pd Dinas Kop, UKM Prov Bali	4.999.999,00
4	Belanja Modal Alat Pendingin berupa AC Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.501.640,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Televisi Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.506.250,00
Jumlah Mutasi Tambah		120.007.889,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Dinas Koperasi UKM Prov.Bali	109.987.075,00
Jumlah Mutasi Kurang		109.987.075,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		2.540.399.489,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.540.399.489,00 merupakan saldo awal sebesar Rp2.530.378.675,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp120.007.889,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp109.987.075,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp10.020.814,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.4.1 Rincian Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Studio	431.298.500,00	263.069.000,00	168.229.500,00	63,94
Alat Komunikasi	86.135.000,00	86.135.000,00	0,00	0,00
Jumlah	517.433.500,00	349.204.000,00	168.229.500,00	48,17

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp168.229.500,00 atau 48,17%, berikut penjelasan saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komponen Alat Studio mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp168.229.500,00 atau 63,94% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.4.2 Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		349.204.000,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio SUB Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali	28.050.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Audio berupa Camera/Tripod, Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Sub.Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM Prov Bali	40.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Audio berupa Sound System, Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Sub.Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pd Dinas Koperasi, UKM Prov Bali.	24.198.000,00
4	Belanja Modal Alat Studio berupa Alat Video Conference, Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Sub.Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM Prov Bali	77.478.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio dan Film berupa Podcast , Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Sub.Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM Prov Bali	29.803.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		199.529.500,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Dinas Koperasi UMKM Prov.Bali	31.300.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		31.300.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		517.433.500,00

Berdasarkan tabel di atas, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp517.433.500,00 merupakan saldo awal sebesar Rp349.204.000,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp199.529.500,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp31.300.000,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp168.229.500,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.2.5 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.5.1 Rincian Alat Laboratorium

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Unit Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.902.000,00	11.902.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.2.6 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.2.6.1 Rincian Komputer

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Komputer Unit	985.207.100,00	841.775.800,00	143.431.300,00	17,03
Peralatan Komputer	122.807.900,00	110.244.500,00	12.563.400,00	11,39
Jumlah	1.108.015.000,00	952.020.300,00	155.994.700,00	16,38

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp155.994.700,00 atau 16,38%.

Mutasi Komputer selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.2.6.2 Mutasi Komputer

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		952.020.300,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Peralatan Jaringan berupa Acces Point Indoor - wifi 6 , Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang, Sub.Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM Prov Bali	12.765.000,00
2	Belanja Modal Personal Komputer berupa Laptop Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	135.198.000,00
3	Belanja Modal Personal Komputer berupa Komputer PC Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	154.645.200,00
4	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer berupa Proyektor Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	7.148.400,00
Jumlah Mutasi Tambah		309.756.600,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Dinas Koperasi UKM Prov.Bali	153.761.900,00
Jumlah Mutasi Kurang		153.761.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		1.108.015.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Komputer per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.108.015.000,00 merupakan saldo awal sebesar Rp952.020.300,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp309.756.600,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp153.761.900,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp155.994.700,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1 Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	8.965.554.653,61	8.697.575.714,00	267.978.939,61	3,08
Jumlah	8.965.554.653,61	8.697.575.714,00	267.978.939,61	3,08

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp267.978.939,61 atau 3,08%.

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.3.2 Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		8.697.575.714,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		267.978.939,61
Jumlah Mutasi Tambah		267.978.939,61
Saldo Akhir 31 Desember 2025		8.965.554.653,61

Berdasarkan tabel di atas, Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.965.554.653,61 merupakan saldo awal sebesar Rp8.697.575.714,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp267.978.939,61 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp267.978.939,61 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.3.1.1 Rincian Bangunan Gedung

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.906.994.653,61	8.639.015.714,00	267.978.939,61	3,10
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.965.554.653,61	8.697.575.714,00	267.978.939,61	3,08

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp267.978.939,61 atau 3,08%.
Mutasi Bangunan Gedung selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.3.1.2 Mutasi Bangunan Gedung

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		8.697.575.714,00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal (SP2D-LS)		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor berupa Jasa Pengawasan Revitalisasi Atap Gedung Kantor pada Dinas Koperasi. UKM Prov. Bali	28.895.724,24
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor berupa Revitalisasi Gedung Kantor pada Dinas Koperasi. UKM Prov. Bali	199.615.167,37
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor berupa Jasa Perencanaan Revitalisasi Atap Gedung Kantor pada Dinas Koperasi. UKM Prov. Bali	39.468.048,00
Jumlah Mutasi Tambah		267.978.939,61
Saldo Akhir 31 Desember 2025		8.965.554.653,61

Berdasarkan tabel di atas, Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.965.554.653,61 merupakan saldo awal sebesar Rp8.697.575.714,00 ditambah mutasi tambah sebesar Rp267.978.939,61 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp267.978.939,61 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1 Rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Air	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00
Instalasi	261.726.041,69	261.726.041,69	0,00	0,00
Jumlah	264.662.691,69	264.662.691,69	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.1 Bangunan Air

Saldo Bangunan Air yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.1.1 Rincian Bangunan Air

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00
Jumlah	2.936.650,00	2.936.650,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Air per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.4.2 Instalasi

Saldo Instalasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.4.2.1 Rincian Instalasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	115.481.041,69	115.481.041,69	0,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00	0,00	0,00
Instalasi Pertahanan	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00
Jumlah	261.726.041,69	261.726.041,69	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Instalasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.5.1.1 Rincian Bahan Perpustakaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan Tercetak	10.973.000,00	10.973.000,00	0,00	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.573.000,00	11.573.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	79.812.260,00	79.812.260,00	0,00	0,00
Jumlah	79.812.260,00	79.812.260,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.6.1.1 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	79.812.260,00	79.812.260,00	0,00	0,00
Jumlah	79.812.260,00	79.812.260,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.7.1 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.188.006.214,00)	(5.275.577.080,00)	87.570.866,00	-1,65
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.709.697.781,00)	(2.532.588.655,00)	(177.109.126,00)	6,99
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(46.855.491,00)	(39.072.166,00)	(7.783.325,00)	19,92

Jumlah	(7.944.559.486,00)	(7.847.237.901,00)	(97.321.585,00)	1,24
--------	--------------------	--------------------	-----------------	------

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp97.321.585,00) atau 1,24%.
Mutasi Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.7.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(7.847.237.901,00)
Mutasi Tambah:		
	Transaksi Non Anggaran (TNA)	394.970.560,00
Jumlah Mutasi Tambah		394.970.560,00
Mutasi Kurang:		
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	297.648.975,00
Jumlah Mutasi Kurang		297.648.975,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(7.944.559.486,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp7.944.559.486,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp7.847.237.901,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp394.970.560,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp297.648.975,00, sehingga secara neto bertambah sebesar Rp97.321.585,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.7.1.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.978.016.620,00)	(1.976.668.048,00)	(1.348.572,00)	0,06
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.310.254.839,00)	(2.362.961.084,00)	52.706.245,00	-2,23
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(234.920.574,00)	(241.115.016,00)	6.194.442,00	-2,56
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	(649.812.181,00)	(679.830.932,00)	30.018.751,00	-4,41
Jumlah	(5.188.006.214,00)	(5.275.577.080,00)	87.570.866,00	-1,65

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp87.570.866,00 atau -1,65%.
Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.7.1.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(5.275.577.080,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Semester Dua Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM	120.644.210,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin SM I Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM Prov Bali	89.433.899,00
Jumlah Mutasi Tambah		210.078.109,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Dinas Koperasi UKM Prov.Bali	297.648.975,00
Jumlah Mutasi Kurang		297.648.975,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(5.188.006.214,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.188.006.214,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp5.275.577.080,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp210.078.109,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp297.648.975,00, sehingga secara neto berkurang sebesar Rp87.570.866,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.7.2.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.709.697.781,00)	(2.532.588.655,00)	(177.109.126,00)	6,99
Jumlah	(2.709.697.781,00)	(2.532.588.655,00)	(177.109.126,00)	6,99

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp177.109.126,00) atau 6,99%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.7.2.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(2.532.588.655,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester Dua Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM	88.648.495,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Semester Satu Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM Prov.Bali	88.460.631,00
Jumlah Mutasi Tambah		177.109.126,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(2.709.697.781,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.709.697.781,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp2.532.588.655,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp177.109.126,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp177.109.126,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.1.2.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2.7.3.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(813.695,00)	(740.279,00)	(73.416,00)	9,91
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(46.041.796,00)	(38.331.887,00)	(7.709.909,00)	20,11
Jumlah	(46.855.491,00)	(39.072.166,00)	(7.783.325,00)	19,92

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.783.325,00) atau 19,92%.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1.2.7.3.2 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2025		(39.072.166,00)
Mutasi Tambah:		
Transaksi Non Anggaran (TNA)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Semester Dua Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM	3.891.662,00
2	Jurnal Penyusutan untuk mencatat jumlah penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Semester Satu pada Dinas Koperasi UKM Prov Bali Tahun 2025	3.891.663,00
Jumlah Mutasi Tambah		7.783.325,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025		(46.855.491,00)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp46.855.491,00) merupakan saldo awal sebesar (Rp39.072.166,00) ditambah mutasi tambah sebesar Rp7.783.325,00 dan dikurangi mutasi kurang sebesar Rp0,00, sehingga secara netto bertambah sebesar Rp7.783.325,00 dibandingkan saldo awal tahun 2024.

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1 Rincian KEWAJIBAN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEWAJIBAN	519.393.974,00	425.097.523,00	94.296.451,00	22,18
Jumlah	519.393.974,00	425.097.523,00	94.296.451,00	22,18

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp94.296.451,00 atau 22,18%.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1 Rincian KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja	519.393.974,00	425.097.523,00	94.296.451,00	22,18
Jumlah	519.393.974,00	425.097.523,00	94.296.451,00	22,18

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp94.296.451,00 atau 22,18%.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1 Rincian Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	499.554.686,00	408.545.840,00	91.008.846,00	22,27
Utang Belanja Barang dan Jasa	19.839.288,00	16.551.683,00	3.287.605,00	19,86
Jumlah	519.393.974,00	425.097.523,00	94.296.451,00	22,18

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp94.296.451,00 atau 22,18%.

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.1.1 Rincian Utang Belanja Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	52.066.442,00	11.133.069,00	40.933.373,00	367,67
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	447.488.244,00	397.412.771,00	50.075.473,00	12,60
Jumlah	499.554.686,00	408.545.840,00	91.008.846,00	22,27

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp91.008.846,00 atau 22,27%, berikut penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta informasi tambahan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.
- Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp40.933.373,00 atau 367,67% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.2.1.1.2.1 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	19.839.288,00	16.551.683,00	3.287.605,00	19,86
Jumlah	19.839.288,00	16.551.683,00	3.287.605,00	19,86

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.287.605,00 atau 19,86%.

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1 Rincian EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69	412.111.617,61	3,65
Jumlah	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69	412.111.617,61	3,65

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp412.111.617,61 atau 3,65%.

5.2.3.1 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1 Rincian EKUITAS

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	(9.491.033.082,31)	(12.425.437.845,06)	2.934.404.762,75	-23,61
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75	(2.522.293.145,14)	-10,64
Jumlah	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69	412.111.617,61	3,65

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp412.111.617,61 atau 3,65%.

5.2.3.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00	459.904.064,69	4,25
Surplus/Defisit-LO	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)	2.474.500.698,06	-10,65
Jumlah	(9.491.033.082,31)	(12.425.437.845,06)	2.934.404.762,75	-23,61

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.934.404.762,75 atau -23,61%.

5.2.3.1.1.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.1.1 Rincian Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00	459.904.064,69	4,25
Jumlah	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00	459.904.064,69	4,25

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp459.904.064,69 atau 4,25%.

5.2.3.1.1.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.1.2.1 Rincian Surplus/Defisit-LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)	2.474.500.698,06	-10,65
Jumlah	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)	2.474.500.698,06	-10,65

Tabel di atas menunjukkan Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp2.474.500.698,06 atau -10,65%.

5.2.3.1.2 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Saldo Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.2.1 Rincian Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
RK PPKD	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75	(2.522.293.145,14)	-10,64
Jumlah	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75	(2.522.293.145,14)	-10,64

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.522.293.145,14) atau -10,64%.

5.2.3.1.2.1 RK PPKD

Saldo RK PPKD yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tabel 5.2.3.1.2.1.1 Rincian RK PPKD

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
RK PPKD	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75	(2.522.293.145,14)	-10,64
Jumlah	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75	(2.522.293.145,14)	-10,64

Tabel di atas menunjukkan RK PPKD per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.522.293.145,14) atau -10,64%.

5.3.1 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1 Rincian BEBAN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	(2.474.500.698,06)	-10,65
Jumlah	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	(2.474.500.698,06)	-10,65

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.474.500.698,06) atau -10,65%.

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1 Rincian BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	12.248.548.182,00	10.709.689.650,00	1.538.858.532,00	14,37
Beban Barang dan Jasa	8.104.978.957,00	12.232.255.086,06	(4.127.276.129,06)	-33,74
Beban Subsidi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	-64,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	394.970.560,00	265.053.661,00	129.916.899,00	49,02
Jumlah	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	(2.474.500.698,06)	-10,65

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.474.500.698,06) atau -10,65%.

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.924.794.425,00	4.453.013.685,00	1.471.780.740,00	33,05
Beban Tambahan Penghasilan	6.323.753.757,00	6.189.175.965,00	134.577.792,00	2,17

ASN				
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	67.500.000,00	(67.500.000,00)	-100,00
Jumlah	12.248.548.182,00	10.709.689.650,00	1.538.858.532,00	14,37

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.538.858.532,00 atau 14,37%.

5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.1 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	3.843.364.024,00	3.240.763.431,00	602.600.593,00	18,59
Beban Tunjangan Keluarga ASN	363.238.952,00	309.166.666,00	54.072.286,00	17,49
Beban Tunjangan Jabatan ASN	203.880.000,00	171.860.000,00	32.020.000,00	18,63
Beban Tunjangan Fungsional ASN	116.629.165,00	137.119.900,00	(20.490.735,00)	-14,94
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	116.240.000,00	85.120.000,00	31.120.000,00	36,56
Beban Tunjangan Beras ASN	200.748.240,00	157.296.240,00	43.452.000,00	27,62
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	741.023.620,00	47.861.619,00	693.162.001,00	1448,26
Beban Pembulatan Gaji ASN	52.971,00	39.131,00	13.840,00	35,37
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	307.196.041,00	277.321.214,00	29.874.827,00	10,77
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.105.405,00	6.616.343,00	1.489.062,00	22,51
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	24.316.007,00	19.849.141,00	4.466.866,00	22,50
Jumlah	5.924.794.425,00	4.453.013.685,00	1.471.780.740,00	33,05

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.471.780.740,00 atau 33,05%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Gaji Pokok ASN pada 2025 sebesar Rp3.843.364.024,00, mengalami kenaikan sebesar Rp602.600.593,00 atau 18,59% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.240.763.431,00.

b. Beban Tunjangan Keluarga ASN pada 2025 sebesar Rp363.238.952,00, mengalami kenaikan sebesar Rp54.072.286,00 atau 17,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp309.166.666,00.

c. Beban Tunjangan Jabatan ASN pada 2025 sebesar Rp203.880.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp32.020.000,00 atau 18,63% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp171.860.000,00.

d. Beban Tunjangan Fungsional ASN pada 2025 sebesar Rp116.629.165,00, mengalami penurunan sebesar Rp20.490.735,00 atau -14,94% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp137.119.900,00.

e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN pada 2025 sebesar Rp116.240.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp31.120.000,00 atau 36,56% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp85.120.000,00.

f. Beban Tunjangan Beras ASN pada 2025 sebesar Rp200.748.240,00, mengalami kenaikan sebesar Rp43.452.000,00 atau 27,62% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp157.296.240,00.

g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN pada 2025 sebesar Rp741.023.620,00, mengalami kenaikan sebesar Rp693.162.001,00 atau 1.448,26% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp47.861.619,00.

h. Beban Pembulatan Gaji ASN pada 2025 sebesar Rp52.971,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.840,00 atau 35,36% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp39.131,00.

i. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada 2025 sebesar Rp307.196.041,00, mengalami kenaikan sebesar Rp29.874.827,00 atau 10,77% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp277.321.214,00.

j. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN pada 2025 sebesar Rp8.105.405,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.489.062,00 atau 22,50% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp6.616.343,00.

k. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN pada 2025 sebesar Rp24.316.007,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.466.866,00 atau 22,50% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp19.849.141,00.

2. Nilai Beban Gaji dan Tunjangan ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp5.924.794.425,00 lebih tinggi sebesar Rp40.933.373,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp5.883.861.052,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Gaji dan Tunjangan ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (3 transaksi) — Net: 52.066.442,00		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja,Prestasi Kerja dan Tunjanga	693.083,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja,Kondisi Kerja,Prestasi Kerj	51.373.359,00
JP-UTANG: Pembayaran Utang (1 transaksi) — Net: (11.133.069,00)		
3	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran Utang Kekurangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 pada Dinas Koperasi UKM Prov Bal	(11.133.069,00)
Jumlah (3 transaksi)		40.933.373,00

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.2.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.795.345.265,00	3.861.281.667,00	(65.936.402,00)	-1,70
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	749.986.264,00	670.434.183,00	79.552.081,00	11,87
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.778.422.228,00	1.657.460.115,00	120.962.113,00	7,30
Jumlah	6.323.753.757,00	6.189.175.965,00	134.577.792,00	2,17

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp134.577.792,00 atau 2,17%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Tambahan Penghasilan ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada 2025 sebesar Rp3.795.345.265,00, mengalami penurunan sebesar Rp65.936.402,00 atau -1,70% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp3.861.281.667,00.
- b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN pada 2025 sebesar Rp749.986.264,00, mengalami kenaikan sebesar Rp79.552.081,00 atau 11,86% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp670.434.183,00.
- c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada 2025 sebesar Rp1.778.422.228,00, mengalami kenaikan sebesar Rp120.962.113,00 atau 7,29% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.657.460.115,00.
2. Nilai Beban Tambahan Penghasilan ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp6.323.753.757,00 lebih tinggi sebesar Rp50.075.473,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp6.273.678.284,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Tambahan Penghasilan ASN

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (5 transaksi) — Net: 447.488.244,00		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja,Prestasi Kerja dan Tunjanga	17.327.067,00
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja,Kondisi Kerja,Prestasi Kerj	430.161.177,00
JP-UTANG: Pembayaran Utang (3 transaksi) — Net: (397.412.771,00)		
3	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat jurnal pembayaran utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja d	(397.412.771,00)
Jumlah (3 transaksi)		50.075.473,00

5.3.1.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.1.3.1 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Honorarium	0,00	45.900.000,00	(45.900.000,00)	-100,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)	-100,00
Jumlah	0,00	67.500.000,00	(67.500.000,00)	-100,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp67.500.000,00) atau -100,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah sebagai berikut:
- a. Beban Honorarium pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp45.900.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp45.900.000,00.

b. Beban Jasa Pengelolaan BMD pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp21.600.000,00 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp21.600.000,00.
2. Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.1 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang	1.616.744.051,00	2.690.114.162,00	(1.073.370.111,00)	-39,90
Beban Jasa	5.206.999.760,00	7.991.604.448,00	(2.784.604.688,00)	-34,84
Beban Pemeliharaan	127.227.250,00	442.163.869,06	(314.936.619,06)	-71,22
Beban Perjalanan Dinas	625.007.896,00	1.096.372.607,00	(471.364.711,00)	-42,99
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	529.000.000,00	12.000.000,00	517.000.000,00	4308,33
Jumlah	8.104.978.957,00	12.232.255.086,06	(4.127.276.129,06)	-33,74

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp4.127.276.129,06) atau -33,74%.

5.3.1.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.1.1 Rincian Beban Barang

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	1.616.744.051,00	2.690.114.162,00	(1.073.370.111,00)	-39,90
Jumlah	1.616.744.051,00	2.690.114.162,00	(1.073.370.111,00)	-39,90

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.073.370.111,00) atau -39,90%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Barang adalah sebagai berikut:
- a. Beban Barang Pakai Habis pada 2025 sebesar Rp1.616.744.051,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.073.370.111,00 atau -39,90% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.690.114.162,00.

b. Nilai Beban Barang pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp1.616.744.051,00 lebih rendah sebesar Rp4.105.700,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp1.620.849.751,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.2.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Barang

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-PERSED: Penyesuaian Persediaan (14 transaksi) — Net: (469.031.175,00)		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat persediaan Barang Pakai Habis Semester II Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi	(84.883.100,00)
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat persediaan Barang Pakai Habis Semester Satu	(384.148.075,00)

Tahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM Provins		
JP-PERSED: Pembalik Persediaan (10 transaksi) — Net: 464.925.475,00		
3	Jurnal Pembalik Persediaan untuk membebaskan persediaan Semester SatuTahun 2025 pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali.	384.148.075,00
4	Jurnal Pembalik Persediaan untuk membebaskan persediaan awal Tahun 2025 (sisa persediaan bulan Desember 2024) pada Din	80.777.400,00
Jumlah (4 transaksi)		(4.105.700,00)

5.3.1.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.2.1 Rincian Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	4.740.837.639,00	6.468.526.318,00	(1.727.688.679,00)	-26,70
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	278.156.450,00	246.578.130,00	31.578.320,00	12,81
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	32.755.671,00	60.000.000,00	(27.244.329,00)	-45,40
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	155.250.000,00	1.216.500.000,00	(1.061.250.000,00)	-87,23
Jumlah	5.206.999.760,00	7.991.604.448,00	(2.784.604.688,00)	-34,84

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.784.604.688,00) atau -34,84%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Jasa adalah sebagai berikut:
- a. Beban Jasa Kantor pada 2025 sebesar Rp4.740.837.639,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.727.688.679,00 atau -26,70% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp6.468.526.318,00.

b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi pada 2025 sebesar Rp278.156.450,00, mengalami kenaikan sebesar Rp31.578.320,00 atau 12,80% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp246.578.130,00.

c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin pada 2025 sebesar Rp32.755.671,00, mengalami penurunan sebesar Rp27.244.329,00 atau -45,40% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp60.000.000,00.

d. Beban Sewa Gedung dan Bangunan pada 2025 sebesar Rp155.250.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.061.250.000,00 atau -87,23% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.216.500.000,00.
2. Nilai Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp5.206.999.760,00 lebih tinggi sebesar Rp3.287.605,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp5.203.712.155,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.2.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Jasa

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
JP-UTANG: Pengakuan Utang (3 transaksi) — Net: 19.839.288,00		
1	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat utang Tagihan listrik, telepon dan air bulan Desember 2025 pada Dinas Koperasi UKM	19.839.288,00
JP-UTANG: Pembayaran Utang (3 transaksi) — Net: (16.551.683,00)		
2	Jurnal Penyesuaian untuk mencatat pembayaran utang Listrik,Telpon dan Air yang digunakan bulan Desember 2024 dan dibayar	(16.551.683,00)
Jumlah (2 transaksi)		3.287.605,00

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.3.1 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.227.250,00	191.981.000,00	(64.753.750,00)	-33,72
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	250.182.869,06	(250.182.869,06)	-100,00
Jumlah	127.227.250,00	442.163.869,06	(314.936.619,06)	-71,22

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp314.936.619,06) atau -71,22%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- a. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada 2025 sebesar Rp127.227.250,00, mengalami penurunan sebesar Rp64.753.750,00 atau -33,72% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp191.981.000,00.
- b. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp250.182.869,06 atau -100,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp250.182.869,06.
- 2. Nilai Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp127.227.250,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp127.227.250,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.4.1 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625.007.896,00	1.096.372.607,00	(471.364.711,00)	-42,99
Jumlah	625.007.896,00	1.096.372.607,00	(471.364.711,00)	-42,99

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp471.364.711,00) atau -42,99%.

- 1. Penjelasan Tren penurunan Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada 2025 sebesar Rp625.007.896,00, mengalami penurunan sebesar Rp471.364.711,00 atau -42,99% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp1.096.372.607,00.
- 2. Nilai Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp625.007.896,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp625.007.896,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.2.5.1 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	515.000.000,00	0,00	515.000.000,00	100,00
Jumlah	529.000.000,00	12.000.000,00	517.000.000,00	4308,33

Tabel di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp517.000.000,00 atau 4.308,33%.

- 1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada 2025 sebesar Rp14.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000,00 atau 16,66% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp12.000.000,00.
 - b. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada 2025 sebesar Rp515.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp515.000.000,00 dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp0,00.
- 2. Nilai Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp529.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp529.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.3 Beban Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.3.1 Rincian Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	-64,00
Jumlah	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	-64,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp16.000.000,00) atau -64,00%.

5.3.1.1.3.1 Beban Subsidi kepada Koperasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Subsidi kepada Koperasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi kepada Koperasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.3.1.1 Rincian Beban Subsidi kepada Koperasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	-64,00
Jumlah	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	-64,00

Tabel di atas menunjukkan Beban Subsidi kepada Koperasi per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp16.000.000,00) atau -64,00%.

1. Penjelasan Tren penurunan Beban Subsidi kepada Koperasi adalah sebagai berikut:
- a. Beban Subsidi kepada Koperasi pada 2025 sebesar Rp9.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp16.000.000,00 atau -64,00% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp25.000.000,00.
2. Nilai Beban Subsidi kepada Koperasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp9.000.000,00 sama dengan realisasi LRA sebesar Rp9.000.000,00, sehingga tidak terdapat selisih LO dan LRA.

5.3.1.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.4.1 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	210.078.109,00	83.877.661,00	126.200.448,00	150,46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	177.109.126,00	176.921.262,00	187.864,00	0,11
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.783.325,00	4.254.738,00	3.528.587,00	82,93
Jumlah	394.970.560,00	265.053.661,00	129.916.899,00	49,02

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp129.916.899,00 atau 49,02%.

5.3.1.1.4.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.4.1.1 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.948.572,00	7.523.691,00	(3.575.119,00)	-47,51
Beban Penyusutan Alat Kantor	57.280.830,00	29.758.727,00	27.522.103,00	92,48

dan Rumah Tangga				
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.105.558,00	2.192.016,00	22.913.542,00	1045,31
Beban Penyusutan Komputer	123.743.149,00	44.403.227,00	79.339.922,00	178,68
Jumlah	210.078.109,00	83.877.661,00	126.200.448,00	150,46

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp126.200.448,00 atau 150,46%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Alat Angkutan pada 2025 sebesar Rp3.948.572,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.575.119,00 atau -47,51% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp7.523.691,00.
 - b. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada 2025 sebesar Rp57.280.830,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.522.103,00 atau 92,48% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp29.758.727,00.
 - c. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada 2025 sebesar Rp25.105.558,00, mengalami kenaikan sebesar Rp22.913.542,00 atau 1.045,31% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp2.192.016,00.
 - d. Beban Penyusutan Komputer pada 2025 sebesar Rp123.743.149,00, mengalami kenaikan sebesar Rp79.339.922,00 atau 178,68% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp44.403.227,00.
2. Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp210.078.109,00 lebih tinggi sebesar Rp177.322.438,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp32.755.671,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.4.1.2 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Transaksi Non-JP (tidak berpasangan LO-LRA) (7 transaksi) — Net: 177.322.438,00		
1	Lihat Buku Jurnal	177.322.438,00
Jumlah (1 transaksi)		177.322.438,00

5.3.1.1.4.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.4.2.1 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	177.109.126,00	176.921.262,00	187.864,00	0,11
Jumlah	177.109.126,00	176.921.262,00	187.864,00	0,11

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp187.864,00 atau 0,11%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Beban Penyusutan Bangunan Gedung pada 2025 sebesar Rp177.109.126,00, mengalami kenaikan sebesar Rp187.864,00 atau 0,10% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp176.921.262,00.
2. Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp177.109.126,00 lebih tinggi sebesar Rp21.859.126,00 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp155.250.000,00. Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.4.2.2 Penjelasan Selisih atas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
Transaksi Non-JP (tidak berpasangan LO-LRA) (6 transaksi) — Net: 21.859.126,00		
1	Lihat Buku Jurnal	21.859.126,00
Jumlah (1 transaksi)		21.859.126,00

5.3.1.1.4.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.3.1.1.4.3.1 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Air	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi	7.709.909,00	4.181.322,00	3.528.587,00	84,39
Jumlah	7.783.325,00	4.254.738,00	3.528.587,00	82,93

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp3.528.587,00 atau 82,93%.

1. Penjelasan Tren kenaikan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:
- a. Beban Penyusutan Bangunan Air pada 2025 sebesar Rp73.416,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp73.416,00.

b. Beban Penyusutan Instalasi pada 2025 sebesar Rp7.709.909,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.528.587,00 atau 84,38% dibandingkan saldo 2024 sebesar Rp4.181.322,00.
2. Nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2025 sebesar Rp7.783.325,00 tidak memiliki padanan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selisih LO dan LRA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2025 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	11.266.464.617	10.806.560.552
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-20.757.497.699	-23.231.998.397
RK PPKD	21.169.609.317	23.691.902.462
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
LAIN-LAIN	-	-
EKUITAS AKHIR	11.678.576.234	11.266.464.617

BAB VI
PENGUNGKAPAN LAINNYA

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga memiliki Aset Tetap dengan nilai di bawah batas kapitalisasi (ekstrakompatabel) yaitu:

1. Inventaris Ekstrakompatabel untuk Peralatan dan Mesin sebanyak 236 unit dengan nilai Rp 51.559.213,00 .Rincian terlampir
2. Sampai dengan tanggal pelaporan, tidak terdapat kondisi atau kejadian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang menimbulkan kewajiban kontinjensi.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Unaudited Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Catatan ini disusun untuk menyediakan informasi tambahan yang komprehensif atas pos-pos laporan keuangan, guna memberikan penjelasan yang memadai, meningkatkan pemahaman pengguna laporan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini telah mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan akan diaudit oleh pihak eksternal yang independen, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, untuk memastikan keandalan dan kewajaran penyajian informasi keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan realisasi anggaran, posisi keuangan, serta pengelolaan aset dan kewajiban pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali selaku entitas akuntansi pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini telah disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi untuk memberikan gambaran yang akurat dan lengkap atas kinerja keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui penyempurnaan system akuntansi, penguatan pengendalian internal, dan implementasi rekomendasi hasil audited, guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN I



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
02 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92	23.791.258.861,75
5.1	BELANJA OPERASI	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	91,83	23.137.155.320,06
5.1.01	Belanja Pegawai	13.114.269.179,00	12.157.530.336,00	92,70	10.801.409.908,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.103.225.083,00	5.883.861.052,00	96,41	4.455.475.657,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.921.953.210,00	3.841.354.024,00	98,00	3.240.763.411,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.056.056.736,00	2.987.477.550,00	97,44	3.212.135.331,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	855.886.474,00	855.886.474,00	100,00	28.628.100,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	370.406.952,00	363.238.952,00	98,06	309.166.666,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	280.596.650,00	275.030.450,00	98,02	305.158.732,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	89.810.302,00	88.208.502,00	98,22	4.007.934,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.638.750,00	203.880.000,00	97,25	171.860.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	209.638.750,00	203.880.000,00	97,25	171.860.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.629.165,00	116.629.165,00	100,00	137.119.900,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	94.780.000,00	94.780.000,00	100,00	132.409.900,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.849.165,00	21.849.165,00	100,00	4.710.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.295.000,00	116.240.000,00	99,10	85.120.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.700.000,00	73.645.000,00	98,59	85.120.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	42.595.000,00	42.595.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	207.776.000,00	200.748.240,00	96,60	157.296.240,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	142.015.620,00	140.349.960,00	98,83	154.889.120,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	65.760.380,00	60.398.280,00	91,84	2.607.120,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	767.497.060,00	700.993.478,00	91,34	47.861.619,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	762.179.603,00	696.676.017,00	91,41	47.861.619,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.317.457,00	4.317.457,00	81,19	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.626,00	52.971,00	79,50	39.131,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.587,00	33.612,00	77,11	38.456,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23.039,00	19.359,00	84,03	635,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	349.477.475,00	306.292.814,00	87,64	279.783.186,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	301.813.564,00	261.361.892,00	86,60	278.289.345,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	47.663.911,00	44.930.922,00	94,27	1.493.841,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.291.699,00	8.105.805,00	87,21	6.616.343,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.961.806,00	6.095.087,00	67,95	6.547.634,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.330.093,00	2.010.318,00	86,28	68.709,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.887.028,00	24.316.007,00	87,19	19.849.141,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.884.825,00	18.785.301,00	87,55	19.643.020,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.002.203,00	6.030.706,00	86,13	206.121,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Persu	10.306.418,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Persu	6.810.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Persu	3.495.668,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.011.543.796,00	6.273.978.284,00	89,48	6.278.434.251,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bebas Ker	4.236.952.225,00	3.779.033.169,00	89,19	3.916.705.838,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bebas Ker	4.108.083.131,00	3.669.534.670,00	89,32	3.916.705.838,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bebas Ker	128.869.094,00	109.478.699,00	84,95	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Ke	815.663.640,00	737.545.859,00	90,47	680.126.346,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Ke	815.663.640,00	737.545.859,00	90,47	680.126.346,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Ke	1.958.927.931,00	1.757.119.056,00	89,70	1.681.602.067,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Ke	1.904.268.482,00	1.710.680.805,00	89,81	1.681.602.067,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Ke	54.663.449,00	46.438.451,00	84,95	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimban	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Peng	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Meng	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.951.116.204,00	8.105.797.052,00	90,56	12.310.745.412,06
5.1.02.01	Belanja Barang	1.755.970.244,00	1.620.849.751,00	92,31	2.768.637.762,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.755.970.244,00	1.620.849.751,00	92,31	2.768.637.762,00

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	390.225.000,00	379.279.500,00	97,20	400.294.100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	210.000.000,00	198.390.420,00	94,47	948.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	39.854.600,00	34.686.523,00	87,03	42.853.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kert	53.332.100,00	45.540.000,00	85,39	39.519.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bah	52.903.300,00	36.049.278,00	68,14	23.088.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bena	7.347.600,00	4.680.000,00	63,69	7.940.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahu	77.919.000,00	57.780.000,00	74,15	55.606.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pera	7.830.900,00	7.117.875,00	90,89	11.547.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat	11.697.400,00	10.517.250,00	89,91	10.334.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suva	3.000.000,00	2.775.000,00	92,50	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	360.450.344,00	348.411.105,00	96,66	1.275.343.662,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.670.000,00	84.705.000,00	70,78	107.100.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.490.000,00	3.675.000,00	66,03	5.445.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas P	416.250.000,00	407.292.800,00	97,85	768.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakan Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.751.373.960,00	5.204.712.155,00	90,48	7.991.571.174,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.219.709.576,00	4.717.550.034,00	90,76	6.468.493.044,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengeloaan BMD yang Tidak Meng	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mod	901.200.000,00	743.500.000,00	82,50	1.355.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.560.000.000,00	1.432.800.000,00	91,85	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendid	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00	161.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	878.095.543,00	819.105.860,00	93,28	1.409.444.592,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	268.752.392,00	268.752.392,00	100,00	206.820.320,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	2.108.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	221.752.392,00	212.762.709,00	95,95	208.584.384,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	369.587.320,00	369.587.320,00	100,00	278.112.512,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	274.693.929,00	274.693.929,00	100,00	278.112.512,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Lari Perlombaan/Pertandingan	6.600.000,00	5.600.000,00	84,85	5.790.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	175.000.000,00	174.170.000,00	99,53	169.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.000.000,00	3.840.000,00	32,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotret	146.300.000,00	145.965.000,00	99,77	75.400.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.000.000,00	13.567.896,00	67,84	13.500.344,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	56.500.000,00	16.821.400,00	29,77	22.121.850,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	218.000.000,00	162.705.728,00	74,64	167.591.830,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.028.000,00	7.588.000,00	94,52	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.200.000,00	11.589.800,00	71,54	9.304.700,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Peng	41.400.000,00	40.900.000,00	98,79	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	304.936.984,00	278.156.450,00	91,22	246.578.130,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	160.420.800,00	146.040.975,00	91,04	180.337.130,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi No	8.260.576,00	7.478.360,00	90,53	8.277.930,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.217.840,00	9.347.950,00	91,49	10.347.210,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	126.017.768,00	115.289.165,00	91,49	127.615.860,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	71.497.400,00	32.755.671,00	45,81	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.316.000,00	2.858.000,00	50,00	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0113	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	66.181.400,00	10.197.671,00	15,41	15.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	155.250.000,00	155.250.000,00	100,00	1.216.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertes	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	19.400.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Perind	0,00	0,00	0,00	1.197.100.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	153.000.000,00	153.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	220.790.000,00	127.227.250,00	57,62	442.163.869,06
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	220.790.000,00	127.227.250,00	57,62	191.981.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	166.000.000,00	89.382.000,00	53,84	149.211.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	2.800.000,00	2.355.000,00	84,11	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah K	26.840.000,00	19.495.750,00	72,63	22.940.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unt	18.250.000,00	10.391.000,00	56,94	12.185.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kom	0,00	0,00	0,00	7.645.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kom	6.900.000,00	5.605.500,00	81,24	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	250.182.869,06
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bang	0,00	0,00	0,00	250.182.869,06
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	693.982.000,00	625.007.896,00	90,06	1.096.172.607,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	693.982.000,00	625.007.896,00	90,06	1.096.372.607,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	426.982.000,00	358.007.896,00	83,85	273.872.607,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.000.000,00	177.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	802.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan ke	529.000.000,00	529.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Keta	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	515.000.000,00	515.000.000,00	100,00	0,00

5.1.02.05.02.0001	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	515.000.000,00	515.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.074.885.383,00	20.272.336.388,00	91,83	23.137.155.320,06
5.2	BELANJA MODAL	955.055.300,00	897.272.928,61	93,95	654.103.541,69
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	883.055.300,00	829.293.989,00	92,13	468.817.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	27.640.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	27.640.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	27.640.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	126.592.400,00	120.007.889,00	94,80	152.791.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.968.500,00	4.750.000,00	95,60	59.275.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.968.500,00	4.750.000,00	95,60	59.275.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	112.000.100,00	107.007.889,00	95,53	93.516.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	82.005.800,00	80.501.640,00	98,16	32.416.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Hortikultura)	29.995.300,00	26.506.249,00	88,36	22.900.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.614.800,00	8.250.000,00	85,81	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.614.800,00	8.250.000,00	85,81	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Perfilman	205.608.100,00	199.529.500,00	97,04	102.421.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	205.608.100,00	199.529.500,00	97,04	102.421.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	55.951.000,00	52.248.000,00	93,38	49.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	71.618.500,00	69.803.500,00	97,47	52.631.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	78.038.600,00	77.478.000,00	99,28	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	350.854.800,00	309.756.600,00	88,29	185.965.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	320.214.800,00	289.843.200,00	90,52	157.377.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	320.214.800,00	289.843.200,00	90,52	157.327.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.640.000,00	19.913.400,00	64,99	28.638.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.640.000,00	7.148.400,00	82,74	18.138.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	22.000.000,00	12.765.000,00	58,02	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	272.000.000,00	267.978.939,61	98,52	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	185.286.041,69
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	115.481.041,69
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	115.481.041,69
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lain	0,00	0,00	0,00	69.805.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	69.805.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	69.805.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	955.055.300,00	897.272.928,61	93,95	654.103.541,69
	JUMLAH BELANJA	23.029.940.683,00	21.169.609.316,61	91,92	23.791.258.861,75
	SURPLUS/DEFISIT	(23.029.940.683,00)	(21.169.609.316,61)	91,92	(23.791.258.861,75)

Provinsi Bali, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Tri Arya Dhyana Kubentubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

2 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69
1.1	ASET LANCAR	84.883.100,00	80.777.400,00
1.1.12	Persediaan	84.883.100,00	80.777.400,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	84.883.100,00	80.777.400,00
1.1.12.01.01	Bahan	82.827.100,00	80.777.400,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	82.827.100,00	80.777.400,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.056.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	20.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	406.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	130.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	1.500.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	84.883.100,00	80.777.400,00
1.3	ASET TETAP	12.113.087.108,30	11.610.784.739,69
1.3.01	Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.01.01	Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.182.228.989,00	5.850.583.975,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.001.379.000,00	2.003.979.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.001.379.000,00	2.003.979.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.099.020.000,00	1.099.020.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	703.450.000,00	703.450.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	198.909.000,00	201.509.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.540.399.489,00	2.530.378.675,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	501.876.000,00	509.321.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	4.000.000,00	7.250.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	329.096.000,00	338.041.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	168.780.000,00	164.030.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.867.641.689,00	1.856.045.800,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	798.141.750,00	810.333.750,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	43.795.000,00	46.270.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	538.588.140,00	463.886.500,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.380.000,00	1.380.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	469.246.799,00	517.685.550,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	16.490.000,00	16.490.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	170.881.800,00	165.011.875,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	34.715.750,00	34.715.750,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	43.029.150,00	37.159.225,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	30.292.900,00	30.292.900,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	62.844.000,00	62.844.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	517.433.500,00	349.204.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	431.298.500,00	263.069.000,00

1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	150.666.000,00	98.418.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	203.154.500,00	164.651.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	77.478.000,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	86.135.000,00	86.135.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	78.160.000,00	78.160.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	7.975.000,00	7.975.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	11.902.000,00	11.902.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.108.015.000,00	952.020.300,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	985.207.100,00	841.775.800,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	69.805.000,00	69.805.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	915.402.100,00	771.970.800,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	122.807.900,00	110.244.500,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	107.042.900,00	107.244.500,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	15.765.000,00	3.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.965.554.653,61	8.697.575.714,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8.965.554.653,61	8.697.575.714,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.906.994.653,61	8.639.015.714,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	6.880.112.239,61	6.612.133.300,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.031.250.000,00	1.031.250.000,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	949.040.260,00	949.040.260,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.592.154,00	46.592.154,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.560.000,00	58.560.000,00
1.3.03.01.02.0005	Asrama	58.560.000,00	58.560.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.662.691,69	264.662.691,69
1.3.04.02	Bangunan Air	2.936.650,00	2.936.650,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00
1.3.04.03	Instalasi	261.726.041,69	261.726.041,69
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	115.481.041,69	115.481.041,69
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	115.481.041,69	115.481.041,69
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	24.530.000,00	24.530.000,00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	24.530.000,00	24.530.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	11.573.000,00	11.573.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	11.573.000,00	11.573.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	10.973.000,00	10.973.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	9.393.000,00	9.393.000,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	1.580.000,00	1.580.000,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.812.260,00	79.812.260,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung	79.812.260,00	79.812.260,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangun	79.812.260,00	79.812.260,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangun	79.812.260,00	79.812.260,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.944.559.486,00)	(7.847.237.901,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	-5.188.006.214,00	-5.275.577.080,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.978.016.620,00)	(1.976.668.048,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.099.020.000,00)	(1.099.020.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(703.450.000,00)	(703.450.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(175.546.620,00)	(174.198.048,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel d	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor da	(2.310.254.839,00)	(2.362.961.084,00)

1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-M	(4.000.000,00)	(7.250.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Al	(329.096.000,00)	(338.041.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Al	(117.702.704,00)	(100.022.084,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Ta	(773.662.585,00)	(776.102.835,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Ta	(41.083.333,00)	(42.238.333,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Ta	(436.672.101,00)	(424.276.941,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Ta	(1.380.000,00)	(1.380.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Ta	(432.155.483,00)	(498.982.183,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Ta	(16.490.000,00)	(16.490.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kurs	(34.715.750,00)	(34.715.750,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kurs	(30.159.983,00)	(30.325.058,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kurs	(30.292.900,00)	(30.292.900,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kurs	(62.844.000,00)	(62.844.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Ko	(234.920.574,00)	(241.115.016,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Pe	(53.533.000,00)	(42.073.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Pe	(94.755.849,00)	(112.907.016,00)
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Ala	(496.725,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunika	(78.160.000,00)	(78.160.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunika	(7.975.000,00)	(7.975.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laborator	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Labo	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(649.812.181,00)	(679.830.932,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	(18.905.521,00)	(1.454.271,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	(545.459.347,00)	(594.429.506,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kom	(84.368.875,00)	(83.884.655,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kom	(1.078.438,00)	(62.500,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan B	(2.709.697.781,00)	(2.532.588.655,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Ged	(2.709.697.781,00)	(2.532.588.655,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Temp	(1.781.134.270,00)	(1.646.400.248,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Temp	(413.206.185,00)	(392.547.339,00)
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Temp	(486.930.755,00)	(467.317.541,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Ged	(1.863.688,00)	(931.844,00)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Temp	(698.883,00)	(698.883,00)
1.3.07.02.01.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Ged	(25.864.000,00)	(24.692.800,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan	(46.855.491,00)	(39.072.166,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(813.695,00)	(740.279,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air f	(813.695,00)	(740.279,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(46.041.796,00)	(38.331.887,00)
1.3.07.03.03.0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Be	(4.170.149,00)	(320.781,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu	(32.741.042,00)	(29.698.167,00)
1.3.07.03.03.0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Perta	(9.130.605,00)	(8.312.939,00)
	JUMLAH ASET TETAP	12.113.087.108,30	11.610.784.739,69
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69
2	KEWAJIBAN	519.393.974,00	425.097.523,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	519.393.974,00	425.097.523,00
2.1.06	Utang Belanja	519.393.974,00	425.097.523,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	499.554.686,00	408.545.840,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASH	52.066.442,00	11.133.069,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	40.030.146,00	0,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehata	11.343.213,00	11.133.069,00

2.1.06.01.01.0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	693.083,00	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	447.488.244,00	397.412.771,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	254.463.749,00	250.298.217,00
2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	12.166.364,00	0,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	54.112.120,00	41.671.715,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	121.585.308,00	105.442.839,00
2.1.06.01.02.0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	5.160.703,00	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	19.839.288,00	16.551.683,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	19.839.288,00	16.551.683,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Te	1.130.658,00	1.130.658,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.354.600,00	1.318.000,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Lis	17.354.030,00	14.103.025,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	519.393.974,00	425.097.523,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	519.393.974,00	425.097.523,00
3	EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69
3.1	EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69
3.1.01	Ekuitas	(9.491.033.082,31)	(12.425.437.845,06)
3.1.01.01	Ekuitas	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	11.266.464.616,69	10.806.560.552,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(20.757.497.699,00)	(23.231.998.397,06)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75
3.1.03.01	RK PPKD	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75
3.1.03.01.01	RK PPKD	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	21.169.609.316,61	23.691.902.461,75
	JUMLAH EKUITAS	11.678.576.234,30	11.266.464.616,69
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.197.970.208,30	11.691.562.139,69

Provinsi Bali, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
2 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	(2.474.500.698,06)	(10,65)
8.1	BEBAN OPERASI	20.362.527.139,00	22.966.944.736,06	(2.604.417.597,06)	(11,34)
8.1.01	Beban Pegawai	12.248.548.182,00	10.709.689.650,00	1.538.858.532,00	14,37
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.924.794.425,00	4.453.013.685,00	1.471.780.740,00	33,05
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.843.364.024,00	3.240.763.431,00	602.600.593,00	18,59
8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PNS	2.987.477.550,00	3.212.135.331,00	(224.657.781,00)	(6,99)
8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PPPK	855.886.474,00	28.628.100,00	827.258.374,00	2.889,67
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	363.238.952,00	309.166.666,00	54.072.286,00	17,49
8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PNS	275.030.450,00	305.158.732,00	(30.128.282,00)	(9,87)
8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	88.208.502,00	4.007.934,00	84.200.568,00	2.100,85
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	203.880.000,00	171.860.000,00	32.020.000,00	18,63
8.1.01.01.03.000	Beban Tunjangan Jabatan PNS	203.880.000,00	171.860.000,00	32.020.000,00	18,63
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional AS	116.629.165,00	137.119.900,00	(20.490.735,00)	(14,94)
8.1.01.01.04.000	Beban Tunjangan Fungsional PN	94.780.000,00	132.409.900,00	(37.629.900,00)	(28,42)
8.1.01.01.04.000	Beban Tunjangan Fungsional PP	21.849.165,00	4.710.000,00	17.139.165,00	363,89
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Ur	116.240.000,00	85.120.000,00	31.120.000,00	36,56
8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Ur	73.645.000,00	85.120.000,00	(11.475.000,00)	(13,48)
8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Ur	42.595.000,00	0,00	42.595.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	200.748.240,00	157.296.240,00	43.452.000,00	27,62
8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PNS	140.349.960,00	154.689.120,00	(14.339.160,00)	(9,27)
8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PPPK	60.398.280,00	2.607.120,00	57.791.160,00	2.216,67
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan	741.023.620,00	47.861.619,00	693.162.001,00	1.448,26
8.1.01.01.07.000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan	736.706.163,00	47.861.619,00	688.844.544,00	1.439,24
8.1.01.01.07.000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan	4.317.457,00	0,00	4.317.457,00	100,00
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	52.971,00	39.131,00	13.840,00	35,37
8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PNS	33.612,00	38.456,00	(4.844,00)	(12,60)
8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.359,00	675,00	18.684,00	2.768,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	307.196.041,00	277.321.214,00	29.874.827,00	10,77
8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	261.572.036,00	275.827.373,00	(14.255.337,00)	(5,17)
8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	45.624.005,00	1.493.841,00	44.130.164,00	2.954,14
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan	8.105.405,00	6.616.343,00	1.489.062,00	22,51
8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan	6.095.087,00	6.547.634,00	(452.547,00)	(6,91)
8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan	2.010.318,00	68.709,00	1.941.609,00	2.825,84
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian	24.316.007,00	19.849.141,00	4.466.866,00	22,50
8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian	18.285.301,00	19.643.020,00	(1.357.719,00)	(6,91)
8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian	6.030.706,00	206.121,00	5.824.585,00	2.825,81
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan A	6.323.753.757,00	6.189.175.965,00	134.577.792,00	2,17
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan b	3.795.345.265,00	3.861.281.667,00	(65.936.402,00)	(1,71)
8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan b	3.673.700.202,00	3.861.281.667,00	(187.581.465,00)	(4,86)
8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan b	121.645.063,00	0,00	121.645.063,00	100,00
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan b	749.986.264,00	670.434.183,00	79.552.081,00	11,87
8.1.01.02.03.000	Beban Tambahan Penghasilan b	749.986.264,00	670.434.183,00	79.552.081,00	11,87
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan b	1.778.422.228,00	1.657.460.115,00	120.962.113,00	7,30
8.1.01.02.05.000	Beban Tambahan Penghasilan b	1.726.823.074,00	1.657.460.115,00	69.362.959,00	4,18
8.1.01.02.05.000	Beban Tambahan Penghasilan b	51.599.154,00	0,00	51.599.154,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan b	0,00	67.500.000,00	(67.500.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	45.900.000,00	(45.900.000,00)	(100,00)

8.1.01.03.07.000	Beban Honorarium Penanggung	0,00	45.900.000,00	(45.900.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.000	Beban Jasa Pengelolaan BMD ya	0,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.104.978.957,00	12.232.255.086,06	(4.127.276.129,06)	(33,74)
8.1.02.01	Beban Barang	1.616.744.051,00	2.690.114.162,00	(1.073.370.111,00)	(39,90)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.616.744.051,00	2.690.114.162,00	(1.073.370.111,00)	(39,90)
8.1.02.01.01.000	Beban Bahan-Bahan Bakar dan	377.229.800,00	320.220.700,00	57.009.100,00	17,80
8.1.02.01.01.001	Beban Bahan-Bahan Lainnya	198.390.420,00	948.000,00	197.442.420,00	20.827,26
8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	34.666.523,00	42.853.000,00	(8.186.477,00)	(19,10)
8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	45.134.000,00	39.658.800,00	5.475.200,00	13,81
8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	36.049.278,00	23.088.000,00	12.961.278,00	56,14
8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	4.550.000,00	8.000.000,00	(3.450.000,00)	(43,13)
8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	56.280.000,00	56.956.000,00	(676.000,00)	(1,19)
8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	7.117.875,00	11.647.000,00	(4.529.125,00)	(38,89)
8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	10.517.250,00	10.334.000,00	183.250,00	1,77
8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	100,00
8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiat	348.411.105,00	1.275.343.662,00	(926.932.557,00)	(72,68)
8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman	84.705.000,00	107.100.000,00	(22.395.000,00)	(20,91)
8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman	3.625.000,00	5.445.000,00	(1.820.000,00)	(33,43)
8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman	407.292.800,00	768.600.000,00	(361.307.200,00)	(47,01)
8.1.02.01.01.006	Beban Pakaian Dinas Lapangan	0,00	19.920.000,00	(19.920.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	5.206.999.760,00	7.991.604.448,00	(2.784.604.688,00)	(34,84)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	4.740.837.639,00	6.468.526.318,00	(1.727.688.679,00)	(26,71)
8.1.02.02.01.000	Beban Jasa Pengelolaan BMD ya	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.000	Beban Honorarium Narasumber	743.500.000,00	1.355.800.000,00	(612.300.000,00)	(45,16)
8.1.02.02.01.000	Beban Honorarium Penyuluhan	1.432.800.000,00	0,00	1.432.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.001	Beban Honorarium Penyelengga	12.000.000,00	161.000.000,00	(149.000.000,00)	(92,55)
8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Administrasi	819.105.860,00	1.409.444.592,00	(590.338.732,00)	(41,88)
8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Pelayanan U	268.752.392,00	206.820.320,00	61.932.072,00	29,94
8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	2.108.000.000,00	(2.108.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.003	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	212.762.709,00	208.584.384,00	4.178.325,00	2,00
8.1.02.02.01.003	Beban Jasa Tenaga Keamanan	369.587.320,00	278.112.512,00	91.474.808,00	32,89
8.1.02.02.01.003	Beban Jasa Tenaga Supir	274.693.929,00	278.112.512,00	(3.418.583,00)	(1,23)
8.1.02.02.01.003	Beban Jasa Juri Perimbangan/Pe	5.600.000,00	5.700.000,00	(100.000,00)	(1,75)
8.1.02.02.01.004	Beban Jasa Penyelenggaraan Ac	174.170.000,00	169.000.000,00	5.170.000,00	3,06
8.1.02.02.01.005	Beban Jasa Pengolahan Sampah	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00
8.1.02.02.01.005	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film	145.965.000,00	75.400.000,00	70.565.000,00	93,59
8.1.02.02.01.005	Beban Tagihan Telepon	14.922.496,00	13.508.392,00	1.414.104,00	10,47
8.1.02.02.01.006	Beban Tagihan Air	15.503.400,00	21.426.100,00	(5.922.700,00)	(27,64)
8.1.02.02.01.006	Beban Tagihan Listrik	165.956.733,00	168.312.806,00	(2.356.073,00)	(1,40)
8.1.02.02.01.006	Beban Langganan Jurnal/Surat K	7.588.000,00	0,00	7.588.000,00	100,00
8.1.02.02.01.006	Beban Pembayaran Pajak, Bea,	11.589.800,00	9.304.700,00	2.285.100,00	24,56
8.1.02.02.01.008	Beban Honorarium Penanggung	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	278.156.450,00	246.578.130,00	31.578.320,00	12,81
8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	146.040.975,00	100.337.130,00	45.703.845,00	45,55
8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan	7.478.360,00	8.277.930,00	(799.570,00)	(9,66)
8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kematian	9.347.950,00	10.347.210,00	(999.260,00)	(9,66)
8.1.02.02.02.001	Beban Iuran Jaminan Hari Tua b	115.289.165,00	127.615.860,00	(12.326.695,00)	(9,66)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mes	32.755.671,00	60.000.000,00	(27.244.329,00)	(45,41)
8.1.02.02.04.003	Beban Sewa Kendaraan Bermot	2.658.000,00	45.000.000,00	(42.342.000,00)	(94,09)
8.1.02.02.04.011	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	30.097.671,00	15.000.000,00	15.097.671,00	100,65
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangu	155.250.000,00	1.216.500.000,00	(1.061.250.000,00)	(87,24)
8.1.02.02.05.000	Beban Sewa Bangunan Gedung	2.250.000,00	19.400.000,00	(17.150.000,00)	(88,40)
8.1.02.02.05.001	Beban Sewa Bangunan Gedung	0,00	1.197.100.000,00	(1.197.100.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.004	Beban Sewa Hotel	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	127.227.250,00	447.163.869,06	(319.936.619,06)	(71,23)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan	127.227.250,00	191.981.000,00	(64.753.750,00)	(33,73)
8.1.02.03.02.003	Beban Pemeliharaan Alat Angku	89.382.000,00	149.211.000,00	(59.829.000,00)	(40,10)

8.1.02.03.02.003	Beban Pemeliharaan Alat Angku	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
8.1.02.03.02.012	Beban Pemeliharaan Alat Kanto	19.493.750,00	22.940.000,00	(3.446.250,00)	(15,02)
8.1.02.03.02.040	Beban Pemeliharaan Komputer	10.391.000,00	12.185.000,00	(1.794.000,00)	(14,72)
8.1.02.03.02.040	Beban Pemeliharaan Komputer	0,00	7.645.000,00	(7.645.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.041	Beban Pemeliharaan Komputer	5.605.500,00	0,00	5.605.500,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung da	0,00	250.182.869,06	(250.182.869,06)	(100,00)
8.1.02.03.03.000	Beban Pemeliharaan Bangunan	0,00	250.182.869,06	(250.182.869,06)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	625.007.896,00	1.096.372.607,00	(471.364.711,00)	(42,99)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam	625.007.896,00	1.096.372.607,00	(471.364.711,00)	(42,99)
8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Biasa	358.007.896,00	273.872.607,00	84.135.289,00	30,72
8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Dalam	177.000.000,00	20.000.000,00	157.000.000,00	785,00
8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Paket N	90.000.000,00	802.500.000,00	(712.500.000,00)	(88,79)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untu	529.000.000,00	12.000.000,00	517.000.000,00	4.308,33
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kep	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67
8.1.02.05.01.000	Beban Hadiah yang Bersifat Per	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepa	515.000.000,00	0,00	515.000.000,00	100,00
8.1.02.05.02.000	Beban Jasa yang Diberikan kepa	515.000.000,00	0,00	515.000.000,00	100,00
8.1.04	Beban Subsidi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	(64,00)
8.1.04.04	Beban Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	(64,00)
8.1.04.04.01	Beban Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	(64,00)
8.1.04.04.01.000	Beban Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	25.000.000,00	(16.000.000,00)	(64,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.362.527.139,00	22.966.944.736,06	(2.604.417.597,06)	(11,34)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amorti	394.970.560,00	265.053.661,00	129.916.899,00	49,02
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan da	210.078.109,00	83.877.661,00	126.200.448,00	150,46
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkuta	3.948.572,00	7.523.691,00	(3.575.119,00)	(47,52)
8.1.08.01.02.000	Beban Penyusutan Alat Angkuta	0,00	7.194.643,00	(7.194.643,00)	(100,00)
8.1.08.01.02.000	Beban Penyusutan Alat Angkuta	3.948.572,00	329.048,00	3.619.524,00	1.100,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor d	57.280.830,00	29.758.727,00	27.522.103,00	92,48
8.1.08.01.05.000	Beban Penyusutan Alat Kantor d	17.680.620,00	7.327.917,00	10.352.703,00	141,28
8.1.08.01.05.000	Beban Penyusutan Alat Rumah	9.751.750,00	14.527.835,00	(4.776.085,00)	(32,88)
8.1.08.01.05.000	Beban Penyusutan Alat Rumah	1.320.000,00	68.333,00	1.251.667,00	1.831,72
8.1.08.01.05.000	Beban Penyusutan Alat Rumah	18.195.160,00	6.105.276,00	12.089.884,00	198,02
8.1.08.01.05.001	Beban Penyusutan Alat Rumah	8.118.300,00	1.613.533,00	6.504.767,00	403,14
8.1.08.01.05.001	Beban Penyusutan Meja dan Ku	2.215.000,00	115.833,00	2.099.167,00	1.812,24
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, f	25.105.558,00	2.192.016,00	22.913.542,00	1.045,32
8.1.08.01.06.000	Beban Penyusutan Alat Studio-P	11.460.000,00	1.315.000,00	10.145.000,00	771,48
8.1.08.01.06.000	Beban Penyusutan Alat Studio-P	13.148.833,00	877.016,00	12.271.817,00	1.399,27
8.1.08.01.06.000	Beban Penyusutan Alat Studio-A	496.725,00	0,00	496.725,00	100,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	123.743.149,00	44.403.227,00	79.339.922,00	178,68
8.1.08.01.10.000	Beban Penyusutan Komputer U	17.451.250,00	1.454.271,00	15.996.979,00	1.100,00
8.1.08.01.10.000	Beban Penyusutan Komputer U	97.441.741,00	37.634.146,00	59.807.595,00	158,92
8.1.08.01.10.000	Beban Penyusutan Peralatan Ko	7.834.220,00	5.252.310,00	2.581.910,00	49,16
8.1.08.01.10.000	Beban Penyusutan Peralatan Ko	1.015.938,00	62.500,00	953.438,00	1.525,50
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan	177.109.126,00	176.921.262,00	187.864,00	0,11
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan G	177.109.126,00	176.921.262,00	187.864,00	0,11
8.1.08.02.01.000	Beban Penyusutan Bangunan G	134.734.022,00	134.546.158,00	187.864,00	0,14
8.1.08.02.01.000	Beban Penyusutan Bangunan G	20.658.846,00	20.658.846,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.001	Beban Penyusutan Bangunan G	19.613.214,00	19.613.214,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.003	Beban Penyusutan Bangunan G	931.844,00	931.844,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.004	Beban Penyusutan Bangunan G	1.171.200,00	1.171.200,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringa	7.783.325,00	4.254.738,00	3.528.587,00	82,93
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Al	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.004	Beban Penyusutan Bangunan Al	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	7.709.909,00	4.181.322,00	3.528.587,00	84,39
8.1.08.03.03.000	Beban Penyusutan Instalasi Air	3.849.368,00	320.781,00	3.528.587,00	1.100,00
8.1.08.03.03.003	Beban Penyusutan Instalasi Gar	3.042.875,00	3.042.875,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.003	Beban Penyusutan Instalasi Per	817.666,00	817.666,00	0,00	0,00

	JUMLAH Beban Penyusutan dan	394.970.560,00	265.053.661,00	129.916.899,00	49,02
	JUMLAH BEBAN	20.757.497.699,00	23.231.998.397,06	(2.474.500.698,06)	(10,65)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-20.757.497.699,00	- 23.231.998.397,06	2.474.500.698,06	(10,65)

Dwinsi Bali, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si.
NIP.196905101996031007

LAMPIRAN II



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp23.029.940.683,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp6.440.385.943,00	Rp1.460.241.303,61	Rp7.900.627.246,61	Rp941.742.010,00	Rp119.800.724,00	Rp1.061.542.734,00	Rp21.169.609.316,61	Rp1.860.331.366,39
5.1	BELANJA OPERASI	Rp22.074.885.383,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp5.983.918.406,00	Rp1.019.435.912,00	Rp7.003.354.318,00	Rp941.742.010,00	Rp119.800.724,00	Rp1.061.542.734,00	Rp20.272.336.388,00	Rp1.802.548.995,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp13.114.769.179,00	Rp11.278.505.553,00	Rp879.033.783,00	Rp12.157.539.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.157.539.336,00	Rp957.229.843,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.951.116.204,00	Rp43.000.000,00	Rp6.900.000,00	Rp49.900.000,00	Rp5.983.918.406,00	Rp1.010.435.912,00	Rp6.994.354.318,00	Rp941.742.010,00	Rp119.800.724,00	Rp1.061.542.734,00	Rp8.105.797.052,00	Rp845.319.152,00
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp955.055.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp456.467.537,00	Rp440.805.391,61	Rp897.272.928,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp897.272.928,61	Rp57.782.371,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp683.055.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.489,00	Rp212.294.500,00	Rp629.293.989,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.293.989,00	Rp53.761.311,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp272.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.468.048,00	Rp228.510.891,61	Rp267.978.939,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.978.939,61	Rp4.021.060,39
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Rp18.153.008.387,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp3.052.848.281,00	Rp685.726.769,61	Rp3.738.575.050,61	Rp742.797.128,00	Rp60.254.198,00	Rp803.051.326,00	Rp16.749.065.712,61	Rp1.403.942.674,39
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp16.426.026.668,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp1.885.928.877,00	Rp637.660.277,61	Rp2.523.589.154,61	Rp419.547.396,00	Rp21.030.510,00	Rp440.577.906,00	Rp15.171.606.396,61	Rp1.254.420.271,39
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp110.608.802,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.110.820,00	Rp6.511.082,00	Rp74.621.902,00	Rp16.863.830,00	Rp0,00	Rp16.863.830,00	Rp91.485.732,00	Rp19.123.070,00
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp102.343.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.110.820,00	Rp6.511.082,00	Rp74.621.902,00	Rp9.943.030,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp84.564.932,00	Rp17.778.970,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp102.343.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.110.820,00	Rp6.511.082,00	Rp74.621.902,00	Rp9.943.030,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp84.564.932,00	Rp17.778.970,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp102.343.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.110.820,00	Rp6.511.082,00	Rp74.621.902,00	Rp9.943.030,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp84.564.932,00	Rp17.778.970,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.166.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp9.943.030,00	Rp3.222.970,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.166.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp0,00	Rp9.943.030,00	Rp9.943.030,00	Rp3.222.970,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp63.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.000,00	Rp0,00	Rp63.000,00	Rp63.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp906.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp720.000,00	Rp0,00	Rp720.000,00	Rp720.000,00	Rp186.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp1.860.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.370.030,00	Rp0,00	Rp1.370.030,00	Rp1.370.030,00	Rp490.870,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp219.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp79.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.516.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp4.050.000,00	Rp2.466.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp74.621.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.110.820,00	Rp6.511.082,00	Rp74.621.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.621.902,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp68.924.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.931.220,00	Rp5.993.122,00	Rp68.924.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.924.342,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp68.924.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.931.220,00	Rp5.993.122,00	Rp68.924.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.924.342,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.697.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.179.600,00	Rp517.960,00	Rp5.697.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.697.560,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.902.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.638.500,00	Rp263.850,00	Rp2.902.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.902.350,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp158.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.840,00	Rp14.384,00	Rp158.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.224,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp197.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.800,00	Rp17.980,00	Rp197.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.780,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.439.206,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.217.460,00	Rp221.746,00	Rp2.439.206,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.439.206,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp14.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.556.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp14.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.556.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.556.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.264.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.920.800,00	Rp0,00	Rp6.920.800,00	Rp6.920.800,00	Rp1.344.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.264.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.920.800,00	Rp0,00	Rp6.920.800,00	Rp6.920.800,00	Rp1.344.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.264.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.920.800,00	Rp0,00	Rp6.920.800,00	Rp6.920.800,00	Rp1.344.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.424.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.080.800,00	Rp0,00	Rp3.080.800,00	Rp3.080.800,00	Rp1.344.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.424.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.080.800,00	Rp0,00	Rp3.080.800,00	Rp3.080.800,00	Rp1.344.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp162.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.000,00	Rp0,00	Rp162.000,00	Rp162.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.586.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.216.000,00	Rp0,00	Rp1.216.000,00	Rp1.216.000,00	Rp370.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.800,00	Rp0,00	Rp352.800,00	Rp352.800,00	Rp151.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.172.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp822.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.165.169.179,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.207.439.336,00	Rp957.729.843,00
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.165.169.179,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.207.439.336,00	Rp957.729.843,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.165.169.179,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.207.439.336,00	Rp957.729.843,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp13.114.769.179,00	Rp11.278.505.553,00	Rp879.033.783,00	Rp12.157.539.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.157.539.336,00	Rp957.229.843,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.103.225.383,00	Rp5.459.415.886,00	Rp424.445.166,00	Rp5.883.861.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.883.861.052,00	Rp219.364.331,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp3.921.953.210,00	Rp3.535.170.624,00	Rp308.193.400,00	Rp3.843.364.024,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.843.364.024,00	Rp78.589.186,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp3.066.066.736,00	Rp2.792.124.550,00	Rp195.353.000,00	Rp2.987.477.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.987.477.550,00	Rp78.589.186,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp855.886.474,00	Rp743.046.074,00	Rp112.840.400,00	Rp855.886.474,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp855.886.474,00	Rp0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp370.406.952,00	Rp334.001.356,00	Rp29.237.596,00	Rp363.238.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp363.238.952,00	Rp7.168.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp280.596.650,00	Rp256.982.464,00	Rp18.047.986,00	Rp275.030.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.030.450,00	Rp5.566.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp89.810.302,00	Rp77.018.892,00	Rp11.189.610,00	Rp88.208.502,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.208.502,00	Rp1.601.800,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp209.638.750,00	Rp189.130.000,00	Rp14.750.000,00	Rp203.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.880.000,00	Rp5.758.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp209.638.750,00	Rp189.130.000,00	Rp14.750.000,00	Rp203.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.880.000,00	Rp5.758.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp116.629.165,00	Rp109.619.165,00	Rp7.010.000,00	Rp116.629.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.629.165,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp94.780.000,00	Rp89.340.000,00	Rp5.440.000,00	Rp94.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.780.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp21.849.165,00	Rp20.279.165,00	Rp1.570.000,00	Rp21.849.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.849.165,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp117.295.000,00	Rp105.360.000,00	Rp10.880.000,00	Rp116.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.240.000,00	Rp1.055.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp74.700.000,00	Rp68.850.000,00	Rp4.795.000,00	Rp73.645.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.645.000,00	Rp1.055.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp42.595.000,00	Rp36.510.000,00	Rp6.085.000,00	Rp42.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.595.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp202.776.000,00	Rp183.512.280,00	Rp17.235.960,00	Rp200.748.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.748.240,00	Rp2.027.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp142.015.620,00	Rp130.862.940,00	Rp9.487.020,00	Rp140.349.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.349.960,00	Rp1.665.660,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp60.760.380,00	Rp52.649.340,00	Rp7.748.940,00	Rp60.398.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.398.280,00	Rp362.100,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp767.497.060,00	Rp693.852.363,00	Rp7.141.111,00	Rp700.993.474,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.993.474,00	Rp66.503.586,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp762.179.603,00	Rp689.534.906,00	Rp7.141.111,00	Rp696.676.017,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp696.676.017,00	Rp65.503.586,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp5.317.457,00	Rp4.317.457,00	Rp0,00	Rp4.317.457,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.317.457,00	Rp1.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp66.626,00	Rp48.372,00	Rp4.599,00	Rp52.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.971,00	Rp13.655,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp43.587,00	Rp31.582,00	Rp2.030,00	Rp33.612,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.612,00	Rp9.975,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp23.039,00	Rp16.790,00	Rp2.569,00	Rp19.359,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.359,00	Rp3.680,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp349.477.475,00	Rp279.258.984,00	Rp27.033.830,00	Rp306.292.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp306.292.814,00	Rp43.184.661,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp301.813.564,00	Rp240.288.201,00	Rp21.073.691,00	Rp261.361.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.361.892,00	Rp40.451.672,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp47.663.911,00	Rp38.970.783,00	Rp5.960.139,00	Rp44.930.922,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.930.922,00	Rp2.732.989,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp9.291.699,00	Rp7.365.731,00	Rp739.674,00	Rp8.105.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.105.405,00	Rp1.186.294,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp6.961.606,00	Rp5.626.242,00	Rp468.845,00	Rp6.095.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.095.087,00	Rp866.519,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp2.330.093,00	Rp1.739.489,00	Rp270.829,00	Rp2.010.318,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.010.318,00	Rp319.775,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp27.887.028,00	Rp22.097.011,00	Rp2.218.996,00	Rp24.316.007,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.316.007,00	Rp3.571.021,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp20.884.825,00	Rp16.878.758,00	Rp1.406.543,00	Rp18.285.301,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.285.301,00	Rp2.599.524,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp7.002.203,00	Rp5.218.253,00	Rp812.453,00	Rp6.030.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.030.706,00	Rp971.497,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp10.306.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.306.418,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp6.810.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.810.750,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp3.495.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.495.668,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp7.011.543.796,00	Rp5.819.089.667,00	Rp454.588.617,00	Rp6.273.678.284,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.273.678.284,00	Rp737.865.512,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp4.236.952.225,00	Rp3.507.598.902,00	Rp271.414.467,00	Rp3.779.013.369,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.779.013.369,00	Rp457.938.856,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp4.108.083.131,00	Rp3.410.280.628,00	Rp259.254.042,00	Rp3.669.534.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.669.534.670,00	Rp438.548.461,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp128.869.094,00	Rp97.318.274,00	Rp12.160.425,00	Rp109.478.699,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.478.699,00	Rp19.390.395,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp815.663.640,00	Rp682.786.730,00	Rp54.759.129,00	Rp737.545.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.545.859,00	Rp78.117.781,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp815.663.640,00	Rp682.786.730,00	Rp54.759.129,00	Rp737.545.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.545.859,00	Rp78.117.781,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.958.927.931,00	Rp1.628.704.035,00	Rp128.415.021,00	Rp1.757.119.056,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.757.119.056,00	Rp201.808.875,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp1.904.264.482,00	Rp1.587.423.768,00	Rp123.256.837,00	Rp1.710.680.605,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.710.680.605,00	Rp193.583.877,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp54.663.449,00	Rp41.280.267,00	Rp5.158.184,00	Rp46.438.451,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.438.451,00	Rp8.224.998,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.400.000,00	Rp43.000.000,00	Rp6.900.000,00	Rp49.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.900.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp50.400.000,00	Rp43.000.000,00	Rp6.900.000,00	Rp49.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.900.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp50.400.000,00	Rp43.000.000,00	Rp6.900.000,00	Rp49.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.900.000,00	Rp500.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp41.400.000,00	Rp34.000.000,00	Rp6.900.000,00	Rp40.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.900.000,00	Rp500.000,00
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp211.047.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp34.500.000,00	Rp57.100.000,00	Rp107.392.580,00	Rp9.068.736,00	Rp116.461.316,00	Rp173.561.316,00	Rp37.486.478,00
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp9.901.200,00	Rp1.096.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp9.901.200,00	Rp1.096.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp9.901.200,00	Rp1.096.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp9.901.200,00	Rp1.096.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp9.901.200,00	Rp1.096.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp10.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp0,00	Rp9.901.200,00	Rp9.901.200,00	Rp1.096.600,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp48.405.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp13.711.500,00	Rp0,00	Rp13.711.500,00	Rp36.311.500,00	Rp12.094.300,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp48.405.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp13.711.500,00	Rp0,00	Rp13.711.500,00	Rp36.311.500,00	Rp12.094.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp48.405.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp13.711.500,00	Rp0,00	Rp13.711.500,00	Rp36.311.500,00	Rp12.094.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp48.405.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp13.711.500,00	Rp0,00	Rp13.711.500,00	Rp36.311.500,00	Rp12.094.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp48.405.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp13.711.500,00	Rp0,00	Rp13.711.500,00	Rp36.311.500,00	Rp12.094.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.781.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.791.500,00	Rp0,00	Rp6.791.500,00	Rp6.791.500,00	Rp2.989.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp8.906.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.920.000,00	Rp0,00	Rp6.920.000,00	Rp6.920.000,00	Rp1.986.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp29.718.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp7.118.500,00
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp76.071.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp34.500.000,00	Rp37.850.000,00	Rp3.050.000,00	Rp40.900.000,00	Rp75.400.000,00	Rp671.194,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp76.071.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp34.500.000,00	Rp37.850.000,00	Rp3.050.000,00	Rp40.900.000,00	Rp75.400.000,00	Rp671.194,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp76.071.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp34.500.000,00	Rp37.850.000,00	Rp3.050.000,00	Rp40.900.000,00	Rp75.400.000,00	Rp671.194,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp76.071.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp34.500.000,00	Rp37.850.000,00	Rp3.050.000,00	Rp40.900.000,00	Rp75.400.000,00	Rp671.194,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp76.071.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp34.500.000,00	Rp37.850.000,00	Rp3.050.000,00	Rp40.900.000,00	Rp75.400.000,00	Rp671.194,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp76.071.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp34.500.000,00	Rp37.850.000,00	Rp3.050.000,00	Rp40.900.000,00	Rp75.400.000,00	Rp671.194,00
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.876.920,00	Rp625.000,00	Rp14.501.920,00	Rp14.501.920,00	Rp6.998.080,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.876.920,00	Rp625.000,00	Rp14.501.920,00	Rp14.501.920,00	Rp6.998.080,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.876.920,00	Rp625.000,00	Rp14.501.920,00	Rp14.501.920,00	Rp6.998.080,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.913.920,00	Rp0,00	Rp6.913.920,00	Rp6.913.920,00	Rp6.558.080,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.913.920,00	Rp0,00	Rp6.913.920,00	Rp6.913.920,00	Rp6.558.080,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp13.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.913.920,00	Rp0,00	Rp6.913.920,00	Rp6.913.920,00	Rp6.558.080,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp8.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.963.000,00	Rp625.000,00	Rp7.588.000,00	Rp7.588.000,00	Rp440.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp8.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.963.000,00	Rp625.000,00	Rp7.588.000,00	Rp7.588.000,00	Rp440.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp8.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.963.000,00	Rp625.000,00	Rp7.588.000,00	Rp7.588.000,00	Rp440.000,00
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp3.625.000,00	Rp875.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp3.625.000,00	Rp875.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp3.625.000,00	Rp875.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp3.625.000,00	Rp875.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp3.625.000,00	Rp875.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00	Rp3.625.000,00	Rp875.000,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp49.573.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.427.960,00	Rp5.393.736,00	Rp33.821.696,00	Rp33.821.696,00	Rp15.751.304,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.573.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.427.960,00	Rp5.393.736,00	Rp33.821.696,00	Rp33.821.696,00	Rp15.751.304,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.573.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.427.960,00	Rp5.393.736,00	Rp33.821.696,00	Rp33.821.696,00	Rp15.751.304,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.495.000,00	Rp0,00	Rp15.495.000,00	Rp15.495.000,00	Rp630.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.495.000,00	Rp0,00	Rp15.495.000,00	Rp15.495.000,00	Rp630.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.495.000,00	Rp0,00	Rp15.495.000,00	Rp15.495.000,00	Rp630.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp33.448.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.932.960,00	Rp5.393.736,00	Rp18.326.696,00	Rp18.326.696,00	Rp15.121.304,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp33.448.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.932.960,00	Rp5.393.736,00	Rp18.326.696,00	Rp18.326.696,00	Rp15.121.304,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp33.448.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.932.960,00	Rp5.393.736,00	Rp18.326.696,00	Rp18.326.696,00	Rp15.121.304,00
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp683.055.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.489,00	Rp212.294.500,00	Rp629.293.989,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.293.989,00	Rp53.761.311,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp683.055.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.489,00	Rp212.294.500,00	Rp629.293.989,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.293.989,00	Rp53.761.311,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp683.055.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.489,00	Rp212.294.500,00	Rp629.293.989,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.293.989,00	Rp53.761.311,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp683.055.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp416.999.489,00	Rp212.294.500,00	Rp629.293.989,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.293.989,00	Rp53.761.311,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp126.592.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.007.889,00	Rp0,00	Rp120.007.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.007.889,00	Rp6.584.511,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp4.968.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp218.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp4.968.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp218.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp112.009.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.007.889,00	Rp0,00	Rp107.007.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.007.889,00	Rp5.001.211,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp82.009.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.501.640,00	Rp0,00	Rp80.501.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.501.640,00	Rp1.508.160,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp29.999.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.506.249,00	Rp0,00	Rp26.506.249,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.506.249,00	Rp3.493.051,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp9.614.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp1.364.800,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp9.614.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp1.364.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp205.608.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.529.500,00	Rp199.529.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.529.500,00	Rp6.078.600,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp205.608.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.529.500,00	Rp199.529.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.529.500,00	Rp6.078.600,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp55.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.248.000,00	Rp52.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.248.000,00	Rp3.703.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp71.618.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.803.500,00	Rp69.803.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.803.500,00	Rp1.815.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp78.038.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.478.000,00	Rp77.478.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.478.000,00	Rp560.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp350.854.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.991.600,00	Rp12.765.000,00	Rp309.756.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.756.600,00	Rp41.098.200,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp320.214.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.843.200,00	Rp0,00	Rp289.843.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.843.200,00	Rp30.371.600,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp320.214.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.843.200,00	Rp0,00	Rp289.843.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.843.200,00	Rp30.371.600,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp30.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.148.400,00	Rp12.765.000,00	Rp19.913.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.913.400,00	Rp10.726.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.148.400,00	Rp0,00	Rp7.148.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.148.400,00	Rp1.491.600,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.765.000,00	Rp12.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.765.000,00	Rp9.235.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp948.210.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.479.420,00	Rp62.132.984,00	Rp687.612.404,00	Rp173.788.816,00	Rp9.925.174,00	Rp183.713.990,00	Rp871.326.394,00	Rp76.884.174,00
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp1.270.000,00	Rp723.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp1.270.000,00	Rp723.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp1.270.000,00	Rp723.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp1.270.000,00	Rp723.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp1.270.000,00	Rp723.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.993.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp0,00	Rp1.270.000,00	Rp1.270.000,00	Rp723.900,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp246.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.998.816,00	Rp9.605.174,00	Rp178.603.990,00	Rp178.603.990,00	Rp67.396.010,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp246.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.998.816,00	Rp9.605.174,00	Rp178.603.990,00	Rp178.603.990,00	Rp67.396.010,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp246.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.998.816,00	Rp9.605.174,00	Rp178.603.990,00	Rp178.603.990,00	Rp67.396.010,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp246.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.998.816,00	Rp9.605.174,00	Rp178.603.990,00	Rp178.603.990,00	Rp67.396.010,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp246.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.998.816,00	Rp9.605.174,00	Rp178.603.990,00	Rp178.603.990,00	Rp67.396.010,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.341.961,00	Rp667.451,00	Rp8.009.412,00	Rp8.009.412,00	Rp3.990.588,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.018.300,00	Rp1.028.550,00	Rp15.046.850,00	Rp15.046.850,00	Rp38.953.150,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.638.555,00	Rp7.909.173,00	Rp155.547.728,00	Rp155.547.728,00	Rp24.452.272,00
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp700.216.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.479.420,00	Rp62.132.984,00	Rp687.612.404,00	Rp3.520.000,00	Rp320.000,00	Rp3.840.000,00	Rp691.452.404,00	Rp8.764.264,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp700.216.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.479.420,00	Rp62.132.984,00	Rp687.612.404,00	Rp3.520.000,00	Rp320.000,00	Rp3.840.000,00	Rp691.452.404,00	Rp8.764.264,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp700.216.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.479.420,00	Rp62.132.984,00	Rp687.612.404,00	Rp3.520.000,00	Rp320.000,00	Rp3.840.000,00	Rp691.452.404,00	Rp8.764.264,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp700.216.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.479.420,00	Rp62.132.984,00	Rp687.612.404,00	Rp3.520.000,00	Rp320.000,00	Rp3.840.000,00	Rp691.452.404,00	Rp8.764.264,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp647.298.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp579.380.980,00	Rp55.917.464,00	Rp635.298.444,00	Rp3.520.000,00	Rp320.000,00	Rp3.840.000,00	Rp639.138.444,00	Rp8.160.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp228.752.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.759.270,00	Rp5.993.122,00	Rp228.752.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.752.392,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp184.793.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.828.050,00	Rp13.965.610,00	Rp184.793.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.793.660,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp221.752.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.793.660,00	Rp35.958.732,00	Rp221.752.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.752.392,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp320.000,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp8.160.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp52.918.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.098.440,00	Rp6.215.520,00	Rp52.313.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.313.960,00	Rp604.264,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp26.912.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.482.650,00	Rp3.166.200,00	Rp26.648.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.648.850,00	Rp263.850,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.553.472,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.280.176,00	Rp172.608,00	Rp1.452.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.452.784,00	Rp100.688,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.833.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.220,00	Rp215.760,00	Rp1.815.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.815.980,00	Rp17.980,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp22.618.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.735.394,00	Rp2.660.952,00	Rp22.396.346,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.396.346,00	Rp221.746,00
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.307.935.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp752.739.148,00	Rp322.221.711,61	Rp1.074.960.859,61	Rp121.502.170,00	Rp2.036.600,00	Rp123.538.770,00	Rp1.198.499.629,61	Rp109.435.395,39
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp788.476.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.595.165,00	Rp64.066.492,00	Rp622.661.657,00	Rp82.555.600,00	Rp2.036.600,00	Rp84.592.200,00	Rp707.253.857,00	Rp81.222.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp788.476.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.595.165,00	Rp64.066.492,00	Rp622.661.657,00	Rp82.555.600,00	Rp2.036.600,00	Rp84.592.200,00	Rp707.253.857,00	Rp81.222.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp788.476.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.595.165,00	Rp64.066.492,00	Rp622.661.657,00	Rp82.555.600,00	Rp2.036.600,00	Rp84.592.200,00	Rp707.253.857,00	Rp81.222.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp318.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp15.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp318.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp15.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp318.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.985.000,00	Rp15.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp319.676.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.610.165,00	Rp64.066.492,00	Rp304.676.657,00	Rp10.457.600,00	Rp117.600,00	Rp10.575.200,00	Rp315.251.857,00	Rp4.424.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp299.735.197,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.776.465,00	Rp60.958.732,00	Rp284.735.197,00	Rp10.457.600,00	Rp117.600,00	Rp10.575.200,00	Rp295.310.397,00	Rp4.424.800,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp237.735.197,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.776.465,00	Rp35.958.732,00	Rp237.735.197,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.735.197,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.457.600,00	Rp117.600,00	Rp10.575.200,00	Rp10.575.200,00	Rp4.424.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp19.941.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.833.700,00	Rp3.107.760,00	Rp19.941.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.941.460,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp10.158.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.575.125,00	Rp1.583.100,00	Rp10.158.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.158.225,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp553.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp467.480,00	Rp86.304,00	Rp553.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp553.784,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp692.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp584.350,00	Rp107.880,00	Rp692.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp692.230,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp8.537.221,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.206.745,00	Rp1.330.476,00	Rp8.537.221,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.537.221,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp150.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.098.000,00	Rp1.919.000,00	Rp74.017.000,00	Rp74.017.000,00	Rp76.783.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp150.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.098.000,00	Rp1.919.000,00	Rp74.017.000,00	Rp74.017.000,00	Rp76.783.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp148.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.743.000,00	Rp1.919.000,00	Rp71.662.000,00	Rp71.662.000,00	Rp76.338.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.000,00	Rp0,00	Rp2.355.000,00	Rp2.355.000,00	Rp445.000,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp49.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp33.605.250,00	Rp16.314.750,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp33.605.250,00	Rp16.314.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp33.605.250,00	Rp16.314.750,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp49.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp33.605.250,00	Rp16.314.750,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp49.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp0,00	Rp33.605.250,00	Rp33.605.250,00	Rp16.314.750,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp26.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.008.750,00	Rp0,00	Rp19.008.750,00	Rp19.008.750,00	Rp7.221.250,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp16.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.991.000,00	Rp0,00	Rp8.991.000,00	Rp8.991.000,00	Rp7.799.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.605.500,00	Rp0,00	Rp5.605.500,00	Rp5.605.500,00	Rp1.294.500,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp469.538.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.143.983,00	Rp258.155.219,61	Rp452.299.202,61	Rp5.341.320,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp457.640.522,61	Rp11.897.845,39
5.1	BELANJA OPERASI	Rp197.538.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.675.935,00	Rp29.644.328,00	Rp184.320.263,00	Rp5.341.320,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp189.661.583,00	Rp7.876.785,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp197.538.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.675.935,00	Rp29.644.328,00	Rp184.320.263,00	Rp5.341.320,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp189.661.583,00	Rp7.876.785,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp5.341.320,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp17.054.595,00	Rp7.617.805,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp5.341.320,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp17.054.595,00	Rp7.617.805,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp5.872.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp0,00	Rp5.341.320,00	Rp5.341.320,00	Rp531.080,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp18.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.713.275,00	Rp7.086.725,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp172.865.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.962.660,00	Rp29.644.328,00	Rp172.606.988,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.606.988,00	Rp258.980,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp160.434.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.862.440,00	Rp27.572.488,00	Rp160.434.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.434.928,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp3.600.000,00	Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp147.834.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.862.440,00	Rp23.972.488,00	Rp147.834.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.834.928,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp12.431.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.100.220,00	Rp2.071.840,00	Rp12.172.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.172.060,00	Rp258.980,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp6.332.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.145.075,00	Rp1.055.400,00	Rp6.200.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.200.475,00	Rp131.925,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp345.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.488,00	Rp57.536,00	Rp338.024,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.024,00	Rp7.192,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp431.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.610,00	Rp71.920,00	Rp422.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.530,00	Rp8.990,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp5.321.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.324.047,00	Rp886.984,00	Rp5.211.031,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.211.031,00	Rp110.873,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp272.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.468.048,00	Rp228.510.891,61	Rp267.978.939,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.978.939,61	Rp4.021.060,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp272.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.468.048,00	Rp228.510.891,61	Rp267.978.939,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.978.939,61	Rp4.021.060,39
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp272.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.468.048,00	Rp228.510.891,61	Rp267.978.939,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.978.939,61	Rp4.021.060,39
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp272.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.468.048,00	Rp228.510.891,61	Rp267.978.939,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.978.939,61	Rp4.021.060,39
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp272.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.468.048,00	Rp228.510.891,61	Rp267.978.939,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.978.939,61	Rp4.021.060,39
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp789.809.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.548.525,00	Rp22.022.164,00	Rp649.570.689,00	Rp100.463.600,00	Rp1.920.000,00	Rp102.383.600,00	Rp751.954.289,00	Rp37.855.600,00
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp779.890.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.548.525,00	Rp22.022.164,00	Rp649.570.689,00	Rp90.871.600,00	Rp1.920.000,00	Rp92.791.600,00	Rp742.362.289,00	Rp37.528.000,00
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp779.890.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.548.525,00	Rp22.022.164,00	Rp649.570.689,00	Rp90.871.600,00	Rp1.920.000,00	Rp92.791.600,00	Rp742.362.289,00	Rp37.528.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp779.890.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.548.525,00	Rp22.022.164,00	Rp649.570.689,00	Rp90.871.600,00	Rp1.920.000,00	Rp92.791.600,00	Rp742.362.289,00	Rp37.528.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp770.890.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.548.525,00	Rp13.022.164,00	Rp640.570.689,00	Rp90.871.600,00	Rp1.920.000,00	Rp92.791.600,00	Rp733.362.289,00	Rp37.528.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp63.639.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp2.551.600,00	Rp0,00	Rp2.551.600,00	Rp30.711.600,00	Rp32.928.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp63.639.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp2.551.600,00	Rp0,00	Rp2.551.600,00	Rp30.711.600,00	Rp32.928.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp879.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp663.600,00	Rp0,00	Rp663.600,00	Rp663.600,00	Rp215.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp2.415.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.888.000,00	Rp0,00	Rp1.888.000,00	Rp1.888.000,00	Rp527.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp60.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.160.000,00	Rp32.185.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp102.010.689,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.388.525,00	Rp13.022.164,00	Rp97.410.689,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.410.689,00	Rp4.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp94.500.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.914.025,00	Rp11.986.244,00	Rp89.900.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.900.269,00	Rp4.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp89.900.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.914.025,00	Rp11.986.244,00	Rp89.900.269,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.900.269,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp7.510.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.474.500,00	Rp1.035.920,00	Rp7.510.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.510.420,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.825.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.298.125,00	Rp527.700,00	Rp3.825.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.825.825,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp208.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.800,00	Rp28.768,00	Rp208.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.568,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp260.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.750,00	Rp35.960,00	Rp260.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.710,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp3.215.317,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.771.825,00	Rp443.492,00	Rp3.215.317,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.317,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp90.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.320.000,00	Rp1.920.000,00	Rp90.240.000,00	Rp90.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp90.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.320.000,00	Rp1.920.000,00	Rp90.240.000,00	Rp90.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp90.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.320.000,00	Rp1.920.000,00	Rp90.240.000,00	Rp90.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000.000,00	Rp0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp9.919.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp9.592.000,00	Rp327.600,00
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp9.919.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp9.592.000,00	Rp327.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.919.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp9.592.000,00	Rp327.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.919.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp0,00	Rp9.592.000,00	Rp9.592.000,00	Rp327.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.279.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.000,00	Rp0,00	Rp952.000,00	Rp952.000,00	Rp327.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.279.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.000,00	Rp0,00	Rp952.000,00	Rp952.000,00	Rp327.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp223.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.000,00	Rp0,00	Rp144.000,00	Rp144.000,00	Rp79.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.056.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.000,00	Rp0,00	Rp808.000,00	Rp808.000,00	Rp248.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp77.397.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.677.705,00	Rp0,00	Rp23.677.705,00	Rp51.297.560,00	Rp0,00	Rp51.297.560,00	Rp74.975.265,00	Rp2.421.840,00
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp26.908.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp18.651.560,00	Rp0,00	Rp18.651.560,00	Rp25.051.560,00	Rp1.856.440,00
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp26.908.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp18.651.560,00	Rp0,00	Rp18.651.560,00	Rp25.051.560,00	Rp1.856.440,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp26.908.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp18.651.560,00	Rp0,00	Rp18.651.560,00	Rp25.051.560,00	Rp1.856.440,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp26.908.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp18.651.560,00	Rp0,00	Rp18.651.560,00	Rp25.051.560,00	Rp1.856.440,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.131.560,00	Rp0,00	Rp7.131.560,00	Rp7.131.560,00	Rp656.440,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.131.560,00	Rp0,00	Rp7.131.560,00	Rp7.131.560,00	Rp656.440,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp2.004.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.512.000,00	Rp0,00	Rp1.512.000,00	Rp1.512.000,00	Rp492.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp487.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.560,00	Rp0,00	Rp439.560,00	Rp439.560,00	Rp48.240,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp795.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00	Rp15.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp4.400.000,00	Rp100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Rp50.489.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp32.646.000,00	Rp0,00	Rp32.646.000,00	Rp49.923.705,00	Rp565.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp50.489.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp32.646.000,00	Rp0,00	Rp32.646.000,00	Rp49.923.705,00	Rp565.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.489.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp32.646.000,00	Rp0,00	Rp32.646.000,00	Rp49.923.705,00	Rp565.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.489.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp32.646.000,00	Rp0,00	Rp32.646.000,00	Rp49.923.705,00	Rp565.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.291.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.726.000,00	Rp0,00	Rp6.726.000,00	Rp6.726.000,00	Rp565.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.291.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.726.000,00	Rp0,00	Rp6.726.000,00	Rp6.726.000,00	Rp565.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.995.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp499.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp795.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00	Rp15.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.450.000,00	Rp0,00	Rp4.450.000,00	Rp4.450.000,00	Rp50.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.277.705,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp15.982.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.982.805,00	Rp0,00	Rp15.982.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.982.805,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp15.982.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.982.805,00	Rp0,00	Rp15.982.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.982.805,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp1.294.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.294.900,00	Rp0,00	Rp1.294.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.294.900,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp659.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.625,00	Rp0,00	Rp659.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.625,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp35.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.960,00	Rp0,00	Rp35.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.960,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp44.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.950,00	Rp0,00	Rp44.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.950,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp554.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.365,00	Rp0,00	Rp554.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.365,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp25.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp25.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp25.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp25.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp25.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp25.920.000,00	Rp0,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp87.702.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp46.459.199,00	Rp0,00	Rp46.459.199,00	Rp81.014.609,00	Rp6.688.201,00
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp87.702.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp46.459.199,00	Rp0,00	Rp46.459.199,00	Rp81.014.609,00	Rp6.688.201,00
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp61.553.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp20.906.900,00	Rp0,00	Rp20.906.900,00	Rp55.462.310,00	Rp6.090.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp61.553.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp20.906.900,00	Rp0,00	Rp20.906.900,00	Rp55.462.310,00	Rp6.090.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp61.553.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp20.906.900,00	Rp0,00	Rp20.906.900,00	Rp55.462.310,00	Rp6.090.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.417.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.626.900,00	Rp0,00	Rp3.626.900,00	Rp3.626.900,00	Rp1.790.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.417.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.626.900,00	Rp0,00	Rp3.626.900,00	Rp3.626.900,00	Rp1.790.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.630.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.000,00	Rp0,00	Rp1.296.000,00	Rp1.296.000,00	Rp334.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.900,00	Rp0,00	Rp130.900,00	Rp130.900,00	Rp56.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp38.855.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.555.410,00	Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp36.265.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp2.589.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.589.800,00	Rp0,00	Rp2.589.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.589.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.319.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.250,00	Rp0,00	Rp1.319.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.250,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp71.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.920,00	Rp0,00	Rp71.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.920,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp89.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.900,00	Rp0,00	Rp89.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.900,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.108.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.108.730,00	Rp0,00	Rp1.108.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.108.730,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp26.149.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.552.299,00	Rp0,00	Rp25.552.299,00	Rp25.552.299,00	Rp597.301,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp26.149.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.552.299,00	Rp0,00	Rp25.552.299,00	Rp25.552.299,00	Rp597.301,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp26.149.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.552.299,00	Rp0,00	Rp25.552.299,00	Rp25.552.299,00	Rp597.301,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.549.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.952.299,00	Rp0,00	Rp3.952.299,00	Rp3.952.299,00	Rp597.301,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.549.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.952.299,00	Rp0,00	Rp3.952.299,00	Rp3.952.299,00	Rp597.301,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.495.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.349.000,00	Rp0,00	Rp1.349.000,00	Rp1.349.000,00	Rp146.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp804.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp403.299,00	Rp0,00	Rp403.299,00	Rp403.299,00	Rp401.001,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp50.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp404.183.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.527.075,00	Rp19.533.246,00	Rp318.060.321,00	Rp63.514.988,00	Rp0,00	Rp63.514.988,00	Rp381.575.309,00	Rp22.608.512,00
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp404.183.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.527.075,00	Rp19.533.246,00	Rp318.060.321,00	Rp63.514.988,00	Rp0,00	Rp63.514.988,00	Rp381.575.309,00	Rp22.608.512,00
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp338.343.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.265.575,00	Rp19.533.246,00	Rp287.798.821,00	Rp38.951.478,00	Rp0,00	Rp38.951.478,00	Rp326.750.299,00	Rp11.593.522,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp338.343.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.265.575,00	Rp19.533.246,00	Rp287.798.821,00	Rp38.951.478,00	Rp0,00	Rp38.951.478,00	Rp326.750.299,00	Rp11.593.522,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp338.343.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.265.575,00	Rp19.533.246,00	Rp287.798.821,00	Rp38.951.478,00	Rp0,00	Rp38.951.478,00	Rp326.750.299,00	Rp11.593.522,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.391.478,00	Rp0,00	Rp16.391.478,00	Rp16.391.478,00	Rp3.593.522,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp19.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.391.478,00	Rp0,00	Rp16.391.478,00	Rp16.391.478,00	Rp3.593.522,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.090.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.075.000,00	Rp0,00	Rp1.075.000,00	Rp1.075.000,00	Rp15.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp2.952.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.216.000,00	Rp0,00	Rp2.216.000,00	Rp2.216.000,00	Rp736.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp1.375.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp910.478,00	Rp0,00	Rp910.478,00	Rp910.478,00	Rp464.722,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.507.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp960.000,00	Rp547.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp7.659.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp5.950.000,00	Rp1.709.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.280.000,00	Rp0,00	Rp5.280.000,00	Rp5.280.000,00	Rp120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp289.798.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.265.575,00	Rp19.533.246,00	Rp281.798.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.798.821,00	Rp8.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp268.821.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.842.075,00	Rp17.979.366,00	Rp260.821.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.821.441,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp14.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp254.721.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.742.075,00	Rp17.979.366,00	Rp254.721.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.721.441,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp20.977.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.423.500,00	Rp1.553.880,00	Rp20.977.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.977.380,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp10.685.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.894.375,00	Rp791.550,00	Rp10.685.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.685.925,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp582.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp539.400,00	Rp43.152,00	Rp582.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp582.552,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp728.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.250,00	Rp53.940,00	Rp728.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp728.190,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp8.980.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.315.475,00	Rp665.238,00	Rp8.980.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.980.713,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp28.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp22.560.000,00	Rp0,00	Rp22.560.000,00	Rp28.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp28.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp22.560.000,00	Rp0,00	Rp22.560.000,00	Rp28.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp22.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.560.000,00	Rp0,00	Rp22.560.000,00	Rp22.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rp65.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.261.500,00	Rp0,00	Rp30.261.500,00	Rp24.563.510,00	Rp0,00	Rp24.563.510,00	Rp54.825.010,00	Rp11.014.990,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp65.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.261.500,00	Rp0,00	Rp30.261.500,00	Rp24.563.510,00	Rp0,00	Rp24.563.510,00	Rp54.825.010,00	Rp11.014.990,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp65.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.261.500,00	Rp0,00	Rp30.261.500,00	Rp24.563.510,00	Rp0,00	Rp24.563.510,00	Rp54.825.010,00	Rp11.014.990,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.693.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.604.710,00	Rp0,00	Rp10.604.710,00	Rp10.604.710,00	Rp1.088.290,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.693.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.604.710,00	Rp0,00	Rp10.604.710,00	Rp10.604.710,00	Rp1.088.290,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp761.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.500,00	Rp0,00	Rp558.500,00	Rp558.500,00	Rp202.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.746.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp426.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp2.276.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.121.210,00	Rp0,00	Rp2.121.210,00	Rp2.121.210,00	Rp155.190,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.784.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.730.000,00	Rp0,00	Rp2.730.000,00	Rp2.730.000,00	Rp54.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.775.000,00	Rp0,00	Rp2.775.000,00	Rp2.775.000,00	Rp225.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp30.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp13.958.800,00	Rp0,00	Rp13.958.800,00	Rp30.220.300,00	Rp326.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp22.361.500,00	Rp238.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp16.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.261.500,00	Rp38.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp7.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.858.800,00	Rp0,00	Rp7.858.800,00	Rp7.858.800,00	Rp88.200,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp7.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.858.800,00	Rp0,00	Rp7.858.800,00	Rp7.858.800,00	Rp88.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp367.888.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.610.689,00	Rp6.511.082,00	Rp189.121.771,00	Rp61.514.385,00	Rp37.303.688,00	Rp98.818.073,00	Rp287.939.844,00	Rp79.948.250,00
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp367.888.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.610.689,00	Rp6.511.082,00	Rp189.121.771,00	Rp61.514.385,00	Rp37.303.688,00	Rp98.818.073,00	Rp287.939.844,00	Rp79.948.250,00
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp174.608.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.210.689,00	Rp6.511.082,00	Rp147.721.771,00	Rp13.678.050,00	Rp0,00	Rp13.678.050,00	Rp161.399.821,00	Rp13.208.573,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp174.608.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.210.689,00	Rp6.511.082,00	Rp147.721.771,00	Rp13.678.050,00	Rp0,00	Rp13.678.050,00	Rp161.399.821,00	Rp13.208.573,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp174.608.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.210.689,00	Rp6.511.082,00	Rp147.721.771,00	Rp13.678.050,00	Rp0,00	Rp13.678.050,00	Rp161.399.821,00	Rp13.208.573,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.178.050,00	Rp0,00	Rp10.178.050,00	Rp10.178.050,00	Rp1.641.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.178.050,00	Rp0,00	Rp10.178.050,00	Rp10.178.050,00	Rp1.641.950,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp471.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp401.900,00	Rp0,00	Rp401.900,00	Rp401.900,00	Rp69.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.147.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp267.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp1.265.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.016.150,00	Rp0,00	Rp1.016.150,00	Rp1.016.150,00	Rp249.250,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp251.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000,00	Rp0,00	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp91.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.835.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp835.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.720.000,00	Rp0,00	Rp5.720.000,00	Rp5.720.000,00	Rp130.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp143.888.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.710.689,00	Rp6.511.082,00	Rp131.221.771,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp132.321.771,00	Rp11.566.623,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp135.083.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.200.269,00	Rp5.993.122,00	Rp123.193.391,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp124.293.391,00	Rp10.789.683,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp29.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.300.000,00	Rp0,00	Rp26.300.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp27.400.000,00	Rp1.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp105.883.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.900.269,00	Rp5.993.122,00	Rp96.893.391,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.893.391,00	Rp8.989.683,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.805.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.510.420,00	Rp517.960,00	Rp8.028.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.028.380,00	Rp776.940,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.485.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.825.825,00	Rp263.850,00	Rp4.089.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.089.675,00	Rp395.775,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp244.528,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.568,00	Rp14.384,00	Rp222.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.952,00	Rp21.576,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp305.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.710,00	Rp17.980,00	Rp278.690,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.690,00	Rp26.970,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp3.769.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.317,00	Rp221.746,00	Rp3.437.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.437.063,00	Rp332.619,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp18.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp18.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp20.531.977,00	Rp0,00	Rp20.531.977,00	Rp48.031.977,00	Rp1.968.023,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp20.531.977,00	Rp0,00	Rp20.531.977,00	Rp48.031.977,00	Rp1.968.023,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp20.531.977,00	Rp0,00	Rp20.531.977,00	Rp48.031.977,00	Rp1.968.023,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.171.977,00	Rp0,00	Rp8.171.977,00	Rp8.171.977,00	Rp1.268.023,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.171.977,00	Rp0,00	Rp8.171.977,00	Rp8.171.977,00	Rp1.268.023,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp156.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.500,00	Rp0,00	Rp111.500,00	Rp111.500,00	Rp45.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp530.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.000,00	Rp0,00	Rp408.000,00	Rp408.000,00	Rp122.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp1.180.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.022.477,00	Rp0,00	Rp1.022.477,00	Rp1.022.477,00	Rp158.123,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.172.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp822.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.280.000,00	Rp0,00	Rp5.280.000,00	Rp5.280.000,00	Rp120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp21.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp20.600.000,00	Rp700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp21.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp20.600.000,00	Rp700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp21.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp20.600.000,00	Rp700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp19.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp19.260.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp19.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp19.260.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00	Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Rp97.119.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.958.080,00	Rp37.303.688,00	Rp54.261.768,00	Rp54.261.768,00	Rp42.857.932,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp97.119.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.958.080,00	Rp37.303.688,00	Rp54.261.768,00	Rp54.261.768,00	Rp42.857.932,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp97.119.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.958.080,00	Rp37.303.688,00	Rp54.261.768,00	Rp54.261.768,00	Rp42.857.932,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.305.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.504.000,00	Rp5.715.397,00	Rp7.219.397,00	Rp7.219.397,00	Rp3.085.903,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.305.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.504.000,00	Rp5.715.397,00	Rp7.219.397,00	Rp7.219.397,00	Rp3.085.903,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp612.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp464.000,00	Rp0,00	Rp464.000,00	Rp464.000,00	Rp148.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp5.032.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.195.397,00	Rp2.195.397,00	Rp2.195.397,00	Rp2.836.903,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.060.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp1.040.000,00	Rp20.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.000,00	Rp3.520.000,00	Rp3.520.000,00	Rp80.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp77.934.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.574.080,00	Rp25.588.291,00	Rp38.162.371,00	Rp38.162.371,00	Rp39.772.029,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.923.500,00	Rp15.923.500,00	Rp15.923.500,00	Rp3.776.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp6.100.000,00	Rp6.100.000,00	Rp3.600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.823.500,00	Rp9.823.500,00	Rp9.823.500,00	Rp176.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp58.234.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.574.080,00	Rp9.664.791,00	Rp22.238.871,00	Rp22.238.871,00	Rp35.995.529,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp58.234.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.574.080,00	Rp9.664.791,00	Rp22.238.871,00	Rp22.238.871,00	Rp35.995.529,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp8.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp6.000.000,00	Rp8.880.000,00	Rp8.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp8.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp6.000.000,00	Rp8.880.000,00	Rp8.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Rp46.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp10.346.278,00	Rp0,00	Rp10.346.278,00	Rp24.246.278,00	Rp21.913.722,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp46.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp10.346.278,00	Rp0,00	Rp10.346.278,00	Rp24.246.278,00	Rp21.913.722,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp46.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp10.346.278,00	Rp0,00	Rp10.346.278,00	Rp24.246.278,00	Rp21.913.722,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.506.278,00	Rp0,00	Rp6.506.278,00	Rp6.506.278,00	Rp1.213.722,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.506.278,00	Rp0,00	Rp6.506.278,00	Rp6.506.278,00	Rp1.213.722,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.334.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.179.700,00	Rp0,00	Rp1.179.700,00	Rp1.179.700,00	Rp154.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp353.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp272.000,00	Rp81.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp484.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.578,00	Rp0,00	Rp404.578,00	Rp404.578,00	Rp80.122,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.172.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp822.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	Rp75.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp34.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp20.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp34.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp20.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp34.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.900.000,00	Rp20.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp3.840.000,00	Rp0,00
UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Rp4.876.932.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.387.537.662,00	Rp774.514.534,00	Rp4.162.052.196,00	Rp198.944.882,00	Rp59.546.526,00	Rp258.491.408,00	Rp4.420.543.604,00	Rp456.388.692,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp477.808.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.932.288,00	Rp42.322.033,00	Rp341.254.321,00	Rp70.504.782,00	Rp2.509.607,00	Rp73.014.389,00	Rp414.268.710,00	Rp63.540.284,00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp74.659.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp29.409.150,00	Rp1.365.000,00	Rp30.774.150,00	Rp65.274.150,00	Rp9.385.300,00
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp699.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp616.050,00	Rp83.550,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp699.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp616.050,00	Rp83.550,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp699.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp616.050,00	Rp83.550,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp699.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp616.050,00	Rp83.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp699.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp616.050,00	Rp83.550,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp699.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp0,00	Rp616.050,00	Rp616.050,00	Rp83.550,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp13.146.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp7.954.360,00	Rp5.191.740,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.146.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp7.954.360,00	Rp5.191.740,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.146.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp7.954.360,00	Rp5.191.740,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.146.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp7.954.360,00	Rp5.191.740,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.146.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp0,00	Rp7.954.360,00	Rp7.954.360,00	Rp5.191.740,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.407.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp657.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp943.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp43.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp3.045.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.304.360,00	Rp0,00	Rp2.304.360,00	Rp2.304.360,00	Rp740.640,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.750.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.750.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp56.904.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp20.539.040,00	Rp1.365.000,00	Rp21.904.040,00	Rp56.404.040,00	Rp500.010,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp56.904.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp20.539.040,00	Rp1.365.000,00	Rp21.904.040,00	Rp56.404.040,00	Rp500.010,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp56.904.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp20.539.040,00	Rp1.365.000,00	Rp21.904.040,00	Rp56.404.040,00	Rp500.010,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp56.904.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp20.539.040,00	Rp1.365.000,00	Rp21.904.040,00	Rp56.404.040,00	Rp500.010,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp56.904.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp20.539.040,00	Rp1.365.000,00	Rp21.904.040,00	Rp56.404.040,00	Rp500.010,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp56.904.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp20.539.040,00	Rp1.365.000,00	Rp21.904.040,00	Rp56.404.040,00	Rp500.010,00
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp299.700,00	Rp700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp299.700,00	Rp700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp299.700,00	Rp700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp299.700,00	Rp700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp299.700,00	Rp700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp0,00	Rp299.700,00	Rp299.700,00	Rp700.000,00
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp990.000,00
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.920.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.920.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.920.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.920.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.920.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.920.000,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp209.755.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.966.099,00	Rp29.299.869,00	Rp160.265.968,00	Rp13.976.427,00	Rp1.144.607,00	Rp15.121.034,00	Rp175.387.002,00	Rp34.368.066,00
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp989.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	Rp359.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp989.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	Rp359.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp989.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	Rp359.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp989.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	Rp359.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp989.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	Rp359.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp989.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00	Rp359.100,00
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.346.427,00	Rp1.144.607,00	Rp14.491.034,00	Rp14.491.034,00	Rp34.008.966,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.346.427,00	Rp1.144.607,00	Rp14.491.034,00	Rp14.491.034,00	Rp34.008.966,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.346.427,00	Rp1.144.607,00	Rp14.491.034,00	Rp14.491.034,00	Rp34.008.966,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.346.427,00	Rp1.144.607,00	Rp14.491.034,00	Rp14.491.034,00	Rp34.008.966,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.346.427,00	Rp1.144.607,00	Rp14.491.034,00	Rp14.491.034,00	Rp34.008.966,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.095.277,00	Rp463.207,00	Rp5.558.484,00	Rp5.558.484,00	Rp2.441.516,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.689.650,00	Rp84.900,00	Rp1.774.550,00	Rp1.774.550,00	Rp725.450,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp38.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.561.500,00	Rp596.500,00	Rp7.158.000,00	Rp7.158.000,00	Rp30.842.000,00
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.966.099,00	Rp29.299.869,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.966.099,00	Rp29.299.869,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.966.099,00	Rp29.299.869,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.966.099,00	Rp29.299.869,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.265.968,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp147.834.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.865.879,00	Rp26.969.049,00	Rp147.834.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.834.928,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.965.610,00	Rp5.993.122,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.900.269,00	Rp20.975.927,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.876.196,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp12.431.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.100.220,00	Rp2.330.820,00	Rp12.431.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.431.040,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp6.332.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.145.075,00	Rp1.187.325,00	Rp6.332.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.332.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp345.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.488,00	Rp64.728,00	Rp345.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.216,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp431.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.610,00	Rp80.910,00	Rp431.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.520,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp5.321.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.324.047,00	Rp997.857,00	Rp5.321.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.321.904,00	Rp0,00
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp193.394.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.466.189,00	Rp13.022.164,00	Rp146.488.353,00	Rp27.119.205,00	Rp0,00	Rp27.119.205,00	Rp173.607.558,00	Rp19.786.918,00
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp101.191.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.610.910,00	Rp6.511.082,00	Rp76.121.992,00	Rp18.734.600,00	Rp0,00	Rp18.734.600,00	Rp94.856.592,00	Rp6.334.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp101.191.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.610.910,00	Rp6.511.082,00	Rp76.121.992,00	Rp18.734.600,00	Rp0,00	Rp18.734.600,00	Rp94.856.592,00	Rp6.334.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp101.191.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.610.910,00	Rp6.511.082,00	Rp76.121.992,00	Rp18.734.600,00	Rp0,00	Rp18.734.600,00	Rp94.856.592,00	Rp6.334.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp41.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp5.869.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp41.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp5.869.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp41.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.055.500,00	Rp5.869.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp41.266.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.555.410,00	Rp6.511.082,00	Rp40.066.492,00	Rp1.014.600,00	Rp0,00	Rp1.014.600,00	Rp41.081.092,00	Rp185.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp38.158.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.965.610,00	Rp5.993.122,00	Rp36.958.732,00	Rp1.014.600,00	Rp0,00	Rp1.014.600,00	Rp37.973.332,00	Rp185.400,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.965.610,00	Rp5.993.122,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.014.600,00	Rp0,00	Rp1.014.600,00	Rp1.014.600,00	Rp185.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp3.107.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.589.800,00	Rp517.960,00	Rp3.107.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.107.760,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.583.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.250,00	Rp263.850,00	Rp1.583.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.583.100,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp86.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.920,00	Rp14.384,00	Rp86.304,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.304,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.900,00	Rp17.980,00	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.880,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.330.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.108.730,00	Rp221.746,00	Rp1.330.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.330.476,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.720.000,00	Rp0,00	Rp17.720.000,00	Rp17.720.000,00	Rp280.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.720.000,00	Rp0,00	Rp17.720.000,00	Rp17.720.000,00	Rp280.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.720.000,00	Rp0,00	Rp17.720.000,00	Rp17.720.000,00	Rp280.000,00
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp1.885.000,00	Rp185.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp1.885.000,00	Rp185.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp1.885.000,00	Rp185.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp1.885.000,00	Rp185.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.885.000,00	Rp1.885.000,00	Rp185.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp485.000,00	Rp0,00	Rp485.000,00	Rp485.000,00	Rp125.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp1.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp60.000,00
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp90.132.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.855.279,00	Rp6.511.082,00	Rp70.366.361,00	Rp6.499.605,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp76.865.966,00	Rp13.267.018,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp90.132.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.855.279,00	Rp6.511.082,00	Rp70.366.361,00	Rp6.499.605,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp76.865.966,00	Rp13.267.018,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp90.132.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.855.279,00	Rp6.511.082,00	Rp70.366.361,00	Rp6.499.605,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp76.865.966,00	Rp13.267.018,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp6.499.605,00	Rp3.500.395,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp0,00	Rp6.499.605,00	Rp6.499.605,00	Rp3.500.395,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.958.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.776.555,00	Rp0,00	Rp1.776.555,00	Rp1.776.555,00	Rp181.945,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp8.041.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.723.050,00	Rp0,00	Rp4.723.050,00	Rp4.723.050,00	Rp3.318.450,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp80.132.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.855.279,00	Rp6.511.082,00	Rp70.366.361,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.366.361,00	Rp9.766.623,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp73.917.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.934.659,00	Rp5.993.122,00	Rp64.927.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.927.781,00	Rp8.989.683,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp73.917.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.934.659,00	Rp5.993.122,00	Rp64.927.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.927.781,00	Rp8.989.683,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp6.215.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.920.620,00	Rp517.960,00	Rp5.438.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.438.580,00	Rp776.940,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp3.166.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.506.575,00	Rp263.850,00	Rp2.770.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.770.425,00	Rp395.775,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp172.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.648,00	Rp14.384,00	Rp151.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.032,00	Rp21.576,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp215.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.810,00	Rp17.980,00	Rp188.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.790,00	Rp26.970,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp2.660.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.106.587,00	Rp221.746,00	Rp2.328.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.328.333,00	Rp332.619,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp4.399.123.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.605.374,00	Rp732.192.501,00	Rp3.820.797.875,00	Rp128.440.100,00	Rp57.036.919,00	Rp185.477.019,00	Rp4.006.274.894,00	Rp392.848.408,00
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp4.399.123.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.605.374,00	Rp732.192.501,00	Rp3.820.797.875,00	Rp128.440.100,00	Rp57.036.919,00	Rp185.477.019,00	Rp4.006.274.894,00	Rp392.848.408,00
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp4.399.123.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.605.374,00	Rp732.192.501,00	Rp3.820.797.875,00	Rp128.440.100,00	Rp57.036.919,00	Rp185.477.019,00	Rp4.006.274.894,00	Rp392.848.408,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.399.123.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.605.374,00	Rp732.192.501,00	Rp3.820.797.875,00	Rp128.440.100,00	Rp57.036.919,00	Rp185.477.019,00	Rp4.006.274.894,00	Rp392.848.408,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.399.123.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.605.374,00	Rp732.192.501,00	Rp3.820.797.875,00	Rp128.440.100,00	Rp57.036.919,00	Rp185.477.019,00	Rp4.006.274.894,00	Rp392.848.408,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp937.558.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.615.333,00	Rp158.955.050,00	Rp850.570.383,00	Rp48.990.900,00	Rp3.676.919,00	Rp52.667.819,00	Rp903.238.202,00	Rp34.320.198,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp937.558.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.615.333,00	Rp158.955.050,00	Rp850.570.383,00	Rp48.990.900,00	Rp3.676.919,00	Rp52.667.819,00	Rp903.238.202,00	Rp34.320.198,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.335.000,00	Rp0,00	Rp21.335.000,00	Rp3.904.000,00	Rp0,00	Rp3.904.000,00	Rp25.239.000,00	Rp5.061.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.235.370,00	Rp47.155.050,00	Rp198.390.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.390.420,00	Rp11.609.580,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp22.524.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.160.823,00	Rp0,00	Rp16.160.823,00	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp5.625.000,00	Rp21.785.823,00	Rp738.177,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp23.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.875.000,00	Rp0,00	Rp21.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.875.000,00	Rp1.175.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp19.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.487.500,00	Rp3.676.919,00	Rp16.164.419,00	Rp16.164.419,00	Rp3.763.581,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.386.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp866.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp12.486.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.800.000,00	Rp1.686.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp200.633.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.916.340,00	Rp0,00	Rp187.916.340,00	Rp12.254.400,00	Rp0,00	Rp12.254.400,00	Rp200.170.740,00	Rp462.860,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp416.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.292.800,00	Rp111.800.000,00	Rp394.092.800,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp407.292.800,00	Rp8.957.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.085.586.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.194.490.041,00	Rp550.737.451,00	Rp2.745.227.492,00	Rp7.608.000,00	Rp2.000.000,00	Rp9.608.000,00	Rp2.754.835.492,00	Rp330.751.410,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.774.024.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.933.967.781,00	Rp531.606.561,00	Rp2.465.574.342,00	Rp2.700.000,00	Rp2.000.000,00	Rp4.700.000,00	Rp2.470.274.342,00	Rp303.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp773.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.700.000,00	Rp92.100.000,00	Rp657.800.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp660.500.000,00	Rp112.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp1.560.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.230.400.000,00	Rp202.400.000,00	Rp1.432.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.432.800.000,00	Rp127.200.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp81.965.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.965.610,00	Rp50.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.962.171,00	Rp2.996.561,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.958.732,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.170.000,00	Rp174.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.170.000,00	Rp830.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.940.000,00	Rp59.940.000,00	Rp119.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.880.000,00	Rp120.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp150.996.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.522.260,00	Rp19.130.890,00	Rp126.653.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.653.150,00	Rp24.343.410,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp82.057.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.442.775,00	Rp10.422.075,00	Rp68.864.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.864.850,00	Rp13.192.500,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp3.902.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.778.088,00	Rp492.952,00	Rp3.271.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.271.040,00	Rp631.184,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.877.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.472.610,00	Rp616.190,00	Rp4.088.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.088.800,00	Rp788.980,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp60.159.206,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.828.787,00	Rp7.599.673,00	Rp50.428.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.428.460,00	Rp9.730.746,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp5.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.658.000,00	Rp0,00	Rp2.658.000,00	Rp2.658.000,00	Rp2.658.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp5.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.658.000,00	Rp0,00	Rp2.658.000,00	Rp2.658.000,00	Rp2.658.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp155.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.000.000,00	Rp0,00	Rp153.000.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp155.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp153.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.000.000,00	Rp0,00	Rp153.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp375.978.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp225.000.000,00	Rp71.841.200,00	Rp51.360.000,00	Rp123.201.200,00	Rp348.201.200,00	Rp27.776.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp375.978.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp225.000.000,00	Rp71.841.200,00	Rp51.360.000,00	Rp123.201.200,00	Rp348.201.200,00	Rp27.776.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp150.978.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.841.200,00	Rp51.360.000,00	Rp123.201.200,00	Rp123.201.200,00	Rp27.776.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp23.029.940.683,00	Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp6.440.385.943,00	Rp1.460.241.303,61	Rp7.900.627.246,61	Rp941.742.010,00	Rp119.800.724,00	Rp1.061.542.734,00	Rp21.169.609.316,61	Rp1.860.331.366,39
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.427.659,00	Rp113.714.351,00	Rp944.142.010,00	Rp944.142.010,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp6.440.385.943,00	Rp1.492.519.008,61	Rp7.932.904.951,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.140.344.287,61	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp230.754.193,00	Rp21.103.050,00	Rp251.857.243,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.857.243,00	Rp0,00
2. Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp279.258.984,00	Rp27.033.830,00	Rp306.292.814,00	Rp126.252.225,00	Rp19.788.750,00	Rp146.040.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.333.789,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp7.365.731,00	Rp739.674,00	Rp8.105.405,00	Rp6.474.776,00	Rp1.003.584,00	Rp7.478.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.583.765,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp22.097.011,00	Rp2.218.996,00	Rp24.316.007,00	Rp8.093.470,00	Rp1.254.480,00	Rp9.347.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.663.957,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp67.031.487,00	Rp6.758.459,00	Rp73.789.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.789.946,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.817.509,00	Rp15.471.656,00	Rp115.289.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.289.165,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp606.507.406,00	Rp57.854.009,00	Rp664.361.415,00	Rp240.637.980,00	Rp37.518.470,00	Rp278.156.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp935.034.530,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.025.151,00	Rp74.975.449,00	Rp168.000.600,00	Rp6.614.384,00	Rp0,00	Rp6.614.384,00	Rp174.614.984,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.281.792,00	Rp4.434.290,00	Rp16.716.082,00	Rp1.055.274,00	Rp0,00	Rp1.055.274,00	Rp17.771.356,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp733.297.439,00	Rp7.511.111,00	Rp740.808.550,00	Rp50.176.332,00	Rp4.747.500,00	Rp54.923.832,00	Rp1.305.000,00	Rp345.000,00	Rp1.650.000,00	Rp797.382.382,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.111.086,00	Rp5.838.198,00	Rp15.949.284,00	Rp275.900,00	Rp6.400,00	Rp282.300,00	Rp16.231.584,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.422.272,00	Rp4.059.087,00	Rp5.481.359,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.481.359,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp733.297.439,00	Rp7.511.111,00	Rp740.808.550,00	Rp167.016.633,00	Rp94.054.524,00	Rp261.071.157,00	Rp9.250.558,00	Rp351.400,00	Rp9.601.958,00	Rp1.011.481.665,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp6.440.385.943,00	Rp1.492.519.008,61	Rp7.932.904.951,61	Rp950.427.659,00	Rp113.714.351,00	Rp1.064.142.010,00	Rp21.204.486.297,61	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp944.142.010,00	Rp119.800.724,00	Rp1.063.942.734,00	Rp1.063.942.734,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp6.440.385.943,00	Rp1.492.519.008,61	Rp7.932.904.951,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.140.344.287,61	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp230.754.193,00	Rp21.103.050,00	Rp251.857.243,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.857.243,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp279.258.984,00	Rp27.033.830,00	Rp306.292.814,00	Rp126.252.225,00	Rp19.788.750,00	Rp146.040.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.333.789,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp7.365.731,00	Rp739.674,00	Rp8.105.405,00	Rp6.474.776,00	Rp1.003.584,00	Rp7.478.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.583.765,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp22.097.011,00	Rp2.218.996,00	Rp24.316.007,00	Rp8.093.470,00	Rp1.254.480,00	Rp9.347.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.663.957,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp67.031.487,00	Rp6.758.459,00	Rp73.789.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.789.946,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.817.509,00	Rp15.471.656,00	Rp115.289.165,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.289.165,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp606.507.406,00	Rp57.854.009,00	Rp664.361.415,00	Rp240.637.980,00	Rp37.518.470,00	Rp278.156.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp935.034.530,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.025.151,00	Rp74.975.449,00	Rp168.000.600,00	Rp6.614.384,00	Rp0,00	Rp6.614.384,00	Rp174.614.984,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.281.792,00	Rp4.434.290,00	Rp16.716.082,00	Rp1.055.274,00	Rp0,00	Rp1.055.274,00	Rp17.771.356,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp733.297.439,00	Rp7.511.111,00	Rp740.808.550,00	Rp50.176.332,00	Rp4.747.500,00	Rp54.923.832,00	Rp1.305.000,00	Rp345.000,00	Rp1.650.000,00	Rp797.382.382,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.111.086,00	Rp5.838.198,00	Rp15.949.284,00	Rp275.900,00	Rp6.400,00	Rp282.300,00	Rp16.231.584,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.422.272,00	Rp4.059.087,00	Rp5.481.359,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.481.359,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp733.297.439,00	Rp7.511.111,00	Rp740.808.550,00	Rp167.016.633,00	Rp94.054.524,00	Rp261.071.157,00	Rp9.250.558,00	Rp351.400,00	Rp9.601.958,00	Rp1.011.481.665,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp934.891.452,00	Rp119.449.324,00	Rp1.054.340.776,00	Rp1.054.340.776,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp9.981.700.708,00	Rp820.568.663,00	Rp10.802.269.371,00	Rp6.032.731.330,00	Rp1.360.946.014,61	Rp7.393.677.344,61	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.195.946.715,61	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.277.705,00	Rp32.277.705,00	Rp2.400.000,00	Rp199.276,00	Rp2.599.276,00	Rp34.876.981,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
JUMLAH PENGELUARAN			Rp11.321.505.553,00	Rp885.933.783,00	Rp12.207.439.336,00	Rp6.440.385.943,00	Rp1.492.519.008,61	Rp7.932.904.951,61	Rp944.142.010,00	Rp119.800.724,00	Rp1.063.942.734,00	Rp21.204.287.021,61	Rp0,00
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.285.649,00	Rp6.285.649,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.285.649,00	Rp6.285.649,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGUNA ANGGARAN

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

TRI ARYA DHYANA KUBONTUBUH, SE. M.SI.
NIP: 196905101996031007

FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, S.Ak.
NIP. 199908022021021001

LAMPIRAN III

Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor : B.17.900/ 131 /SET/DISKOP.UKM

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Petugas Akuntansi OPD dengan Petugas Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Petugas Akuntansi OPD menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2025
2. Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2025
3. Laporan Penutupan Kas tanggal 31 Desember Tahun 2025
4. Rekening Koran tanggal 29 Bulan Desember Tahun 2025

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam *Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)* ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD.

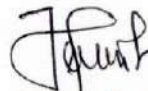
Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali



Kadek Rosita Dewi, SE
NIP. 19890312 201101 2 006

Urusan Akuntansi
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali,



Ni Nyoman Teniari, SH
NIP. 19760403 200701 2 015

Mengetahui / Mengesahkan

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali,



I Putu Sudano, S.E., M.A.P
NIP. 19740201 199603 1 001

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali,



Ni Luh Made Mawar, S.Sos., M.A.P
NIP. 19730803 199303 2 004

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : B.25.900/ 215 /SET/DisKopUKM

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fridolin Raja Samuel Manurung,A.Md.Ak
NIP : 19990802 202102 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** ;
Nama : Ni Nyoman Teniari,SH
NIP : 19760403 200701 2 015
Jabatan : Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua** ;

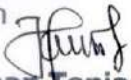
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah melakukan rekonsiliasi terhadap belanja dengan mencocokkan Realisasi Belanja yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan bukti-bukti dengan Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan SIPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali untuk periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Rekonsiliasi Belanja

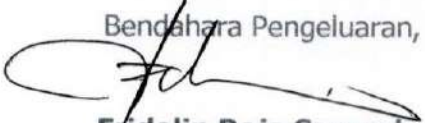
No	Kode Rekening	Uraian	Menurut Bendahara Pengeluaran	Menurut Urusan Akuntansi	Keterangan
	5	BELANJA DAERAH	21.169.609.316,61	21.169.609.316,61	
	5.1	Belanja Operasi	20.272.336.388,00	20.272.336.388,00	
	5.1.01	Belanja Pegawai	12.157.539.336,00	12.157.539.336,00	
	5.1.02	Belanja Barang Jasa	8.105.797.052,00	8.105.797.052,00	
	5.1.04	Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	
	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	5.2.	Belanja Modal	897.272.928,61	897.272.928,61	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

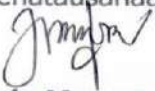
Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan


Ni Nyoman Teniari,SH
NIP.19760403 200701 2 015

Bendahara Pengeluaran,


**Fridolin Raja Samuel
Manurung,A.Md.Ak**
Nip. 19990802 202102 1 001

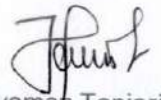
Mengetahui,
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Ni Luh Made Mawar, S.Sos.,M.AP
Pembina
NIP.19730803 199303 2 004

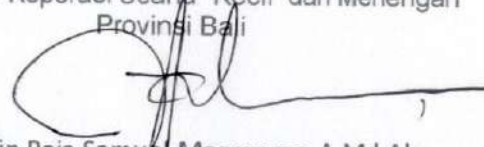
PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No. urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Pengeluaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Kas Bendahara	-	-	Sesuai
	5	BELANJA DAERAH	21.169.609.316,61	21.169.609.316,61	Sesuai
	5.1	BELANJA OPERASIONAL	20.272.336.388,00	20.272.336.388,00	Sesuai
	5.1.01	Belanja Pegawai	12.157.539.336,00	12.157.539.336,00	Sesuai
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.105.797.052,00	8.105.797.052,00	Sesuai
	5.1.04	Belanja Subsidi	9.000.000,00	9.000.000,00	Sesuai
	5.1.05	Belanja Hibah	0	-	Sesuai
	5.2	Belanja Modal	897.272.928,61	897.272.928,61	Sesuai
		Jumlah :	21.169.609.316,61	21.169.609.316,61	Sesuai

Denpasar 6 Januari 2026
 Petugas Akuntansi
 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Provinsi Bali


 Ni Nyoman Teniari,SH
 Nip. 19760403 200701 2 015

Bendahara Pengeluaran
 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Provinsi Bali


 Fridolin Raja Samuel Manurung, A.Md.Ak.
 Nip. 19990802 202102 1 001

LAMPIRAN IV



PEMERINTAH PROVINSI BALI
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2025

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
U P B : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	20.057.646.594,30
1	TANAH	4.553.815.000,00
1.01	TANAH	4.553.815.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	6.182.228.989,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.001.379.000,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3.100.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.599.795.889,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	465.185.500,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	11.902.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	1.100.866.600,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.965.554.653,61
3.01	BANGUNAN GEDUNG	8.965.554.653,61
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	264.662.691,69
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	2.936.650,00
4.03	INSTALASI	261.726.041,69
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	11.573.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	11.573.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	79.812.260,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	79.812.260,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
U P B : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI



පිම්බුරු ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිසිම ආකාරයකින් කුඩා සහ මධ්‍යම ව්‍යවසාය

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ආයතනික සහ ස්වයංපෝෂිත කුඩා ව්‍යවසාය - පාලන (19700817) / කුඩා ව්‍යවසාය (19760403) / කුඩා ව්‍යවසාය

Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225081

Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

NOMOR : B.17.000.2.3.2/35/SET/DISKOP.UKM

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali , yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : Sudarmin, S.H
NIP : 19700817 200701 1 054
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b)
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama : Ni Nyoman Teniari, S.H
NIP : 19760403 200701 2 015
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b)
Jabatan : Pelaksana Akuntansi
Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Neraca per 31 Desember dengan hasil sebagaimana dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

PIHAK KEDUA

Ni Nyoman Teniari, S.H

NIP. 19760403 200701 2 015

PIHAK PERTAMA

Sudarmin, S.H

NIP. 19700817 200701 1 054

Mengetahui

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Bali

Sekretaris



Ketut Meniana, SSTP., M.Si

NIP. 19780712 199802 1 001

SEMESTER II TAHUN 2025

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No urut	Jenis	Kode Objek	Nama Objek Barang	Saldo Awal Penyusutan / Amortisasi	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					Saldo Akhir
					Beban Penyusutan / Amortisasi		Reklasifikasi		Penghapusan	Reklasifikasi		Koreksi Pencatatan Saldo Awal	Mutasi Antar Perangkat Daerah		
					Semester I	Semester II	Dari Akm. Peny. Aset Tetap	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan		Ke Aset Tetap	Antar Aset Tetap Tahun Berjalan				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.1	Benda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	ASSET TIDAK BERWUJUD (AMORTISASI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	3	ASSET LAIN-LAIN	-	-	-	297.648.975,00	-	297.648.975,00	-	-	-	-	-	
2	3.1	3.1	Aset Tetap Beselek Besar	-	-	-	297.648.975,00	-	297.648.975,00	-	-	-	-	-	
			PERALATAN KANTOR BESAR	-	-	-	297.648.975,00	-	297.648.975,00	-	-	-	-	-	
		01	a. Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02	b. Alat Angkutan	-	-	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	-	-	-	-	
		03	c. Alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	d. Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05	e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	-	-	-	109.987.075,00	-	109.987.075,00	-	-	-	-	-	
		06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-	-	31.300.000,00	-	31.300.000,00	-	-	-	-	-	
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08	h. Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		09	i. Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10	j. Komputer	-	-	-	153.761.900,00	-	153.761.900,00	-	-	-	-	-	
		11	k. Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		12	l. Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		15	o. Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		16	p. Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17	q. Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18	r. Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

Daftar Belanja Modal Peralatan Mesin

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Satuan	Harga Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2									
2	2									
2	2									
		1.3.2.05.002.006.002	Televisi	13/05/2025	1	21.506.250	21.506.250	Pembelian	BAST No. B38.000.3/23215/P2PA/BPBJEK	13/05/2025
		1.3.2.05.002.004.004	A.C Split 2 PK	04/06/2025	5	10.345.200	51.726.000	Pembelian	BAST No. B38.000.3/28022/P2PA/BPBJEK	04/06/2025
		1.3.2.05.002.004.004	A.C Split 1 PK	04/06/2025	4	7.193.910	28.775.640	Pembelian	BAST No. B38.000.3/28022/P2PA/BPBJEK	04/06/2025
		1.3.2.05.003.003.004	Kursi kerja Pelabab Eselon	15/07/2025	1	8.250.000	8.250.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/1963/SET/DISKOP.UKM	15/07/2025
		1.3.2.05.001.005.053	Layar LCD Proyektor	15/07/2025	1	4.750.000	4.750.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/1964/SET/DISKOP.UKM	15/07/2025
		1.3.2.05.002.003.003	Mesin Polong Rumpun	11/07/2025	1	4.999.999	4.999.999	Pembelian	BAST No.17.000.3/1930/SET/DISKOP.UKM	11/07/2025
2	2						199.523.500			
		1.3.2.06.001.006.001	Alat studio lainnya	02/12/2025	1	29.803.500	29.803.500	Pembelian	BAST No.17.000.3/3273/SET/DISKOP.UKM	02/12/2025
		1.3.2.06.001.002.126	Camera + Tripod (Digital)	13/11/2025	1	40.000.000	40.000.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/3120/SET/DISKOP.UKM	13/11/2025
		1.3.2.06.001.002.130	Video Coverence	02/12/2025	2	38.739.000	77.478.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/3274/SET/DISKOP.UKM	02/12/2025
		1.3.2.05.002.006.008	Sound System	26/11/2025	1	24.198.000	24.198.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/3222/SET/DISKOP.UKM	26/11/2025
		1.3.2.05.002.006.008	Sound System	12/12/2025	1	28.050.000	28.050.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/3360/SET/DISKOP.UKM	12/12/2025
2	2						300.756.640			
		1.3.2.10.001.002.001	Komputer	03/06/2025	9	17.182.800	154.645.200	Pembelian	BAST No. B38.000.3/27654/P2PA/BPBJEK	03/06/2025
		1.3.2.10.001.002.002	Laptop	08/07/2025	7	19.314.000	135.198.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/1894/SET/DISKOP.UKM	08/07/2025
		1.3.2.10.002.004.023	Access Point	02/12/2025	2	6382500	12.765.000	Pembelian	BAST No.17.000.3/3263/SET/DISKOP.UKM	02/12/2025
		1.3.2.05.001.005.043	Proyektor	16/05/2025	1	7.148.400	7.148.400	Pembelian	BAST No. B38.000.3/22026/P2PA/BPBJEK	16/05/2025
			Jumlah				629.293.989			

Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Jml	Harga Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen	Alamat Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3						28.895.722,24				
			Bangunan Gedung	23/12/2025	1	28.895.722,24	28.895.722,24	Pembelian	BAST NO. B.17.000.3.2/3446/SET/DISKOP.UKM	23/12/2025	Jln. W.R. Supratman No 71 Denpasar
			Bangunan Gedung	23/12/2025	1	199.615.169,37	199.615.169,37	Pembelian	BAST NO. B.17.000.3.2/3448/SET/DISKOP.UKM	23/12/2025	Jln. W.R. Supratman No 71 Denpasar
			Bangunan Gedung	24/07/2025	1	39.468.048,00	39.468.048,00	Pembelian	BAST NO. B.17.000.3.2/2056/SET/DISKOP.UKM	24/07/2025	Jln. W.R. Supratman No 71 Denpasar
							-				
							-				
	3										
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-				
							-		</		

Lampiran 67

Daftar Pengurangan Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan Peralatan Mesin

No	Gol	Kode Bidang Barang	Jenis Barang (per Golongan)	Tanggal Perolehan	Satuan	Harga Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Asal Usul	Dokumen	Tanggal Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	1					-			
							-			
							-			
2	2	2					-			
							-			
							-			
2	2	3					-			
							-			
							-			
2	2	4					-			
							-			
							-			
2	2	5					-			
							-			
							-			
2	2	6					52.248.000			
		1.3.2.05.002.00	Sound System	26/11/2025	1	24.198.000	24.198.000	Pembelian	BA.NO.17.000.2.3.2/3524/SET/DISKOP/UKM	31/12/2025
		1.3.2.05.002.00	Sound System	12/12/2025	1	28.050.000	28.050.000	Pembelian	BA.NO.17.000.2.3.2/3524/SET/DISKOP/UKM	31/12/2025
							-			
2	2	7					-			
							-			
							-			
2	2	10					7.148.400			
		1.3.2.05.001.00	Proyektor	16/05/2025	1	7.148.400	7.148.400	Pembelian	BA.NO.17.000.2.3.2/3524/SET/DISKOP/UKM	31/12/2025
							-			
			Jumlah				59.396.400			

LAMPIRAN V

REKENING KORAN GIRO
Periode : 01-Dec-2025 s/d 31-Dec-2025

Di Cetak oleh :1156 - FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG via Windows / Chrome-143.0.0.0 / 103.110.184.160 / 29-12-2025 12:53

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi		Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya		6.285.649,00				
05/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000374/GU/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 0100000001	O13190217	113.714.351,00	Kr	120.000.000,00	O1319	010
05/12/2025	458	TELKOM 0361729253	IBB3142119	341.880,00	Db	119.658.120,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	F TELKOM 0361729253	IBB3142119	2.000,00	Db	119.656.120,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	DPS 050490018690	0003143002	487.975,00	Db	119.168.145,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	F DPS 050490018690	0003143002	2.000,00	Db	119.166.145,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	DPS 050220000148	0003142733	317.875,00	Db	118.848.270,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	F DPS 050220000148	0003142733	2.000,00	Db	118.846.270,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	TELKOM 0361225091	IBB3142164	37.407,00	Db	118.808.863,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	F TELKOM 0361225091	IBB3142164	2.000,00	Db	118.806.863,00	IBBIS	010
05/12/2025	471	MPN 041511630456835	IBB3162205	170.000,00	Db	118.636.863,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	TELKOM 0361226548	IBB3142072	248.307,00	Db	118.388.556,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	F TELKOM 0361226548	IBB3142072	2.000,00	Db	118.386.556,00	IBBIS	010
05/12/2025	410	TRF KE 129 0490202026459 I PUTU GATOT ADIPRANA VIA INTERNET BANKING	IBB3164372	665.000,00	Db	117.721.556,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	DPS 030800003008	0003142795	83.700,00	Db	117.637.856,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	F_DPS_030800003008	0003142795	2.000,00	Db	117.635.856,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	DPS 050250005606	0003142926	131.000,00	Db	117.504.856,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	F DPS 050250005606	0003142926	2.000,00	Db	117.502.856,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	TELKOM 0361224557	IBB3142208	31.857,00	Db	117.470.999,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	F TELKOM 0361224557	IBB3142208	2.000,00	Db	117.468.999,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	TELKOM 03614781528	IBB3142323	427.350,00	Db	117.041.649,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	F TELKOM 03614781528	IBB3142323	2.000,00	Db	117.039.649,00	IBBIS	010
05/12/2025	420	TKLKPP 0195400464323	IBB3156288	420.000,00	Db	116.619.649,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	DPS 080260000152	0003143105	82.900,00	Db	116.536.749,00	IBBIS	010
05/12/2025	474	F DPS 080260000152	0003143105	2.000,00	Db	116.534.749,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	TELKOM 0361237732	IBB3142254	31.857,00	Db	116.502.892,00	IBBIS	010
05/12/2025	458	F TELKOM 0361237732	IBB3142254	2.000,00	Db	116.500.892,00	IBBIS	010
05/12/2025	420	TKLKPP 0195400464355	IBB3156557	2.195.397,00	Db	114.305.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	TRF KE 002 790601002583534 I MADE SUKAYANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJA	0129324542	871.000,00	Db	113.434.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	FEE TRF KE 002 790601002583534 I MADE SUKAYANA VIA INTERNET BANKING (AR	0129324542	6.500,00	Db	113.427.995,00	IBBIS	010

05/12/2025	200	TRF KE 008 1450013594177 PUTU HANDARA WIDYA P VIA INTERNET BANKING (AR	0129324572	871.000,00	Db	112.556.995,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1450013594177 PUTU HANDARA WIDYA P VIA INTERNET BANKING	0129324572	6.500,00	Db	112.550.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	TRF KE 014 6110485512 MADE PRAMADANA JEGER VIA INTERNET BANKING (PRIM	0129324631	871.000,00	Db	111.679.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	FEE TRF KE 014 6110485512 MADE PRAMADANA JEGER VIA INTERNET BANKING (I	0129324631	6.500,00	Db	111.672.995,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	TRF KE 014 6110500040 NI PUTU ARIE UTAMI ST VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129324677	871.000,00	Db	110.801.995,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	FEE TRF KE 014 6110500040 NI PUTU ARIE UTAMI ST VIA INTERNET BANKING (PRI	0129324677	6.500,00	Db	110.795.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	TRF KE 014 7730566535 I WAYAN ALGI SAPUTRA VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129324723	871.000,00	Db	109.924.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	FEE TRF KE 014 7730566535 I WAYAN ALGI SAPUTRA VIA INTERNET BANKING (PR	0129324723	6.500,00	Db	109.917.995,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	TRF KE 022 4700121880189 IDA BAGUS WIDYA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA	0129324759	871.000,00	Db	109.046.995,00	IBBIS	010
05/12/2025	200	FEE TRF KE 022 4700121880189 IDA BAGUS WIDYA VIA INTERNET BANKING (ARTA	0129324759	6.500,00	Db	109.040.495,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	PLNPOS 551000688819	0003147896	1.563.568,00	Db	107.476.927,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	F PLNPOS 551000688819	0003147896	2.500,00	Db	107.474.427,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	PLNPOS 551000583053	0003148240	419.541,00	Db	107.054.886,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	F PLNPOS 551000583053	0003148240	2.500,00	Db	107.052.386,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	PLNPOS 551004047598	0003148318	2.403.135,00	Db	104.649.251,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	F PLNPOS 551004047598	0003148318	2.500,00	Db	104.646.751,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	PLNPOS 551001732803	0003148434	3.512.929,00	Db	101.133.822,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	F PLNPOS 551001732803	0003148434	2.500,00	Db	101.131.322,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	PLNPOS 551000688429	0003148517	594.000,00	Db	100.537.322,00	IBBIS	010
05/12/2025	491	F PLNPOS 551000688429	0003148517	2.500,00	Db	100.534.822,00	IBBIS	010
08/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000376/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 01000000010	O13190635	9.766.623,00	Kr	110.301.445,00	O1319	010
08/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000375/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 01000000010	O13190636	16.000.000,00	Kr	126.301.445,00	O1319	010
09/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING PENGEMBA	IBB3646128	16.000.000,00	Db	110.301.445,00	IBBIS	010
09/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING PENGEMBA	IBB3646284	9.766.623,00	Db	100.534.822,00	IBBIS	010
09/12/2025	420	TKLKPP 0195400477088	IBB3652329	3.676.919,00	Db	96.857.903,00	IBBIS	010
10/12/2025	420	TKLKPP 0195400484995	IBB3793569	9.664.791,00	Db	87.193.112,00	IBBIS	010
10/12/2025	420	TKLKPP 0195400485012	IBB3793805	3.520.000,00	Db	83.673.112,00	IBBIS	010
10/12/2025	815	SSTBVA 011012254118	IBB3793150	117.600,00	Db	83.555.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	420	TKLKPP 0195400484981	IBB3793352	9.823.500,00	Db	73.732.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0500202054911 I MADE YOGA DARMA PUTRA VIA INTERNET BANKING	IBB3819338	480.000,00	Db	73.252.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100205564893 I DEWA GEDE KAMAJAYA VIA INTERNET BANKING 1.92	IBB3819343	480.000,00	Db	72.772.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100215061588 I GEDE SUKADANA VIA INTERNET BANKING 1.920.000	IBB3819355	480.000,00	Db	72.292.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100215117211 I WAYAN ASTA APRIADI VIA INTERNET BANKING 1.920.	IBB3819358	480.000,00	Db	71.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100205062114 NI WAYAN MULIANINGSIH VIA INTERNET BANKING 2.90	IBB3819598	200.000,00	Db	71.612.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0340212025296 AA BAGUS SURYA WIDYA NUGRAHA VIA INTERNET BA	IBB3819612	100.000,00	Db	71.512.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100202034250 NI LUH MADE SUGI PARWATI VIA INTERNET BANKING 2	IBB3819621	100.000,00	Db	71.412.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0450202356503 NI LUH JULIANI VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819633	100.000,00	Db	71.312.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0450205007622 I PUTU ARTADANA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819646	100.000,00	Db	71.212.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100205601536 KADEK SUARNATHA PUCANGAN VIA INTERNET BANKI	IBB3819661	100.000,00	Db	71.112.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0400202407671 IDA AYU GEDE TRISNAYANTI VIA INTERNET BANKING 2	IBB3819668	100.000,00	Db	71.012.012,00	IBBIS	010

10/12/2025	410	TRF KE 129 0260202072994 SAGUNG PUTU MIRAH LARASATI VIA INTERNET BANKI	IBB3819675	100.000,00	Db	70.912.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0520205000332 KOMANG AYU MIA SAWITRI VIA INTERNET BANKING 2.	IBB3819681	100.000,00	Db	70.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0320202196053 RISSA OKTIVA WINANDA VIA INTERNET BANKING 2.900	IBB3819684	100.000,00	Db	70.712.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0340202193318 YULIANA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819687	100.000,00	Db	70.612.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0400202310815 ASTUTI VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819695	100.000,00	Db	70.512.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0120202368750 I WAYAN WISNAWA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819698	100.000,00	Db	70.412.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0540215002774 NI LUH PUTU SRI UTARINI VIA INTERNET BANKING 2.90	IBB3819703	100.000,00	Db	70.312.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0550215000418 I WAYAN SUJAYA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819708	100.000,00	Db	70.212.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0450202318411 I KETUT ASTAWA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819716	100.000,00	Db	70.112.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100202413158 ANAK AGUNG SRI MAHYUNI VIA INTERNET BANKING 2.	IBB3819720	100.000,00	Db	70.012.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0110222039406 I WAYAN RUDITA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819725	100.000,00	Db	69.912.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0270202873950 NI WAYAN KARIATI VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819733	100.000,00	Db	69.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100225003819 NI WAYAN SIRAMIATI VIA INTERNET BANKING 2.900.00	IBB3819750	100.000,00	Db	69.712.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0090202624589 I GDE SUWARTA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819762	100.000,00	Db	69.612.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0440202413267 I WAYAN SUPADA VIA INTERNET BANKING 2.900.000	IBB3819769	100.000,00	Db	69.512.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0120202175013 I GUSTI NGURAH NYOMAN WINDHUPA VIA INTERNET B	IBB3819780	100.000,00	Db	69.412.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0290202095268 I WAYAN GEDE SUTEJA VIA INTERNET BANKING 2.900	IBB3819787	100.000,00	Db	69.312.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0090202311248 I PUTU GDE RAMA WARTIKA VIA INTERNET BANKING 2	IBB3819802	100.000,00	Db	69.212.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0090202687830 I MADE WIRATAYOGA JUADA VIA INTERNET BANKING	IBB3819808	100.000,00	Db	69.112.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0090202666801 I WAYAN SUDIKARYA VIA INTERNET BANKING 2.900.00	IBB3819818	100.000,00	Db	69.012.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0180202293460 I GUSTI PUTU SWANDI VIA INTERNET BANKING 2.900.0	IBB3819823	100.000,00	Db	68.912.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 012401054634506 N SURADMAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129819939	93.500,00	Db	68.818.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 012401054634506 N SURADMAN VIA INTERNET BANKING (ARTAJA	0129819939	6.500,00	Db	68.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 024801038176504 NI PUTU SUANTARI VIA INTERNET BANKING (ARTAJA	0129819946	93.500,00	Db	68.718.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 024801038176504 NI PUTU SUANTARI VIA INTERNET BANKING (AR	0129819946	6.500,00	Db	68.712.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 036801008539532 NI WAYAN PUSPITASARI VIA INTERNET BANKING (A	0129819952	93.500,00	Db	68.618.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 036801008539532 NI WAYAN PUSPITASARI VIA INTERNET BANKIN	0129819952	6.500,00	Db	68.612.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 057501012358501 KETUT SUARDANA, SE.M VIA INTERNET BANKING (A	0129819957	93.500,00	Db	68.518.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 057501012358501 KETUT SUARDANA, SE.M VIA INTERNET BANKIN	0129819957	6.500,00	Db	68.512.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 098401031700532 EKAWATI NURBAYA VIA INTERNET BANKING (ARTAJ	0129819961	93.500,00	Db	68.418.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 098401031700532 EKAWATI NURBAYA VIA INTERNET BANKING (A	0129819961	6.500,00	Db	68.412.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 462901021011533 PUSPANI NI WAYAN,DRA VIA INTERNET BANKING (A	0129819966	93.500,00	Db	68.318.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 462901021011533 PUSPANI NI WAYAN,DRA VIA INTERNET BANKIN	0129819966	6.500,00	Db	68.312.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 463801002291537 I KETUT ARDITA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA	0129819972	93.500,00	Db	68.218.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 463801002291537 I KETUT ARDITA VIA INTERNET BANKING (ARTA	0129819972	6.500,00	Db	68.212.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 465301005439538 DEWA GEDE LABIH VIA INTERNET BANKING (ARTAJA	0129819977	93.500,00	Db	68.118.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 465301005439538 DEWA GEDE LABIH VIA INTERNET BANKING (AR	0129819977	6.500,00	Db	68.112.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 465701009275534 I NYOMAN SUJANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJA	0129819984	93.500,00	Db	68.018.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 465701009275534 I NYOMAN SUJANA VIA INTERNET BANKING (AR	0129819984	6.500,00	Db	68.012.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 465801008988502 NI WAYAN NARDI VIA INTERNET BANKING (ARTAJAS	0129819996	93.500,00	Db	67.918.512,00	IBBIS	010

10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 465801008988502 NI WAYAN NARDI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129819996	6.500,00	Db	67.912.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 465801014416535 I MADE NGANU VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820003	93.500,00	Db	67.818.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 465801014416535 I MADE NGANU VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820003	6.500,00	Db	67.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 465901013979534 I DEWA GEDE DWI PERM VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820009	93.500,00	Db	67.718.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 465901013979534 I DEWA GEDE DWI PERM VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820009	6.500,00	Db	67.712.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 472101035622534 KOMANG MELASTRI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820016	93.500,00	Db	67.618.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 472101035622534 KOMANG MELASTRI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820016	6.500,00	Db	67.612.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 477501022924532 WAYAN SUKADANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820020	93.500,00	Db	67.518.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 477501022924532 WAYAN SUKADANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820020	6.500,00	Db	67.512.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 477701014924538 KETUT SUKALAKSANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820028	93.500,00	Db	67.418.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 477701014924538 KETUT SUKALAKSANA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820028	6.500,00	Db	67.412.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 002 478601022532536 I WAYAN SUKADA S PT VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820033	93.500,00	Db	67.318.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 002 478601022532536 I WAYAN SUKADA S PT VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820033	6.500,00	Db	67.312.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 008 1300017001549 LUH CHINTYA GRYA PER VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820038	93.500,00	Db	67.218.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1300017001549 LUH CHINTYA GRYA PER VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820038	6.500,00	Db	67.212.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 008 1410012919767 KETUT WITARA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820042	93.500,00	Db	67.118.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1410012919767 KETUT WITARA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820042	6.500,00	Db	67.112.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 008 1450015475557 I PUTU SUTARKA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820047	93.500,00	Db	67.018.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1450015475557 I PUTU SUTARKA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820047	6.500,00	Db	67.012.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 008 1750002431699 I MADE SUGIARTA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820054	93.500,00	Db	66.918.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1750002431699 I MADE SUGIARTA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820054	6.500,00	Db	66.912.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 008 1750003843983 NI NYOMAN PEBI SURYA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820059	93.500,00	Db	66.818.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 008 1750003843983 NI NYOMAN PEBI SURYA VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820059	6.500,00	Db	66.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 009 1922049758 SDRI AFIDA AULIA SETYAWATI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820065	93.500,00	Db	66.718.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 009 1922049758 SDRI AFIDA AULIA SETYAWATI VIA INTERNET BANKING (ARTAJASA)	0129820065	6.500,00	Db	66.712.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 009 715780089 SDR JOGI VIERY MARATUR SIANTUR VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820074	93.500,00	Db	66.618.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 009 715780089 SDR JOGI VIERY MARATUR SIANTUR VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820074	6.500,00	Db	66.612.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 1420155987 NI LUH GEDE ARIKA EVAYAN VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820081	93.500,00	Db	66.518.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 1420155987 NI LUH GEDE ARIKA EVAYAN VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820081	6.500,00	Db	66.512.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 1420782507 PUTU GISKA ARI KUSUMADEW VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820087	93.500,00	Db	66.418.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 1420782507 PUTU GISKA ARI KUSUMADEW VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820087	6.500,00	Db	66.412.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 5220536698 LEO AGUNG PURI BOWO LAKS VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820096	93.500,00	Db	66.318.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 5220536698 LEO AGUNG PURI BOWO LAKS VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820096	6.500,00	Db	66.312.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 6110563386 PUTU INDAH WAHYUNI VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820103	93.500,00	Db	66.218.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 6110563386 PUTU INDAH WAHYUNI VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820103	6.500,00	Db	66.212.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 7725114931 NI LUH PUTU PITRI PUSPIT VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820108	93.500,00	Db	66.118.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 7725114931 NI LUH PUTU PITRI PUSPIT VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820108	6.500,00	Db	66.112.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 7730939919 KADEK AYU INTAN ASTRIYAN VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820113	93.500,00	Db	66.018.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 7730939919 KADEK AYU INTAN ASTRIYAN VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820113	6.500,00	Db	66.012.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 014 8050307434 TANTIORINARDI VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820119	93.500,00	Db	65.918.512,00	IBBIS	010

10/12/2025	200	FEE TRF KE 014 8050307434 TANTIORINARDI VIA INTERNET BANKING (PRIMA)	0129820119	6.500,00	Db	65.912.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	TRF KE 535 901622952461 ANAK AGUNG MANIK BAJRA DANTA VIA INTERNET BAN	0129820129	93.500,00	Db	65.818.512,00	IBBIS	010
10/12/2025	200	FEE TRF KE 535 901622952461 ANAK AGUNG MANIK BAJRA DANTA VIA INTERNET	0129820129	6.500,00	Db	65.812.012,00	IBBIS	010
10/12/2025	410	TRF KE 129 0100205038687 TRI ARYA DHYANA KUBONTUBUH VIA INTERNET BANK	IBB3877878	5.393.736,00	Db	60.418.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000377/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 01000000010	O15319752	3.255.541,00	Kr	63.673.817,00	O1531	010
12/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000378/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 DARI: 01000000010	O15319753	3.255.541,00	Kr	66.929.358,00	O1531	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING PENGEMBA	IBB4048837	3.255.541,00	Db	63.673.817,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING PENGEMBA	IBB4048697	3.255.541,00	Db	60.418.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215077367 I GEDE ARYA WIRAWAN VIA INTERNET BANKING 14.40	IBB4049781	1.920.000,00	Db	58.498.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100202510645 PUTU EKA SUWANDIKA VIA INTERNET BANKING 14.400	IBB4049793	960.000,00	Db	57.538.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0340202166510 ANAK AGUNG ISTRI TRI JAYANTI VIA INTERNET BANKI	IBB4049799	480.000,00	Db	57.058.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017928 NI WAYAN SUKANINGSIH LILI CAHY VIA INTERNET BAN	IBB4049807	1.440.000,00	Db	55.618.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205585378 NI NYOMAN JUNITRI SUARI VIA INTERNET BANKING 14	IBB4049815	1.440.000,00	Db	54.178.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017693 NI PUTU JUNITA LANTIKA VIA INTERNET BANKING 14.4	IBB4049827	960.000,00	Db	53.218.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017916 R A TRI BUANA TUNGGGA DEWI VIA INTERNET BANKING	IBB4049840	960.000,00	Db	52.258.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215091052 I DEWA GEDE EKA DHARMA YASA VIA INTERNET BANK	IBB4049853	480.000,00	Db	51.778.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0360205009020 NI KOMANG YUDHA ANGGUN CANDRA VIA INTERNET B	IBB4049861	480.000,00	Db	51.298.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215056698 IDA AYU GEDE SURYATHI VIA INTERNET BANKING 14.4	IBB4049867	480.000,00	Db	50.818.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215056014 IBRAHIM VIA INTERNET BANKING 14.400.000	IBB4049883	480.000,00	Db	50.338.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215070072 I GEDE WIDNYANA VIA INTERNET BANKING 14.400.000	IBB4049897	480.000,00	Db	49.858.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215058646 NI NYOMAN TENIARI VIA INTERNET BANKING 14.400.00	IBB4049909	480.000,00	Db	49.378.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215074365 I PUTU WIRA DIRGANTARA VIA INTERNET BANKING 14	IBB4049915	1.920.000,00	Db	47.458.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215074811 I NYOMAN KARTIKA VIA INTERNET BANKING 14.400.000	IBB4049927	960.000,00	Db	46.498.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205099882 I KETUT MENIARTA VIA INTERNET BANKING 14.400.000	IBB4049936	480.000,00	Db	46.018.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215077367 I GEDE ARYA WIRAWAN VIA INTERNET BANKING 28.80	IBB4050062	2.880.000,00	Db	43.138.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100202510645 PUTU EKA SUWANDIKA VIA INTERNET BANKING 28.800	IBB4050070	2.400.000,00	Db	40.738.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0200202601929 A A GDE WIDARMA SANTOSA VIA INTERNET BANKING	IBB4050081	2.880.000,00	Db	37.858.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0580202815761 I MADE DUWISAK ARI SUSILA VIA INTERNET BANKING	IBB4050094	2.880.000,00	Db	34.978.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017928 NI WAYAN SUKANINGSIH LILI CAHY VIA INTERNET BAN	IBB4050111	1.440.000,00	Db	33.538.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205585378 NI NYOMAN JUNITRI SUARI VIA INTERNET BANKING 28	IBB4050123	1.440.000,00	Db	32.098.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017693 NI PUTU JUNITA LANTIKA VIA INTERNET BANKING 28.8	IBB4050132	1.440.000,00	Db	30.658.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205585574 COKORDE GDE INDRA PUTRA TRISNU VIA INTERNET B	IBB4050142	2.880.000,00	Db	27.778.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017916 R A TRI BUANA TUNGGGA DEWI VIA INTERNET BANKING	IBB4050157	1.440.000,00	Db	26.338.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215091052 I DEWA GEDE EKA DHARMA YASA VIA INTERNET BANK	IBB4050168	960.000,00	Db	25.378.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215091064 I KADEK ADI SANTOSA VIA INTERNET BANKING 28.800	IBB4050182	960.000,00	Db	24.418.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0360205009020 NI KOMANG YUDHA ANGGUN CANDRA VIA INTERNET B	IBB4050187	960.000,00	Db	23.458.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205094069 NI LUH MADE MAWAR VIA INTERNET BANKING 28.800.0	IBB4050195	480.000,00	Db	22.978.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215074365 I PUTU WIRA DIRGANTARA VIA INTERNET BANKING 28	IBB4050203	960.000,00	Db	22.018.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100215074811 I NYOMAN KARTIKA VIA INTERNET BANKING 28.800.000	IBB4050210	1.920.000,00	Db	20.098.276,00	IBBIS	010
12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205054114 PUTU RATNASARI VIA INTERNET BANKING 28.800.000	IBB4050215	2.400.000,00	Db	17.698.276,00	IBBIS	010

12/12/2025	410	TRF KE 129 0100205099882 I KETUT MENIARTA VIA INTERNET BANKING 28.800.000	IBB4050220	480.000,00	Db	17.218.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	410	TRF KE 129 0100202399121 I KETUT RAUH VIA INTERNET BANKING	IBB4328578	1.250.000,00	Db	15.968.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	410	TRF KE 129 0370202088080 NI PUTU AYU OKA ARINI VIA INTERNET BANKING	IBB4328654	1.800.000,00	Db	14.168.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	471	MPN 041516774050062	IBB4329582	6.400,00	Db	14.161.876,00	IBBIS	010
15/12/2025	410	TRF KE 129 0100215055096 MARIANA VIA INTERNET BANKING	IBB4330301	850.000,00	Db	13.311.876,00	IBBIS	010
15/12/2025	200	TRF KE CENAI DJA 1461946530 PUTU HERRY HERMAWAN PRIA VIA INTERNET BAN	IBB4330651	972.500,00	Db	12.339.376,00	IBBIS	010
15/12/2025	200	FEE TRF KE CENAI DJA 1461946530 PUTU HERRY HERMAWAN PRIA VIA INTERNET	IBB4330651	2.500,00	Db	12.336.876,00	IBBIS	010
15/12/2025	471	MPN 041548320929952	IBB4329500	175.000,00	Db	12.161.876,00	IBBIS	010
15/12/2025	410	TRF KE 129 0540202362216 I WAYAN WIDANA VIA INTERNET BANKING	IBB4329728	313.600,00	Db	11.848.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	420	TKLKPP 0195400515236	IBB4329095	934.000,00	Db	10.914.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	410	TRF KE 129 0370202113824 IDA AYU MADE ARDI NINGSIH VIA INTERNET BANKING	IBB4317224	1.365.000,00	Db	9.549.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	420	TKLKPP 0195400515260	IBB4329360	565.000,00	Db	8.984.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	420	TKLKPP 0195400515250	IBB4329242	625.000,00	Db	8.359.276,00	IBBIS	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000393/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312529	8.989.683,00	Kr	17.348.959,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000395/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312531	2.996.561,00	Kr	20.345.520,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000394/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312533	2.996.561,00	Kr	23.342.081,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000396/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312535	2.996.561,00	Kr	26.338.642,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000392/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312537	2.996.561,00	Kr	29.335.203,00	O1531	010
15/12/2025	199	GAJI KONTRAK	O15312539	20.975.927,00	Db	8.359.276,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000387/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312543	2.996.561,00	Kr	11.355.837,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000388/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312545	2.996.561,00	Kr	14.352.398,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000380/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312547	11.986.244,00	Kr	26.338.642,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000386/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312549	2.996.561,00	Kr	29.335.203,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000379/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312551	5.993.122,00	Kr	35.328.325,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000390/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312553	8.989.683,00	Kr	44.318.008,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000384/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312555	14.982.805,00	Kr	59.300.813,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000383/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312557	17.979.366,00	Kr	77.280.179,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000381/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312559	8.989.683,00	Kr	86.269.862,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000389/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312562	2.996.561,00	Kr	89.266.423,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000391/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312564	2.996.561,00	Kr	92.262.984,00	O1531	010
15/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000385/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312566	2.996.561,00	Kr	95.259.545,00	O1531	010
15/12/2025	199	GAJI KONTRAK	O15312570	86.900.269,00	Db	8.359.276,00	O1531	010
16/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000424/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O12880611	9.000.000,00	Kr	17.359.276,00	O1288	010
16/12/2025	199	HONOR SOPIR PEJABAT DISKOP UMKM	O12880611	9.000.000,00	Db	8.359.276,00	O1288	010
16/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000382/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O12880612	3.420.000,00	Kr	11.779.276,00	O1288	010
16/12/2025	199	HONOR PENGELOLA BMD KE 0100215056739	O12880612	3.420.000,00	Db	8.359.276,00	O1288	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100215077367 I GEDE ARYA WIRAWAN VIA INTERNET BANKING 8.160	IBB4484642	960.000,00	Db	7.399.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0200202601929 A A GDE WIDARMA SANTOSA VIA INTERNET BANKING	IBB4484648	480.000,00	Db	6.919.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100202510645 PUTU EKA SUWANDIKA VIA INTERNET BANKING 8.160.	IBB4484659	480.000,00	Db	6.439.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0580202815761 I MADE DUWISAK ARI SUSILA VIA INTERNET BANKING	IBB4484667	480.000,00	Db	5.959.276,00	IBBIS	010

16/12/2025	410	TRF KE 129 0100205585574 COKORDE GDE INDRA PUTRA TRISNU VIA INTERNET BANKING	IBB4484675	480.000,00	Db	5.479.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0490205017916 R A TRI BUANA TUNGGGA DEWI VIA INTERNET BANKING	IBB4484680	960.000,00	Db	4.519.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100205585378 NI NYOMAN JUNITRI SUARI VIA INTERNET BANKING	IBB4484689	960.000,00	Db	3.559.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100215091052 I DEWA GEDE EKA DHARMA YASA VIA INTERNET BANKING	IBB4484693	480.000,00	Db	3.079.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100205605427 FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG VIA INTERNET BANKING	IBB4484732	480.000,00	Db	2.599.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0360205009020 NI KOMANG YUDHA ANGGUN CANDRA VIA INTERNET BANKING	IBB4484746	480.000,00	Db	2.119.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100215072068 KETUT WIDIARI VIA INTERNET BANKING 8.160.000	IBB4484753	480.000,00	Db	1.639.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100215074811 I NYOMAN KARTIKA VIA INTERNET BANKING 8.160.000	IBB4484759	960.000,00	Db	679.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100205054114 PUTU RATNASARI VIA INTERNET BANKING 8.160.000	IBB4484766	480.000,00	Db	199.276,00	IBBIS	010
16/12/2025	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING PENGEMBAK	IBB4490831	199.276,00	Db	0,00	IBBIS	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000429/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312832	8.989.683,00	Kr	8.989.683,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000412/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312834	2.996.561,00	Kr	11.986.244,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000413/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312836	8.989.683,00	Kr	20.975.927,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000404/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312838	2.996.561,00	Kr	23.972.488,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000403/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312840	11.986.244,00	Kr	35.958.732,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000402/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312842	14.982.805,00	Kr	50.941.537,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000401/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312844	17.979.366,00	Kr	68.920.903,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000400/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312846	2.996.561,00	Kr	71.917.464,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000397/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312848	2.996.561,00	Kr	74.914.025,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000405/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312850	2.996.561,00	Kr	77.910.586,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000399/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312852	2.996.561,00	Kr	80.907.147,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000406/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312854	5.993.122,00	Kr	86.900.269,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000410/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312856	2.996.561,00	Kr	89.896.830,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000408/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312858	2.996.561,00	Kr	92.893.391,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000411/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312860	2.996.561,00	Kr	95.889.952,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000415/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312862	2.996.561,00	Kr	98.886.513,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000398/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312864	8.989.683,00	Kr	107.876.196,00	O1531	010
17/12/2025	199	GAJI KONTRAK DES	O15312866	86.900.269,00	Db	20.975.927,00	O1531	010
17/12/2025	199	GAJI KONTRAK UPTD DIKLAT DES 2025	O15312871	20.975.927,00	Db	0,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000409/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312874	101.200.000,00	Kr	101.200.000,00	O1531	010
17/12/2025	199	HONOR PENDAMPINGAN DES 2025	O15312876	101.200.000,00	Db	0,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000414/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O15312879	101.200.000,00	Kr	101.200.000,00	O1531	010
17/12/2025	199	HONOR PENDAMPING NOV UPTD DIKLAT	O15312881	101.200.000,00	Db	0,00	O1531	010
17/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000431/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O13190349	60.060.000,00	Kr	60.060.000,00	O1319	010
17/12/2025	199	HONOR NARSUM DISKOP UKM PROV BALI KE 0100205038687	O13190351	60.060.000,00	Db	0,00	O1319	010
18/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000421/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O14690228	28.372.500,00	Kr	28.372.500,00	O1469	010
18/12/2025	199	51.00/04.0/000421/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	O14690230	28.372.500,00	Db	0,00	O1469	010
22/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000407/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O14690594	6.530.000,00	Kr	6.530.000,00	O1469	010
22/12/2025	199	51.00/04.0/000470/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 KE 0100205094069 KE 0100205094069	O14690596	6.530.000,00	Db	0,00	O1469	010
22/12/2025	829	SP2D: 51.00/04.0/000430/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 DARI: 01000000010	O14690651	21.825.000,00	Kr	21.825.000,00	O1469	010

22/12/2025	199	51.00/04.0/0000430/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	O14690653	21.825.000,00	Db	0,00	O1469	010
------------	-----	---	-----------	---------------	----	------	-------	-----

Total Mutasi CR	693.351.948,00
Total Mutasi DB	699.637.597,00

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

LAMPIRAN VI

Bank BPD Bali
Internet Banking
15/01/2026 11:36:40 / 000007613965

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	050250005606
NO REK PDAM	:	20260147095
GOL/RAYON	:	E3-3/05004
NAMA	:	DEKOPIN WILAYAH
BULAN/TAHUN	:	01/2026
PEMAKAIAN(M3)	:	1
JML TAGIHAN	:	Rp 137.000
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 139.000

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
\${footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
15/01/2026 11:43:10 / 000007613895

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	050490018690
NO REK PDAM	:	20260170891
GOL/RAYON	:	D6-4/05049
NAMA	:	DINAS PETERNAKAN PROV BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2026
PEMAKAIAN(M3)	:	51
JML TAGIHAN	:	Rp 623.850
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 625.850

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
15/01/2026 11:36:31 / 000007613853

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	: 6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	: 050220000148
NO REK PDAM	: 20260170366
GOL/RAYON	: D6-4/05049
NAMA	: KTR KETAHANAN PANGAN PROV BALI
BULAN/TAHUN	: 01/2026
PEMAKAIAN(M3)	: 33
JML TAGIHAN	: Rp 405.150
DENDA	: Rp 0
ADMIN BANK	: Rp 2.000
TOTAL BAYAR	: Rp 407.150

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
15/01/2026 11:36:37 / 000007613931

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	030800003008
NO REK PDAM	:	20260132379
GOL/RAYON	:	D6-4/03080
NAMA	:	DINAS KOPERASI UMKM BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2026
PEMAKAIAN(M3)	:	9
JML TAGIHAN	:	Rp 89.700
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 91.700

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
15/01/2026 11:36:28 / 000007614116

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	080260000152
NO REK PDAM	:	20260149917
GOL/RAYON	:	D6-3/08055
NAMA	:	KEP.KTR.KOPERASI PROP.BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2026
PEMAKAIAN(M3)	:	0
JML TAGIHAN	:	Rp 88.900
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2.000
TOTAL BAYAR	:	Rp 90.900

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

\$_{footer}

Bank BPD Bali Internet Banking
15-Jan-2026 / 11:40:15
000007614813

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551000583053	BL/TH	: JAN26
NAMA	: DEKOPIN WIL PROP	STAND METER	: 00002837-00003019
TARIF/DAYA	: B2/6600VA		
RP TAG PLN	: Rp 419.541		
NO REF	: 212914000000000000000000007614813		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 422.041

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
15-Jan-2026 / 11:38:29
000007614577

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551004047598	BL/TH	: JAN26
NAMA	: DINAS PETERNAKAN	STAND METER	: 00051620-00052981
TARIF/DAYA	: P1/33000VA		
RP TAG PLN	: Rp 2.313.060		
NO REF	: 212914000000000000000000007614577		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 2.315.560

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
15-Jan-2026 / 11:37:40
000007614533

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551001732803	BL/TH	: JAN26
NAMA	: DNS KETAHANAN PANGAN BALI	STAND METER	: 00193083-00195601
TARIF/DAYA	: P1/23000VA		
RP TAG PLN	: Rp 4.279.417		
NO REF	: 212914000000000000000000007614533		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 4.281.917

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
15-Jan-2026 / 11:41:16
000007614847

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551000688819	BL/TH	: JAN26
NAMA	: DNS KETAHANAN PANGAN BALI	STAND METER	: 00089292-00000373
TARIF/DAYA	: P1/23000VA		
RP TAG PLN	: Rp 2.352.150		
NO REF	: 212914000000000000000000007614847		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 2.354.650

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
15-Jan-2026 / 11:39:38
000007614606

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551003959410	BL/TH	: JAN26
NAMA	: GEDUNG PLUT KUM PROF BALI	STAND METER	: 00004459-00004675
TARIF/DAYA	: P1/66000VA		
RP TAG PLN	: Rp 7.380.862		
NO REF	: 212914000000000000000000007614606		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 7.383.362

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile

Bank BPD Bali Internet Banking
15-Jan-2026 / 11:42:29
000007615147

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551000688429	BL/TH	: JAN26
NAMA	: PUSAT PEND.KOP.DIREK	STAND METER	: 00012405-00012795
TARIF/DAYA	: S1/16500VA		
RP TAG PLN	: Rp 594.000		
NO REF	: 212914000000000000000000007615147		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp 2.500
TOTAL BAYAR : Rp 596.500

Terima Kasih

BANK BALI

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7613077
Tanggal / Jam	:	15-Jan-2026 / 11:36:25 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361729253
Nama	:	KANTOR KOPERASI USAHA KECIL _
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 341,880
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 343,880
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7613192
Tanggal / Jam	:	15-Jan-2026 / 11:36:28 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361237732
Nama	:	BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN -
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 31,857
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 33,857
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7613206
Tanggal / Jam	:	15-Jan-2026 / 11:36:34 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	03614781528
Nama	:	UPTD. DIKLAT KOPRASI & UMKM
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 427,350
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 429,350
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	: IBB7613046
Tanggal / Jam	: 15-Jan-2026 / 11:36:43 WITA
Pembayaran	: Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	: 0361226548
Nama	: DEKOPIN BALI
Month/Year	: Jan26
Biller Reference	: 601A
Bill Amount	: Rp. 248,307
Biaya Admin	: Rp. 2,000
Total Tagihan	: Rp. 250,307
Jenis Transaksi	: Transaksi Sekarang
Status	: Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7613130
Tanggal / Jam	:	15-Jan-2026 / 11:36:39 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361224557
Nama	:	KTR WILAYAH KOPERASI PROP BALI
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 31,857
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 33,857
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB7613112
Tanggal / Jam	:	15-Jan-2026 / 11:36:33 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361225091
Nama	:	KOP PROP BALI,KANWIL DITJEN
Month/Year	:	Jan26
Biller Reference	:	601A
Bill Amount	:	Rp. 37,407
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 39,407
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.

LAMPIRAN VII

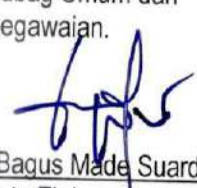
Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

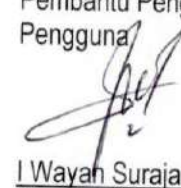
A.n. Kepala Dinas Koperasi usaha
Kecil dan menengah Provinsi Bali.
Sekretaris.


I Ketut Merta, SSTP.,M.Si.,
Pembina Tk I
NIP. 19780712 199802 1 001

Kasubag Umum dan
Kepegawaian.


Ida Bagus Made Suardita, SH.
Penata Tk I.
NIP. 19690705 200901 1 009

Pembantu Pengurus Barang
Pengguna


I Wayan Suraja, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 196812012008011008



පිම්බුරු ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිසිදු කාර්මික සහ කුඩා ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

කුඩා ව්‍යාපාරික සහ කුඩා ව්‍යාපාරික - ප්‍රාදේශීය (1 වන ප්‍රවර්ධන) / කුඩා ව්‍යාපාරික (1 වන ප්‍රවර්ධන) / කුඩා ව්‍යාපාරික

Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091

Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN

NOMOR : B.17.000.2.3.1/3527/SET/DISKOP.UKM

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
Tanggal Opname Fisik : 31 Desember 2025
Lokasi Opname Fisik : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Nomor/Tanggal Surat : 1511 Tahun 2025 /30 Desember 2025
Tugas

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Made Suardita, SH.
Pangkat dan Golongan : Penata Tk I
NIP. : 19690705 200901 1 009
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Surat Perintah Tugas pelaksanaan opname fisik Nomor : 1511 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 telah melaksanakan pemeriksaan fisik (Stok opname) atas persediaan yang berada dalam tanggung jawab.

Nama : I Wayan Suraja, S.Sos
Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tingkat I
NIP. : 19681201 200801 1 008
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

NO	Jenis Barang	Keadaan 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Menurut Opname Fisik (Rp)	Jumlah Menurut Buku (Rp)	Keadaan 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Pertamax	80.777.400	379.279.500	377.229.800	82.827.100
2.	Persediaan alat Tulis Kantor	-	34.686.523	34.666.523	20.000
3.	Kertas dan Cover	-	45.540.000	45.134.000	406.000
4.	Bahan Cetak	-	36.049.278	36.049.278	-
5.	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	-	7.588.000	7.588.000	-
6.	Benda post dan materai	-	4.680.000	4.550.000	130.000
7.	Bahan Komputer	-	57.780.000	56.280.000	1.500.000
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	7.117.875	7.117.875	-
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	10.517.250	10.517.250	-
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	348.411.105	348.411.105	-

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2025

No	Kode	Uraian nama barang	Satuan (buah/lusin/ set/unit)	Keadaan Desember 2024				Mutasi / Perubahan Januari s/d Desember 2025				Keadaan 31Desember 2025		Ket
				Jml Brg	Harga Satuan (Rp)	Jml harga (Rp)	Jml Barang	Berambah		Berkurang				
								Harga satuan (Rp)	Jml Harga (Rp)	Jml Barang	Jml Harga (Rp)	Jml Barang	Jml Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persediaan												
		Barang pakai Habis												
1.	5.1.02.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas												
		Pertamax Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	liter	4.372	13.200	57.710.400		13.200		4.372 liter	57.710.400	- liter	-	
		Pertamax Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	liter	-	-	-	24.650 liter	12.900	317.985.000	19.199 liter	247.667.100	5.451 liter	70.317.900	-
		Pertamax DAK Kewirausahaan Diskop dan UKM Pro Bali	liter	826	13.200	10.903.200	- liter	-	-	510 liter	6.732.000	316 liter	4.171.200	
		Pertamax DAK Kewirausahaan Diskop dan UKM Pro Bali	liter	826	12.100	9.994.600	- liter	-	-	524 liter	6.340.400	302 liter	3.654.200	
		Pertamax UPTD Diklat Koperasi (Rutin)	liter	146	13.200	1.927.200	- liter	13.200	-	146 liter	1.927.200	- liter	-	
		Pertamax UPTD Diklat Koperasi (Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Penguatan Perencanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)	liter	-	-	-	2.795 liter	12.900	36.055.500	2.704 liter	34.881.600	91 liter	1.173.900	
		Pertamax UPTD Diklat Koperasi (Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Penguatan Perencanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)	liter	-	-	-	850 liter	12.900	10.965.000	713 liter	9.197.700	137 liter	1.767.300	
		PLUT												
		Pertamax Sosialisasi layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	liter	20	12.100	242.000	- liter	-	-	- liter	-	20 liter	242.000	
		Pertamax UPTD Diklat Koperasi (Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Penguatan Perencanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)	liter				850 liter	12.200	10.370.000	727 liter	8.869.400	123 liter	1.500.600	
		Pertamax UPTD Diklat Koperasi (Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Penguatan Perencanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)	liter				320 liter	12.200	3.904.000	320 liter	3.904.000	- liter	-	
Jumlah Belanja untuk Bahan Bakar dan Pelumas				6.190		80.777.400	29.465 liter		379.279.500	29.215 liter	377.229.800	6.440 liter	82.827.100	
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Post-it Sign Here 76x51 mm 5 warna Big					7 bh	9.000	63.000	7 bh	63.000	- bh	-	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		Post-it Sign Here 76x51 mm 5 warna Big					18 bh	9.000	162.000	18 bh	162.000	- bh	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Bolpoin Ballner					36 buah	22.000	792.000	36 buah	792.000	- buah	-	
		Amplop No.90 ukuran 110x230 isi 100 lembar Paperline					4 buah	30.000	120.000	4 buah	120.000	- buah	-	
		File Holder Order 401 Teka					40 buah	30.500	1.220.000	40 buah	1.220.000	- buah	-	
		Isi Staples No.10-1M 5Mm Max					100 box	5.000	500.000	96 box	480.000	4 box	20.000	
		Isi Staples No.3-1M 5Mm Max					25 buah	14.500	362.500	25 buah	362.500	- buah	-	
		Map Buffalo					240 buah	4.000	960.000	240 buah	960.000	- buah	-	
		Penjepit Kertas Binder Ukuran 111 isi 12 per Box					5 buah	8.000	40.000	5	40.000	- buah	-	
		Penjepit Kertas Binder Ukuran 200 isi 12 per Box					4 buah	21.000	84.000	4 buah	84.000	- buah	-	
		Trigonal Clip No. 3 Atom					30 buah	5.000	150.000	30 buah	150.000	- buah	-	
		Lem Kertas original 75 ml Pwiral					5 lusin	6.000	30.000	5 lusin	30.000	- lusin	-	
		Post-it (654) Joyko					20 kotak	11.000	220.000	20 kotak	220.000	- kotak	-	
		Spidol Marker White Board Snowman					10 buah	14.000	140.000	10 buah	140.000	- buah	-	
		Spidol White Board bisa dihapus Snowman					10 buah	14.000	140.000	10 buah	140.000	- buah	-	
		Staples Type Hd-10 Kenko					6 buah	45.000	270.000	6 buah	270.000	- buah	-	
		PLUT-KUMKM												
		Bolpoin Ballner					12 buah	22.000	264.000	12 buah	264.000	- buah	-	
		File Holder Order 401 Teka					18 buah	30.500	549.000	18 buah	549.000	- buah	-	
		Isi Staples No.10-1M 5Mm Max					20 box	5.000	100.000	20 box	100.000	- box	-	
		Map Buffalo					100 buah	4.000	400.000	100 buah	400.000	- buah	-	
		Staples Type Hd-10 Kenko					10 buah	45.000	450.000	10 buah	450.000	- buah	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN VIII

4. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :
- a. Daftar Barang yang akan dihapus;
 - b. Berita Acara Reklas;
 - c. Copy dokumen kepemilikan BPKB dan STNK;
 - d. Hasil cek fisik kendaraan Dinas dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
 - e. Foto kondisi fisik barang.

Demikian atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR BARANG YANG DIPINDAHTANGKANKAN/PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

Lampiran Pemdahtanganan/Penghapusan Barang Milik Daerah
Nomor : B.17.000.2.3.2347/SET/DISKOP UKM
Tanggal : 16 Januari 2025

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Spesifikasi Lokasi	Kondisi Barang	Ket
01	02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Barang Intra Kompartabel												
1	1.3.2.10.001.002.001	000050	Komputer PC Unit ✓	2016	1 Unit	9.982.500	✓ 9.982.500	9.982.500	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
2	1.3.2.10.001.002.001	000054	Komputer PC Unit ✓	2018	1 Unit	13.353.000	✓ 13.353.000	13.353.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
3	1.3.2.10.001.002.003	000003	Notebook ✓	2011	1 Unit	14.600.000	✓ 14.600.000	14.600.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
4	1.3.2.05.002.006.077	000006	Alat Rumah Tangga Lain-lain ✓	2012	1 Unit	11.715.000	✓ 11.715.000	11.715.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
5	1.3.2.06.001.002.105	000002	Layar Film Projektor ✓	2013	1 Unit	19.750.000	✓ 19.750.000	19.750.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	lod
6	1.3.2.06.001.002.105	000005	Layar Film Projektor ✓	2018	1 Unit	11.550.000	✓ 11.550.000	11.550.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	lod
7	1.3.2.05.002.004.004	000024	AC Split ✓	2008	1 Unit	5.800.000	✓ 5.800.000	5.800.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
8	1.3.2.05.003.003.005	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III ✓	2005	1 bh	1.745.075	✓ 1.745.075	1.745.075	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
9	1.3.2.05.002.006.021	000001	Camera Video (Handycam) ✓	2012	1 bh	12.441.000	✓ 12.441.000	12.441.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
10	1.3.2.05.003.003.008	000004	Kursi kerja pegawai Non Struktural ✓	2016	1 bh	635.000	✓ 635.000	635.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
11	1.3.2.05.002.001.004	000044	Kursi kayu ✓	2014	1 bh	600.000	✓ 600.000	600.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
12	1.3.2.10.002.003.003	000006	Printer ✓	2011	1 bh	7.350.000	✓ 7.350.000	7.350.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
13	1.3.2.10.001.002.001	000011	Komputer ✓	2009	1 Unit	12.000.000	✓ 12.000.000	12.000.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
14	1.3.2.10.001.002.001	000015	Komputer ✓	2011	1 Unit	12.494.000	✓ 12.494.000	12.494.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
15	1.3.2.10.001.002.001	000012	Komputer ✓	2009	1 Unit	12.000.000	✓ 12.000.000	12.000.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
16	1.3.2.10.001.002.001	000019	Komputer ✓	2012	1 Unit	12.676.400	✓ 12.676.400	12.676.400	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
17	1.3.2.10.001.002.001	000035	Komputer + Printer ✓	2012	1 Unit	16.966.000	✓ 16.966.000	16.966.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
18	1.3.2.10.001.002.001	000036	Komputer + Printer ✓	2012	1 Unit	7.475.000	✓ 7.475.000	7.475.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
19	1.3.2.10.001.002.001	000044	Komputer + Printer ✓	2014	1 Unit	14.900.000	✓ 14.900.000	14.900.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
20	1.3.2.10.001.002.001	000051	Komputer ✓	2016	1 Unit	9.982.500	✓ 9.982.500	9.982.500	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
22	1.3.2.10.001.002.001	000052	Komputer ✓	2016	1 Unit	9.982.500	✓ 9.982.500	9.982.500	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
24	1.3.2.05.002.006.077	000007	Alat Rumah Tangga Lain-lain ✓	2012	1 bh	1.787.500	✓ 1.787.500	1.787.500	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	
25	1.3.2.05.002.006.017	000001	Mic conference ✓	2004	1 bh	12.900.000	✓ 12.900.000	12.900.000	✓ 0	Diskop dan UKM	RB	staval
26	1.3.2.05.002.005.008	000001	Sound system ✓	2003	1 unit	15.527.500	✓ 15.527.500	15.527.500	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	12
27	1.3.2.05.002.001.002	000001	Meja kerja kayu ✓	1982	1 bh	702.000	✓ 702.000	702.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
28	1.3.2.05.002.001.002	000002	Meja kerja kayu ✓	1982	1 bh	1.015.000	✓ 1.015.000	1.015.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	9
29	1.3.2.05.002.001.002	000011	Meja kerja kayu ✓	1996	1 bh	4.080.000	✓ 4.080.000	4.080.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	14
30	1.3.2.05.002.001.002	000015	Meja kerja kayu (Meja setrika) ✓	2009	1 bh	995.000	✓ 995.000	995.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	24
31	1.3.2.05.001.004.002	000001	Lemari kayu ✓	1996	1 bh	500.000	✓ 500.000	500.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
32	1.3.2.05.001.004.002	000004	Lemari kayu ✓	1996	1 bh	1.780.000	✓ 1.780.000	1.780.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	2
33	1.3.2.05.002.006.012	000001	Dispenser ✓	2007	1 Unit	1.580.000	✓ 1.580.000	1.580.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	4
34	1.3.2.05.002.006.012	000002	Dispenser ✓	2009	1 Unit	1.660.000	✓ 1.660.000	1.660.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
35	1.3.2.05.002.006.012	000003	Dispenser ✓	2009	1 Unit	1.660.000	✓ 1.660.000	1.660.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
36	1.3.2.05.002.006.012	000004	Dispenser ✓	2009	1 Unit	1.660.000	✓ 1.660.000	1.660.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
37	1.3.2.05.001.004.001	000001	Lemari besi ✓	2005	1 Unit	4.990.000	✓ 4.990.000	4.990.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
38	1.3.2.05.002.001.010	000005	Tempat tidur kayu ✓	1994	1 bh	1.800.000	✓ 1.800.000	1.800.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	6
39	1.3.2.05.002.001.010	000010	Tempat tidur kayu ✓	1996	1 bh	1.200.000	✓ 1.200.000	1.200.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	4
40	1.3.2.05.002.001.010	000012	Tempat tidur kayu ✓	1996	1 bh	1.800.000	✓ 1.800.000	1.800.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	6
41	1.3.2.05.001.004.007	000001	Brankas ✓	1982	1 bh	975.000	✓ 975.000	975.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	
42	1.3.2.05.002.003.001	000001	Mesin penghisap debu ✓	2005	1 bh	2.475.000	✓ 2.475.000	2.475.000	✓ 0	UPTD Diklat Koperasi	RB	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



43	1.3.2.05.001.004.005	000002	Filling besi metal ✓	1995	1 bh	700.000	700.000	700.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
44	1.3.2.05.001.001.001	000001	Mesin ketik manual ✓	2009	1 bh	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
45	1.3.2.05.002.006.002	000002	Televisi ✓	1997	1 bh	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
46	1.3.2.05.002.006.002	000003	Televisi ✓	2004	1 bh	6.789.000	6.789.000	6.789.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
47	1.3.2.05.002.006.002	000004	Televisi ✓	2007	1 bh	4.975.000	4.975.000	4.975.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
Jumlah Intra Kompatibel						295.048.975	295.048.975	295.048.975	0		
Barang Extra Kompatibel											
1	1.3.2.05.002.001.036	000013	Kursi lipat ✓	2011	1 bh	276.000	276.000	276.000	0	Diskop dan UKM	RB
2	1.3.2.05.002.001.036	000034	Kursi lipat ✓	2011	1 bh	276.000	276.000	276.000	0	Diskop dan UKM	RB
3	1.3.2.05.002.004.006	000002	Kipas angin ✓	1999	1 bh	150.000	150.000	150.000	0	Diskop dan UKM	RB
4	1.3.2.05.002.004.006	000005	Kipas angin gantung ✓	2003	1 bh	150.000	150.000	150.000	0	Diskop dan UKM	RB
5	1.3.2.05.002.001.004	000015	Kursi kayu ✓	1983	1 bh	100.000	100.000	100.000	0	Diskop dan UKM	RB
6	1.3.2.05.002.001.004	000018	Kursi kayu ✓	1986	1 bh	100.000	100.000	100.000	0	Diskop dan UKM	RB
7	1.3.2.05.001.005.009	000002	Peta ✓	2003	1 bh	50.000	50.000	50.000	0	Diskop dan UKM	RB
8	1.3.2.05.002.006.037	000001 s/d 000004	Kaca hias ✓	1992	4 bh	30.000	120.000	120.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
9	1.3.2.05.002.006.037	000005 s/d 000013	Kaca hias ✓	2009	9 bh	100.000	900.000	900.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
10	1.3.2.05.002.001.002	000005	Meja kerja kayu ✓	1985	1 bh	125.000	125.000	125.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
11	1.3.2.05.001.004.002	000002	lemari kayu ✓	1996	1 bh	250.000	250.000	250.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
12	1.3.2.05.001.004.002	000003	lemari kayu ✓	1996	2 bh	145.000	290.000	290.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
13	1.3.2.05.002.005.002	000001	Kompor gas ✓	1994	1 bh	400.000	400.000	400.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
14	1.3.2.05.001.004.005	000001	Filling besi metal ✓	1987	2 bh	145.000	290.000	290.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
15	1.3.2.05.002.001.010	000011	Tempat tidur kayu ✓	1995	1 bh	350.000	350.000	350.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
16	1.3.2.05.001.004.004	000001	A C ✓	1994	1 unit	183.000	183.000	183.000	0	UPTD Diklat Koperasi	RB
Jumlah Ekstra Kompatibel						4.010.000	4.010.000	4.010.000	0		
Jumlah Total Intra Kompatibel + Ekstra Kompatibel						299.058.975	299.058.975	299.058.975	0		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE



DAFTAR BARANG YANG DIPINDAHTANGANKAN/PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

Lampiran per: Pemindahtanganan/Penghapusan Barang Milik Daerah
Nomor : B.17.000.2.3.2/347/SET/DISKOP UKM
Tanggal : 16 Januari 2025

No	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Nomor Polisi	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	N o m o r			Harga Satuan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku	Kondisi Barang	Keterangan
							Rangka	Mesin	BPKB					
1	1.1.3.2.02.001.004.001	000023	Seperda Motor Honda C	DK 5622	1 Unit	1995	MHIGG000SS0014603	GGE1014574	AN 3480013 0	2.600.000	2.600.000	0	14	Diskop dan UKM Prov Bali.
											2.600.000			



Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE



LAMPIRAN IX



பிப் பி கி ரு ரு ப ர பி கி ரு பி கி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

රාජ්‍ය පාලන මණ්ඩලය
SEKRETARIAT DAERAH

තැන කි තැන කි තැන කි - තැන (පිටුපිටු) රාජ්‍ය පාලන මණ්ඩලය (පිටුපිටු) රාජ්‍ය පාලන මණ්ඩලය
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR B.31.000.2.4/1085/P.BMD/BPKAD

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA 3 (TIGA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah disetujui oleh Pj. Gubernur Bali sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor:B.00.000.2.3.2/5113/Setda, tanggal 23 Januari 2025, Hal Persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Bali tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada 3 (tiga) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Kel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah b		9	298.000,00	894.000,00	-	-			
			Jumlah 2 D		10	7.198.000,00	7.794.000,00	6.900.000,00	0			
2. E. UPTD. KPH BALI BARAT												
a. Barang Intra Kompartabel												
1	1.3.2.10.001.002.002	000003	Lap top	2013	1	7.500.000,00	7.500.000,00		0	UPTD. KPH. Bali Barat	Rusak Berat	
2	1.3.2.10.002.003.003	000006	Printer (peralatan personal komputer)	2014	1	2.450.000,00	2.450.000,00		0	UPTD. KPH. Bali Barat	Rusak Berat	
3	1.3.2.10.002.003.003	000007	Printer (peralatan personal komputer)	2014	1	2.450.000,00	2.450.000,00		0	UPTD. KPH. Bali Barat	Rusak Berat	
4	1.3.2.10.002.003.003	000008	Printer (peralatan personal komputer)	2014	1	2.450.000,00	2.450.000,00		0	UPTD. KPH. Bali Barat	Rusak Berat	
			Jumlah 2 E		4	14.850.000,00	14.850.000,00		0			
2. F. UPTD. PENGELOLAAN SAMPAH												
a. Barang Intra Kompartabel												
1	1.3.2.06.001.002.1.05	000001	Layar Film/Projector	2011	1	12.500.000,00	12.500.000,00		0	UPTD. Pengelolaan Sampah	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.002.004.004	000012	A.C Split	2016	1	3.498.000,00	3.498.000,00		0	UPTD. Pengelolaan Sampah	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.002.004.004	000002	A.C Split	2008	1	2.365.000,00	2.365.000,00		0	UPTD. Pengelolaan Sampah	Rusak Berat	
			Jumlah a		3	18.363.000,00	18.363.000,00		0			
b. Barang Ekstra Kompartabel												
1	1.3.2.05.002.001.036	000017-000021	Kursi Lipat	2017	5	495.000,00	2.475.000,00		-		Rusak Berat	
			Jumlah b		5	495.000,00	2.475.000,00		-			
			Jumlah 2 F		8	18.858.000,00	20.838.000,00		0			
			Jumlah 2 (2A + 2B + 2C + 2D + 2E + 2F)		271	422.109.446,00	529.368.296,00		0			
3. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Kompartabel												
1	1.3.2.10.001.002.001	000050	Komputer PC Unit	2016	1	9.982.500,00	9.982.500,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.10.001.002.001	000054	Komputer PC Unit	2018	1	13.353.000,00	13.353.000,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.10.001.002.003	000003	Notebook	2011	1	14.600.000,00	14.600.000,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.05.002.006.077	000006	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	11.715.000,00	11.715.000,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.06.001.002.105	000002	Layar Film Projektor	2013	1	19.750.000,00	19.750.000,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.06.001.002.105	000005	Layar Film Projektor	2016	1	11.550.000,00	11.550.000,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.05.002.004.004	000024	AC Split	2008	1	5.800.000,00	5.800.000,00		0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Kel.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1.3.2.05.003.003.005	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2005	1	1.745.075,00	1.745.075,00	1.745.075,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.05.002.006.021	000001	Camera Video (Handycam)	2012	1	12.441.000,00	12.441.000,00	12.441.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.05.003.003.008	000004	Kursi kerja pegawai Non Struktural	2016	1	635.000,00	635.000,00	635.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.05.002.001.004	000044	Kursi kayu	2014	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.10.002.003.003	000006	Printer	2011	1	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	1.3.2.10.001.002.001	000011	Komputer	2009	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	1.3.2.10.001.002.001	000015	Komputer	2011	1	12.494.000,00	12.494.000,00	12.494.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	1.3.2.10.001.002.001	000012	Komputer	2009	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	1.3.2.10.001.002.001	000019	Komputer	2012	1	12.676.400,00	12.676.400,00	12.676.400,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	1.3.2.10.001.002.001	000035	Komputer + Printer	2012	1	16.966.000,00	16.966.000,00	16.966.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	1.3.2.10.001.002.001	000036	Komputer + Printer	2012	1	7.475.000,00	7.475.000,00	7.475.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	1.3.2.10.001.002.001	000044	Komputer + Printer	2014	1	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	1.3.2.10.001.002.001	000051	Komputer	2016	1	9.982.500,00	9.982.500,00	9.982.500,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	1.3.2.10.001.002.001	000052	Komputer	2016	1	9.982.500,00	9.982.500,00	9.982.500,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	1.3.2.05.002.006.077	000007	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	1.787.500,00	1.787.500,00	1.787.500,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	1.3.2.05.002.006.017	000001	Mic conference	2004	1	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	1.3.2.05.002.006.008	000001	Sound system	2003	1	15.527.500,00	15.527.500,00	15.527.500,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
25	1.3.2.05.002.001.002	000001	Meja kerja kayu	1982	1	702.000,00	702.000,00	702.000,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
26	1.3.2.05.002.001.002	000002	Meja kerja kayu	1982	1	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
27	1.3.2.05.002.001.002	000011	Meja kerja kayu	1996 /	1	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
28	1.3.2.05.002.001.002	000015	Meja kerja kayu (Meja setrika)	2009 ✓	1	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
29	1.3.2.05.001.004.002	000001	Lemari kayu	1996 ✓	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
30	1.3.2.05.001.004.002	000004	Lemari kayu	1996 ✓	1	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Balai Sertifikasi Elektronik



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	1.3.2.05.002.006.012	000001	Dispenser	2007	1	1.580.000,00	1.580.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
32	1.3.2.05.002.006.012	000002	Dispenser	2009 ✓	1	1.660.000,00	1.660.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
33	1.3.2.05.002.006.012	000003	Dispenser	2009 ✓	1	1.660.000,00	1.660.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
34	1.3.2.05.002.006.012	000004	Dispenser	2009 ✓	1	1.660.000,00	1.660.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
35	1.3.2.05.001.004.001	000001	Lemari besi	2005 ✓	1	4.990.000,00	4.990.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
36	1.3.2.05.002.001.010	000005	Tempat tidur kayu	1994 ✓	1	1.800.000,00	1.800.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
37	1.3.2.05.002.001.010	000010	Tempat tidur kayu	1996 ✓	1	1.200.000,00	1.200.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
38	1.3.2.05.002.001.010	000012	Tempat tidur kayu	1996 ✓	1	1.800.000,00	1.800.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
39	1.3.2.05.001.004.007	000001	Brankas	1982 ✓	1	975.000,00	975.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
40	1.3.2.05.002.003.001	000001	Mesin penghisap debu	2005 ✓	1	2.475.000,00	2.475.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
41	1.3.2.05.001.004.005	000001	Filling besi metal	1995 ✓	1	700.000,00	700.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
42	1.3.2.05.001.001.001	000001	Mesin ketik manual	2009 ✓	1	3.250.000,00	3.250.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
43	1.3.2.05.002.006.002	000002	Televisi	1997 ✓	1	2.250.000,00	2.250.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
44	1.3.2.05.002.006.002	000003	Televisi	2004 ✓	1	6.789.000,00	6.789.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
45	1.3.2.05.002.006.002	000004	Televisi	2007 ✓	1	4.975.000,00	4.975.000,00		0	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
Jumlah a						295.048.975,00	295.048.975,00		0			
b. Barang Ekstra Kompatabel												
1	1.3.2.05.002.001.036	000013	Kursi lipat /	2011	1	276.000,00	276.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.002.001.036	000034	Kursi lipat ✓	2011	1	276.000,00	276.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.002.004.006	000002	Kipas angin	1999 ✓	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.05.002.004.006	000005	Kipas angin gantung	2003 ✓	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.05.002.001.004	000015	Kursi kayu	1983 ✓	1	100.000,00	100.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.05.002.001.004	000018	Kursi kayu	1986 ✓	1	100.000,00	100.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.05.001.005.009	000002	Peta	2003 ✓	1	50.000,00	50.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1.3.2.05.002.006.037	000001 s/d 000004	Kaca hias	1992 ✓	4	30.000,00	120.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
9	1.3.2.05.002.006.037	000005 s/d 000013	Kaca hias	2009 ✓	9	100.000,00	900.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
10	1.3.2.05.002.001.002	000005	Meja kerja kayu	1985 ✓	1	125.000,00	125.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
11	1.3.2.05.001.004.002	000002	lemari kayu	1996 ✓	1	250.000,00	250.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
12	1.3.2.05.001.004.002	000003	lemari kayu	1996 ✓	2	145.000,00	290.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
13	1.3.2.05.002.005.002	000001	Kompor gas	1994 ✓	1	400.000,00	400.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
14	1.3.2.05.001.004.005	000001	Filling besi metal	1987 ✓	2	145.000,00	290.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
15	1.3.2.05.002.001.010	000011	Tempat tidur kayu	1996 ✓	1	350.000,00	350.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
16	1.3.2.05.001.004.004	000001	A C	1994 ✓	1	183.000,00	183.000,00	-	-	UPTD Diklat Koperasi	Rusak Berat	
Jumlah b					29	2.830.000,00	4.010.000,00	-	-			
Jumlah 3					74	297.878.975,00	299.058.975,00	295.048.975,00	0			
Jumlah Total (1 + 2 + 3)					499	1.236.110.902,39	1.444.971.735,57	1.396.127.289,53	0			
							(Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen)	(Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Tiga Sen)				



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 199602 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





ບິຍ໌ກິຊຸກ ງຽບວິຊຸກ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກະຊວງ ທຸກໆ ທາງ ທາງ ທາງ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະ ກະຊວງ ທຸກໆ ທາງ ທາງ ທາງ (ບໍ່ມີ ທຸກໆ) ງຽບວິຊຸກ (ບໍ່ມີ ທຸກໆ) ງຽບວິຊຸກ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU**

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR B.31.000.2.4/8135/P.BMD/BPKAD

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah disetujui oleh Gubernur Bali sesuai Keputusan Gubernur Bali B.31.000.2.3.2/1313/P.BMD/BPKAD, tanggal 21 Februari 2025, Hal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas);
- b. bahwa Keputusan Gubernur Bali tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali berupa Kendaraan Dinas kondisi rusak berat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 03 Desember 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali di Bali.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Lampiran Surat Keputusan Pengelola Barang
 Nomor : B.31.000.2.4/8135/P.BMD/BPKAD
 Tanggal : 03 Desember 2025

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	No. Polisi	No Rangka	No Mesin	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku	Spesifikasi / Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI														
1	1.3.2.02.0 01.004.001	000023	Sepeda Motor	Honda / C 86	1995	DK 5622	MH1GG000SSK 14603	GGE-1014574	1	2.600.000,00	0	Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah									1	2.600.000,00	0			
										(Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)				

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
 NIP. 19670203 198602 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN X



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Aset Tetap				15,424,019,334							
2		PERALATAN DAN MESIN		6,182,228,989			4,977,928,105	89,433,899	120,644,210	5,188,006,214	994,222,775
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2,001,379,000			1.974.068.048	1.974.286	1.974.286	1.978.016.620	23,362,380
1.3.2.2.1.1		KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		1,099,020,000			1.099.020.000	0	0	1.099.020.000	0
1.3.2.2.1.1.3	2	Station Wagon	12 1991	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	8	Station Wagon	12 1997	75,000,000	0	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	9	Station Wagon	5 2015	187,170,000	0	0	187.170.000	0	0	187.170.000	0
1.3.2.2.1.1.3	10	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	11	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	13	Station Wagon	5 2016	200,000,000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	2	Station Wagon	12 2014	180,850,000	0	0	180.850.000	0	0	180.850.000	0
1.3.2.2.1.2		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		703,450,000			703.450.000	0	0	703.450.000	0
1.3.2.2.1.2.3	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7 2012	195,000,000	0	0	195.000.000	0	0	195.000.000	0
1.3.2.2.1.2.3	3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7 2016	307,000,000	0	0	307.000.000	0	0	307.000.000	0
1.3.2.2.1.2.3	4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4 2017	201,450,000	0	0	201.450.000	0	0	201.450.000	0
1.3.2.2.1.4		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		198,909,000			171.598.048	1.974.286	1.974.286	175.546.620	23,362,380
1.3.2.2.1.4.1	42	Sepeda Motor	12 2006	9,518,000	0	0	9.518.000	0	0	9.518.000	0
1.3.2.2.1.4.1	47	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	48	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	49	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	50	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	52	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	53	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	55	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	56	Sepeda Motor	12 2005	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0
1.3.2.2.1.4.1	57	Sepeda Motor	6 2016	17,569,000	0	0	17.569.000	0	0	17.569.000	0
1.3.2.2.1.4.1	58	Sepeda Motor	6 2016	17,569,000	0	0	17.569.000	0	0	17.569.000	0
1.3.2.2.1.4.1	59	Sepeda Motor	6 2016	17,569,000	0	0	17.569.000	0	0	17.569.000	0
1.3.2.2.1.4.1	3	Sepeda Motor	7 2012	12,116,000	0	0	12.116.000	0	0	12.116.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.2.1.4.1	1	Sepeda Motor	12 2024	27,640,000	0	0	0	0	0	0	27,640,000
1.3.2.2.1.4.1	60	Sepeda Motor	12 2024	0	5	11	329.048	1.974.286	1.974.286	4.277.620	(4,277,620)
1.3.2.3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR									
1.3.2.3.3		ALAT UKUR		3,100,000			3.100.000	0	0	3.100.000	0
1.3.2.3.3.8		ALAT UKUR/PEMBANDING		3,100,000			3.100.000	0	0	3.100.000	0
1.3.2.3.3.8.25	1	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	5 2009	3,100,000	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		509,024,400			433.118.084	8.578.280	9.102.340	450.798.704	58,225,696
1.3.2.5.1.1		MESIN KETIK		4,000,000			4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.1.1.2	1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	6 2015	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.1.4		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		329,096,000			329.096.000	0	0	329.096.000	0
1.3.2.5.1.4.1	2	Lemari Besi/Metal	12 2005	2,495,000	0	0	2.495.000	0	0	2.495.000	0
1.3.2.5.1.4.1	3	Lemari Besi/Metal	12 1994	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.1.4.1	6	Lemari Besi/Metal	4 2011	2,380,000	0	0	2.380.000	0	0	2.380.000	0
1.3.2.5.1.4.1	7	Lemari Besi/Metal	4 2011	2,380,000	0	0	2.380.000	0	0	2.380.000	0
1.3.2.5.1.4.1	8	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	9	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	10	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	11	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	12	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	13	Lemari Besi/Metal	3 2012	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.1.4.1	14	Lemari Besi/Metal	8 2013	2,700,000	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0
1.3.2.5.1.4.1	15	Lemari Besi/Metal	8 2013	2,700,000	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0
1.3.2.5.1.4.1	16	Lemari Besi/Metal	12 2005	2,495,000	0	0	2.495.000	0	0	2.495.000	0
1.3.2.5.1.4.1	17	Lemari Besi/Metal	6 2014	5,400,000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0
1.3.2.5.1.4.1	18	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.1	19	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.1	20	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.1	21	Lemari Besi/Metal	6 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.2	3	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	4	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.2	5	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	6	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	7	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	8	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	9	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	10	Lemari Kayu	10 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	27	Lemari Kayu	12 1998	560,000	0	0	560.000	0	0	560.000	0
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	6 2012	4,900,000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.4	3	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	4	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	5	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.4	6	Rak Kayu	6 2016	9,000,000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0
1.3.2.5.1.4.5	1	Filing Cabinet Besi	12 2005	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.1.4.5	2	Filing Cabinet Besi	12 2005	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.1.4.5	11	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	12	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	13	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	14	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	15	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	16	Filing Cabinet Besi	3 2012	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.1.4.5	17	Filing Cabinet Besi	8 2013	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	18	Filing Cabinet Besi	8 2013	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	19	Filing Cabinet Besi	12 2004	1,586,000	0	0	1.586.000	0	0	1.586.000	0
1.3.2.5.1.4.5	20	Filing Cabinet Besi	4 2011	4,200,000	0	0	4.200.000	0	0	4.200.000	0
1.3.2.5.1.4.5	22	Filing Cabinet Besi	7 2014	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	23	Filing Cabinet Besi	7 2014	2,425,000	0	0	2.425.000	0	0	2.425.000	0
1.3.2.5.1.4.5	24	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.5	25	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.5	26	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.5	27	Filing Cabinet Besi	6 2016	3,600,000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
1.3.2.5.1.4.7	1	Brandkas	12 2004	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.1.4.7	2	Brandkas	12 2004	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.27	1	Lemari Kaca	12 2009	10,900,000	0	0	10.900.000	0	0	10.900.000	0
1.3.2.5.1.4.2	1	Lemari Kayu	6 2014	14,700,000	0	0	14.700.000	0	0	14.700.000	0
1.3.2.5.1.4.2	7	Lemari Kayu	12 2004	28,825,000	0	0	28.825.000	0	0	28.825.000	0
1.3.2.5.1.4.2	8	Lemari Kayu	12 2004	8,010,000	0	0	8.010.000	0	0	8.010.000	0
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	12 1996	875,000	0	0	875.000	0	0	875.000	0
1.3.2.5.1.4.4	3	Rak Kayu	12 2005	15,950,000	0	0	15.950.000	0	0	15.950.000	0
1.3.2.5.1.4.5	3	Filing Cabinet Besi	12 2005	3,950,000	0	0	3.950.000	0	0	3.950.000	0
1.3.2.5.1.4.2	1	Lemari Kayu	12 2015	27,940,000	0	0	0	0	0	0	27,940,000
1.3.2.5.1.4.2	11	Lemari Kayu	12 2015	0	0	0	27.940.000	0	0	27.940.000	(27,940,000)
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	6 2016	36,000,000	0	0	0	0	0	0	36,000,000
1.3.2.5.1.4.4	7	Rak Kayu	6 2016	0	0	0	36.000.000	0	0	36.000.000	(36,000,000)
1.3.2.5.1.4.5	1	Filing Cabinet Besi	12 2013	4,950,000	0	0	0	0	0	0	4,950,000
1.3.2.5.1.4.5	21	Filing Cabinet Besi	12 2013	0	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	(4,950,000)
1.3.2.5.1.5		ALAT KANTOR LAINNYA		175,928,400			100.022.084	8.578.280	9.102.340	117.702.704	58,225,696
1.3.2.5.1.5.2	1	CCTV - Camera Control Television System	5 2021	19,850,000	0	4	14.556.667	1.985.000	1.985.000	18.526.667	1,323,333
1.3.2.5.1.5.3	1	Papan Visual/Papan Nama	9 2009	9,925,000	0	0	9.925.000	0	0	9.925.000	0
1.3.2.5.1.5.3	3	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	850,000	0	0	850.000	0	0	850.000	0
1.3.2.5.1.5.3	5	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.5.1.5.24	1	Hand Metal Detector	1 2011	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.1.5.24	2	Hand Metal Detector	1 2011	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.1.5.43	1	LCD Projector/Infocus	12 2024	18,000,000	3	11	300.000	1.800.000	1.800.000	3.900.000	14,100,000
1.3.2.5.1.5.43	2	LCD Projector/Infocus	12 2024	18,000,000	3	11	300.000	1.800.000	1.800.000	3.900.000	14,100,000
1.3.2.5.1.5.43	3	LCD Projector/Infocus	12 2024	18,000,000	3	11	300.000	1.800.000	1.800.000	3.900.000	14,100,000
1.3.2.5.1.5.53	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12 2024	5,275,000	3	11	87.917	527.500	527.500	1.142.917	4,132,083
1.3.2.5.1.5.76	2	Papan Nama Instansi	11 2015	4,900,000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.5.88	1	Alat Kantor Lainnya	10 2009	29,800,000	0	0	29.800.000	0	0	29.800.000	0
1.3.2.5.1.5.88	2	Alat Kantor Lainnya	4 2020	6,900,000	0	0	6.555.000	345.000	0	6.900.000	0
1.3.2.5.1.5.88	3	Alat Kantor Lainnya	2 2020	4,950,000	0	0	4.867.500	82.500	0	4.950.000	0
1.3.2.5.1.5.5	1	White Board	12 2005	1,650,000	0	0	1.650.000	0	0	1.650.000	0
1.3.2.5.1.5.3	1	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	7,650,000	0	0	0	0	0	0	7,650,000
1.3.2.5.1.5.3	2	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	4,400,000	0	0	7.650.000	0	0	7.650.000	(3,250,000)
1.3.2.5.1.5.3	4	Papan Visual/Papan Nama	12 2015	0	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000	(4,400,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.5.43	1	LCD Projector/Infocus	5 2025	7,148,400	4	4	0	238.280	714.840	953.120	6,195,280
1.3.2.5.1.5.53	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	7 2025	4,750,000	4	6	0	0	475.000	475.000	4,275,000
1.3.2.5.1.5.76	1	Papan Nama Instansi	12 2013	5,320,000	0	0	5.320.000	0	0	5.320.000	0
1.3.2.5.1.5.77	1	Papan Pengumuman	12 2013	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
1.3.2.5.1.5.77	4	Papan Pengumuman	12 2013	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	(3,500,000)
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		1,919,889,689			1.664.058.292	15.593.671	21.791.539	1.701.443.502	218,446,187
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		798,141,750			763.910.835	6.626.750	3.125.000	773.662.585	24,479,165
1.3.2.5.2.1.2	26	Meja Kerja Kayu	12 1992	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	34	Meja Kerja Kayu	12 1994	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	45	Meja Kerja Kayu	12 2002	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.2	46	Meja Kerja Kayu	12 2002	8,400,000	0	0	8.400.000	0	0	8.400.000	0
1.3.2.5.2.1.2	47	Meja Kerja Kayu	12 2002	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	50	Meja Kerja Kayu	4 2012	5,720,000	0	0	5.720.000	0	0	5.720.000	0
1.3.2.5.2.1.2	54	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	55	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	56	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	57	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	58	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	59	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	60	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	61	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	62	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	63	Meja Kerja Kayu	10 2014	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.2.1.2	65	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	66	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	67	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	68	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	69	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	70	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	71	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	72	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	73	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.2	74	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	75	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	76	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	77	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	78	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	79	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	80	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	82	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	83	Meja Kerja Kayu	5 2016	2,544,000	0	0	2.544.000	0	0	2.544.000	0
1.3.2.5.2.1.2	84	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	0	2.769.250	145.750	0	2.915.000	0
1.3.2.5.2.1.2	85	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	0	2.769.250	145.750	0	2.915.000	0
1.3.2.5.2.1.2	86	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	0	2.769.250	145.750	0	2.915.000	0
1.3.2.5.2.1.2	87	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	0	2.769.250	145.750	0	2.915.000	0
1.3.2.5.2.1.2	88	Meja Kerja Kayu	4 2020	2,915,000	0	0	2.769.250	145.750	0	2.915.000	0
1.3.2.5.2.1.3	7	Kursi Besi/Metal	12 1997	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.3	8	Kursi Besi/Metal	12 1997	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.3	9	Kursi Besi/Metal	12 2002	1,500,000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	24	Kursi Kayu	12 1998	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	33	Kursi Kayu	6 2012	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.2.1.4	34	Kursi Kayu	11 2013	4,250,000	0	0	4.250.000	0	0	4.250.000	0
1.3.2.5.2.1.4	36	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	37	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	38	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	39	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	40	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	41	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	42	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	43	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	45	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	47	Kursi Kayu	12 2002	925,000	0	0	925.000	0	0	925.000	0
1.3.2.5.2.1.4	60	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	61	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.4	62	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	63	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	64	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	65	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	66	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	67	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	68	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	69	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	70	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	71	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	73	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	74	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	75	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	76	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	77	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	78	Kursi Kayu	5 2016	645,000	0	0	645.000	0	0	645.000	0
1.3.2.5.2.1.4	79	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	80	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	81	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	82	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	83	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	84	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	85	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	86	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	87	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	88	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	89	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	90	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	91	Kursi Kayu	5 2018	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.4	92	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	93	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	94	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.4	95	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	96	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	97	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	98	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	99	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	100	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.4	101	Kursi Kayu	4 2020	616,000	0	0	585.200	30.800	0	616.000	0
1.3.2.5.2.1.5	10	Sice	12 1998	950,000	0	0	950.000	0	0	950.000	0
1.3.2.5.2.1.8	1	Meja Rapat	12 2005	78,124,200	0	0	78.124.200	0	0	78.124.200	0
1.3.2.5.2.1.8	4	Meja Rapat	12 2009	9,762,500	0	0	9.762.500	0	0	9.762.500	0
1.3.2.5.2.1.14	2	Meja Resepsionis	12 2024	14,000,000	3	11	233.333	1.400.000	1.400.000	3.033.333	10,966,667
1.3.2.5.2.1.24	1	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	2	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	3	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	4	Meja 1/2 Biro	12 2002	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.1.24	5	Meja 1/2 Biro	12 2002	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.24	6	Meja 1/2 Biro	12 2002	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.24	7	Meja 1/2 Biro	12 2002	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.1.30	2	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	3	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	4	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	5	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	6	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	7	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	8	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	9	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	10	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	11	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	12	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	13	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	14	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	15	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	16	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	17	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	18	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	19	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	20	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	21	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	22	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	23	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	24	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	25	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.30	26	Kursi Rapat	12 2009	902,000	0	0	902.000	0	0	902.000	0
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	12 2005	5,019,000	0	0	5.019.000	0	0	5.019.000	0
1.3.2.5.2.1.31	2	Kursi Tamu	12 2005	5,019,000	0	0	5.019.000	0	0	5.019.000	0
1.3.2.5.2.1.31	3	Kursi Tamu	8 2012	21,750,000	0	0	21.750.000	0	0	21.750.000	0
1.3.2.5.2.1.31	5	Kursi Tamu	12 2015	14,998,500	0	0	14.998.500	0	0	14.998.500	0
1.3.2.5.2.1.31	6	Kursi Tamu	12 2015	14,998,500	0	0	14.998.500	0	0	14.998.500	0
1.3.2.5.2.1.31	7	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	0	11.708.750	616.250	0	12.325.000	0
1.3.2.5.2.1.31	8	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	0	11.708.750	616.250	0	12.325.000	0
1.3.2.5.2.1.31	9	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	0	11.708.750	616.250	0	12.325.000	0
1.3.2.5.2.1.31	10	Kursi Tamu	4 2020	12,325,000	0	0	11.708.750	616.250	0	12.325.000	0
1.3.2.5.2.1.32	7	Kursi Putar	12 2001	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.32	9	Kursi Putar	12 2003	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.32	12	Kursi Putar	12 2024	1,300,000	3	11	21.667	130.000	130.000	281.667	1,018,333
1.3.2.5.2.1.32	13	Kursi Putar	12 2024	1,300,000	3	11	21.667	130.000	130.000	281.667	1,018,333
1.3.2.5.2.1.32	14	Kursi Putar	12 2024	1,300,000	3	11	21.667	130.000	130.000	281.667	1,018,333
1.3.2.5.2.1.39	1	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	2	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	3	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	4	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.39	5	Meja Komputer	5 2016	762,000	0	0	762.000	0	0	762.000	0
1.3.2.5.2.1.2	12	Meja Kerja Kayu	12 2004	5,100,000	0	0	5.100.000	0	0	5.100.000	0
1.3.2.5.2.1.2	13	Meja Kerja Kayu	12 2004	19,900,000	0	0	19.900.000	0	0	19.900.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.2	14	Meja Kerja Kayu	12 2004	7,620,000	0	0	7.620.000	0	0	7.620.000	0
1.3.2.5.2.1.4	1	Kursi Kayu	12 1984	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.4	9	Kursi Kayu	12 1996	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.2.1.4	10	Kursi Kayu	12 1998	1,620,500	0	0	1.620.500	0	0	1.620.500	0
1.3.2.5.2.1.4	12	Kursi Kayu	12 2004	12,500,000	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	13	Kursi Kayu	12 2004	5,400,000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0
1.3.2.5.2.1.5	1	Sice	12 1997	1,350,000	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	0
1.3.2.5.2.1.8	1	Meja Rapat	12 2005	25,111,350	0	0	25.111.350	0	0	25.111.350	0
1.3.2.5.2.1.9	1	Tempat Tidur Besi	6 2015	22,320,000	0	0	22.320.000	0	0	22.320.000	0
1.3.2.5.2.1.12	1	Meja Telepon	12 2007	1,499,850	0	0	1.499.850	0	0	1.499.850	0
1.3.2.5.2.1.12	2	Meja Telepon	12 2007	1,499,850	0	0	1.499.850	0	0	1.499.850	0
1.3.2.5.2.1.17	1	Meja Panjang	12 1989	875,000	0	0	875.000	0	0	875.000	0
1.3.2.5.2.1.24	6	Meja 1/2 Biro	12 2004	28,270,000	0	0	28.270.000	0	0	28.270.000	0
1.3.2.5.2.1.25	1	Kasur/Spring Bed	12 2003	6,675,000	0	0	6.675.000	0	0	6.675.000	0
1.3.2.5.2.1.25	2	Kasur/Spring Bed	12 2003	6,675,000	0	0	6.675.000	0	0	6.675.000	0
1.3.2.5.2.1.30	1	Kursi Rapat	12 2005	9,861,500	0	0	9.861.500	0	0	9.861.500	0
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	12 2003	5,400,000	0	0	5.400.000	0	0	5.400.000	0
1.3.2.5.2.1.33	1	Kursi Biasa	12 2003	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.1.33	2	Kursi Biasa	12 2004	14,910,000	0	0	14.910.000	0	0	14.910.000	0
1.3.2.5.2.1.36	1	Kursi Lipat	12 2005	12,485,000	0	0	12.485.000	0	0	12.485.000	0
1.3.2.5.2.1.48	1	Sofa	12 2009	7,425,000	0	0	7.425.000	0	0	7.425.000	0
1.3.2.5.2.1.50	1	Meubeleur lainnya	12 2003	1,500,000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.2.1.50	2	Meubeleur lainnya	12 2003	1,500,000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
1.3.2.5.2.1.50	3	Meubeleur lainnya	6 2014	9,450,000	0	0	9.450.000	0	0	9.450.000	0
1.3.2.5.2.1.50	11	Meubeleur lainnya	12 1996	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.2	3	Meja Kerja Kayu	12 1998	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
1.3.2.5.2.1.2	4	Meja Kerja Kayu	12 2001	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
1.3.2.5.2.1.2	5	Meja Kerja Kayu	11 2013	12,500,000	0	0	0	0	0	0	12,500,000
1.3.2.5.2.1.2	6	Meja Kerja Kayu	11 2013	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000
1.3.2.5.2.1.2	7	Meja Kerja Kayu	11 2013	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000
1.3.2.5.2.1.2	8	Meja Kerja Kayu	4 2012	8,580,000	0	0	0	0	0	0	8,580,000
1.3.2.5.2.1.2	9	Meja Kerja Kayu	12 2024	4,450,000	0	0	0	0	0	0	4,450,000



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.2	10	Meja Kerja Kayu	12 2024	4,450,000	0	0	0	0	0	0	4,450,000
1.3.2.5.2.1.2	11	Meja Kerja Kayu	12 2024	4,450,000	0	0	0	0	0	0	4,450,000
1.3.2.5.2.1.2	36	Meja Kerja Kayu	12 1998	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	(1,400,000)
1.3.2.5.2.1.2	38	Meja Kerja Kayu	12 2001	0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.2	51	Meja Kerja Kayu	11 2013	0	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	(12,500,000)
1.3.2.5.2.1.2	52	Meja Kerja Kayu	11 2013	0	0	0	11.000.000	0	0	11.000.000	(11,000,000)
1.3.2.5.2.1.2	53	Meja Kerja Kayu	11 2013	0	0	0	24.000.000	0	0	24.000.000	(24,000,000)
1.3.2.5.2.1.2	64	Meja Kerja Kayu	4 2012	0	0	0	8.580.000	0	0	8.580.000	(8,580,000)
1.3.2.5.2.1.2	89	Meja Kerja Kayu	12 2024	0	3	11	74.167	445.000	445.000	964.167	(964,167)
1.3.2.5.2.1.2	90	Meja Kerja Kayu	12 2024	0	3	11	74.167	445.000	445.000	964.167	(964,167)
1.3.2.5.2.1.2	91	Meja Kerja Kayu	12 2024	0	3	11	74.167	445.000	445.000	964.167	(964,167)
1.3.2.5.2.1.4	1	Kursi Kayu	11 2013	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
1.3.2.5.2.1.4	2	Kursi Kayu	6 2012	2,970,000	0	0	0	0	0	0	2,970,000
1.3.2.5.2.1.4	35	Kursi Kayu	11 2013	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	(2,500,000)
1.3.2.5.2.1.4	48	Kursi Kayu	6 2012	0	0	0	2.970.000	0	0	2.970.000	(2,970,000)
1.3.2.5.2.1.8	1	Meja Rapat	11 2013	45,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000
1.3.2.5.2.1.8	3	Meja Rapat	11 2013	0	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	(45,000,000)
1.3.2.5.2.1.30	1	Kursi Rapat	12 2013	39,600,000	0	0	39.600.000	0	0	39.600.000	0
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	11 2013	14,500,000	0	0	0	0	0	0	14,500,000
1.3.2.5.2.1.31	4	Kursi Tamu	11 2013	0	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	(14,500,000)
1.3.2.5.2.1.36	1	Kursi Lipat	11 2013	5,150,000	0	0	0	0	0	0	5,150,000
1.3.2.5.2.1.36	37	Kursi Lipat	11 2013	0	0	0	5.150.000	0	0	5.150.000	(5,150,000)
1.3.2.5.2.3		ALAT PEMBERSIH		48,794,999			39.763.333	410.000	910.000	41.083.333	7,711,666
1.3.2.5.2.3.1	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	8 2013	17,100,000	0	0	17.100.000	0	0	17.100.000	0
1.3.2.5.2.3.3	3	Mesin Pemotong Rumput	12 2024	4,100,000	3	11	68.333	410.000	410.000	888.333	3,211,667
1.3.2.5.2.3.3	4	Mesin Pemotong Rumput	7 2025	4,999,999	4	6	0	0	500.000	500.000	4,499,999
1.3.2.5.2.3.1	2	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5 2009	4,995,000	0	0	4.995.000	0	0	4.995.000	0
1.3.2.5.2.3.3	1	Mesin Pemotong Rumput	5 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.2.3.3	2	Mesin Pemotong Rumput	6 2014	14,600,000	0	0	14.600.000	0	0	14.600.000	0
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		538,588,140			418.476.941	5.743.346	12.451.814	436.672.101	101,916,039
1.3.2.5.2.4.1	1	Lemari Es	12 1998	1,000,000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
1.3.2.5.2.4.3	8	A.C. Window	12 2004	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4.3	12	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	13	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	15	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	16	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	17	A.C. Window	6 2009	5,465,000	0	0	5.465.000	0	0	5.465.000	0
1.3.2.5.2.4.3	21	A.C. Window	7 2013	8,950,000	0	0	8.950.000	0	0	8.950.000	0
1.3.2.5.2.4.3	22	A.C. Window	7 2013	4,875,000	0	0	4.875.000	0	0	4.875.000	0
1.3.2.5.2.4.3	23	A.C. Window	12 2004	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0
1.3.2.5.2.4.3	24	A.C. Window	7 2013	8,950,000	0	0	8.950.000	0	0	8.950.000	0
1.3.2.5.2.4.3	26	A.C. Window	8 2017	8,350,000	0	0	8.350.000	0	0	8.350.000	0
1.3.2.5.2.4.3	27	A.C. Window	8 2017	8,350,000	0	0	8.350.000	0	0	8.350.000	0
1.3.2.5.2.4.4	1	A.C. Split	12 2005	5,610,000	0	0	5.610.000	0	0	5.610.000	0
1.3.2.5.2.4.4	4	A.C. Split	12 2014	3,950,000	0	0	3.950.000	0	0	3.950.000	0
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	3 2012	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	6 2016	3,950,000	0	0	3.950.000	0	0	3.950.000	0
1.3.2.5.2.4.4	7	A.C. Split	3 2012	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.4.4	9	A.C. Split	11 2019	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	11 2019	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	13	A.C. Split	6 2015	6,450,000	0	0	6.450.000	0	0	6.450.000	0
1.3.2.5.2.4.4	14	A.C. Split	6 2015	6,450,000	0	0	6.450.000	0	0	6.450.000	0
1.3.2.5.2.4.4	19	A.C. Split	5 2016	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	20	A.C. Split	6 2015	3,800,000	0	0	3.800.000	0	0	3.800.000	0
1.3.2.5.2.4.4	20	A.C. Split	5 2016	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	25	A.C. Split	7 2016	4,400,000	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000	0
1.3.2.5.2.4.4	35	A.C. Split	4 2012	4,900,000	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	5 2023	5,800,000	2	4	1.933.333	580.000	580.000	3.093.333	2,706,667
1.3.2.5.2.4.4	37	A.C. Split	5 2023	5,800,000	2	4	1.933.333	580.000	580.000	3.093.333	2,706,667
1.3.2.5.2.4.4	38	A.C. Split	12 2024	5,466,500	3	11	91.108	546.650	546.650	1.184.408	4,282,092
1.3.2.5.2.4.4	39	A.C. Split	12 2024	6,950,000	3	11	115.833	695.000	695.000	1.505.833	5,444,167
1.3.2.5.2.4.4	40	A.C. Split	12 2024	10,000,000	3	11	166.667	1.000.000	1.000.000	2.166.667	7,833,333
1.3.2.5.2.4.4	41	A.C. Split	12 2024	10,000,000	3	11	166.667	1.000.000	1.000.000	2.166.667	7,833,333
1.3.2.5.2.4.4	42	A.C. Split	6 2025	10,345,200	4	5	0	172.420	1.034.520	1.206.940	9,138,260



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4.4	43	A.C. Split	6 2025	10,345,200	4	5	0	172.420	1.034.520	1.206.940	9,138,260
1.3.2.5.2.4.4	46	A.C. Split	6 2025	10,345,200	4	5	0	172.420	1.034.520	1.206.940	9,138,260
1.3.2.5.2.4.1	1	Lemari Es	8 2015	7,400,000	0	0	7.400.000	0	0	7.400.000	0
1.3.2.5.2.4.4	4	A.C. Split	12 2007	13,230,000	0	0	13.230.000	0	0	13.230.000	0
1.3.2.5.2.4.4	5	A.C. Split	8 2015	29,820,000	0	0	29.820.000	0	0	29.820.000	0
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	6 2025	7,193,910	0	0	0	0	0	0	7,193,910
1.3.2.5.2.4.4	50	A.C. Split	6 2025	0	4	5	0	119.899	719.391	839.290	(839,290)
1.3.2.5.2.4.6	4	Kipas Angin	12 2003	8,975,000	0	0	8.975.000	0	0	8.975.000	0
1.3.2.5.2.4.4	1	A.C. Split	11 2013	11,300,000	0	0	0	0	0	0	11,300,000
1.3.2.5.2.4.4	2	A.C. Split	11 2019	6,490,000	0	0	6.490.000	0	0	6.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	3	A.C. Split	11 2013	38,500,000	0	0	0	0	0	0	38,500,000
1.3.2.5.2.4.4	4	A.C. Split	11 2013	46,800,000	0	0	0	0	0	0	46,800,000
1.3.2.5.2.4.4	5	A.C. Split	12 2015	47,520,000	0	0	0	0	0	0	47,520,000
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	12 2015	5,775,000	0	0	0	0	0	0	5,775,000
1.3.2.5.2.4.4	7	A.C. Split	12 2015	15,950,000	0	0	0	0	0	0	15,950,000
1.3.2.5.2.4.4	8	A.C. Split	12 2015	29,260,000	0	0	0	0	0	0	29,260,000
1.3.2.5.2.4.4	9	A.C. Split	6 2025	10,345,200	0	0	0	0	0	0	10,345,200
1.3.2.5.2.4.4	10	A.C. Split	11 2013	0	0	0	11.300.000	0	0	11.300.000	(11,300,000)
1.3.2.5.2.4.4	10	A.C. Split	6 2025	10,345,200	0	0	0	0	0	0	10,345,200
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	11 2013	0	0	0	38.500.000	0	0	38.500.000	(38,500,000)
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	6 2025	7,193,910	0	0	0	0	0	0	7,193,910
1.3.2.5.2.4.4	12	A.C. Split	11 2013	0	0	0	46.800.000	0	0	46.800.000	(46,800,000)
1.3.2.5.2.4.4	12	A.C. Split	6 2025	7,193,910	0	0	0	0	0	0	7,193,910
1.3.2.5.2.4.4	13	A.C. Split	6 2025	7,193,910	0	0	0	0	0	0	7,193,910
1.3.2.5.2.4.4	15	A.C. Split	12 2015	0	0	0	47.520.000	0	0	47.520.000	(47,520,000)
1.3.2.5.2.4.4	16	A.C. Split	12 2015	0	0	0	5.775.000	0	0	5.775.000	(5,775,000)
1.3.2.5.2.4.4	17	A.C. Split	12 2015	0	0	0	15.950.000	0	0	15.950.000	(15,950,000)
1.3.2.5.2.4.4	18	A.C. Split	12 2015	0	0	0	29.260.000	0	0	29.260.000	(29,260,000)
1.3.2.5.2.4.4	44	A.C. Split	6 2025	0	4	5	0	172.420	1.034.520	1.206.940	(1,206,940)
1.3.2.5.2.4.4	45	A.C. Split	6 2025	0	4	5	0	172.420	1.034.520	1.206.940	(1,206,940)
1.3.2.5.2.4.4	47	A.C. Split	6 2025	0	4	5	0	119.899	719.391	839.290	(839,290)
1.3.2.5.2.4.4	48	A.C. Split	6 2025	0	4	5	0	119.899	719.391	839.290	(839,290)



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4.4	49	A.C. Split	6 2025	0	4	5	0	119.899	719.391	839.290	(839,290)
1.3.2.5.2.5		ALAT DAPUR		1,380,000			1.380.000	0	0	1.380.000	0
1.3.2.5.2.5.2	2	Kompore Gas (Alat Dapur)	7 2013	1,380,000	0	0	1.380.000	0	0	1.380.000	0
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		516,494,800			424.037.183	2.813.575	5.304.725	432.155.483	84,339,317
1.3.2.5.2.6.2	1	Televisi	12 2024	15,300,000	3	11	255.000	1.530.000	1.530.000	3.315.000	11,985,000
1.3.2.5.2.6.2	2	Televisi	5 2025	21,506,250	4	4	0	716.875	2.150.625	2.867.500	18,638,750
1.3.2.5.2.6.5	1	Amplifier	12 1997	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.2.6.5	2	Amplifier	12 2007	2,420,000	0	0	2.420.000	0	0	2.420.000	0
1.3.2.5.2.6.5	3	Amplifier	11 2009	5,808,000	0	0	5.808.000	0	0	5.808.000	0
1.3.2.5.2.6.7	17	Loudspeaker	12 2024	3,500,000	3	11	58.333	350.000	350.000	758.333	2,741,667
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	10 2015	2,950,000	0	0	2.950.000	0	0	2.950.000	0
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	11 2009	15,023,000	0	0	15.023.000	0	0	15.023.000	0
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	12 2015	122,472,000	0	0	122.472.000	0	0	122.472.000	0
1.3.2.5.2.6.8	4	Sound System	12 2025	28,050,000	4	11	0	0	467.500	467.500	27,582,500
1.3.2.5.2.6.12	1	Wireless	12 2004	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.2.6.12	2	Wireless	12 2004	2,450,000	0	0	2.450.000	0	0	2.450.000	0
1.3.2.5.2.6.14	1	Microphone	12 2007	798,000	0	0	798.000	0	0	798.000	0
1.3.2.5.2.6.14	2	Microphone	12 2004	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.2.6.14	3	Microphone	12 2004	1,800,000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
1.3.2.5.2.6.14	4	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	5	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	6	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	7	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	8	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.14	9	Microphone	8 2017	750,000	0	0	750.000	0	0	750.000	0
1.3.2.5.2.6.17	2	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	3	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	4	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	5	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	6	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	7	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0
1.3.2.5.2.6.17	8	Mic Conference	8 2017	725,000	0	0	725.000	0	0	725.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.6.39	1	Mimbar/Podium	12 2004	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.2.6.48	1	Handy Cam	12 2007	7,500,000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
1.3.2.5.2.6.77	8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2015	74,958,000	0	0	74.958.000	0	0	74.958.000	0
1.3.2.5.2.6.77	9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5 2016	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.2.6.77	11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 2020	6,501,000	0	0	6.284.300	216.700	0	6.501.000	0
1.3.2.5.2.6.2	5	Televisi	8 2015	4,977,500	0	0	4.977.500	0	0	4.977.500	0
1.3.2.5.2.6.5	1	Amplifier	12 2007	1,595,000	0	0	1.595.000	0	0	1.595.000	0
1.3.2.5.2.6.7	1	Loudspeaker	12 2005	1,155,000	0	0	1.155.000	0	0	1.155.000	0
1.3.2.5.2.6.7	2	Loudspeaker	12 2007	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.6.7	3	Loudspeaker	12 2007	2,190,000	0	0	2.190.000	0	0	2.190.000	0
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	12 2005	18,760,500	0	0	18.760.500	0	0	18.760.500	0
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	6 2017	22,950,000	0	0	22.950.000	0	0	22.950.000	0
1.3.2.5.2.6.12	1	Wireless	12 2005	3,390,750	0	0	3.390.750	0	0	3.390.750	0
1.3.2.5.2.6.23	1	Tustel	12 2007	7,150,000	0	0	7.150.000	0	0	7.150.000	0
1.3.2.5.2.6.36	1	Tangga Aluminium	12 2005	975,000	0	0	975.000	0	0	975.000	0
1.3.2.5.2.6.36	2	Tangga Aluminium	8 2015	4,977,500	0	0	4.977.500	0	0	4.977.500	0
1.3.2.5.2.6.39	1	Mimbar/Podium	12 2005	1,975,000	0	0	1.975.000	0	0	1.975.000	0
1.3.2.5.2.6.77	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2005	9,850,000	0	0	9.850.000	0	0	9.850.000	0
1.3.2.5.2.6.77	2	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2007	5,998,800	0	0	5.998.800	0	0	5.998.800	0
1.3.2.5.2.6.77	3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2007	4,530,000	0	0	4.530.000	0	0	4.530.000	0
1.3.2.5.2.6.77	6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	11 2013	23,335,500	0	0	23.335.500	0	0	23.335.500	0
1.3.2.5.2.6.77	7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 2014	41,550,000	0	0	41.550.000	0	0	41.550.000	0
1.3.2.5.2.6.77	9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8 2015	1,900,000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	11 2025	24,198,000	4	10	0	0	806.600	806.600	23,391,400
1.3.2.5.2.7		ALAT PEMADAM KEBAKARAN		16,490,000			16.490.000	0	0	16.490.000	0
1.3.2.5.2.7.1	6	Alat Pemadam/Portable	12 2015	2,590,000	0	0	2.590.000	0	0	2.590.000	0
1.3.2.5.2.7.1	7	Alat Pemadam/Portable	12 2015	6,475,000	0	0	6.475.000	0	0	6.475.000	0
1.3.2.5.2.7.1	1	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	2	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	3	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	4	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0
1.3.2.5.2.7.1	5	Alat Pemadam/Portable	12 2005	1,485,000	0	0	1.485.000	0	0	1.485.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		170,881,800			155.797.633	695.000	1.520.000	158.012.633	12,869,167
1.3.2.5.3.1		MEJA KERJA PEJABAT		34,715,750			34.715.750	0	0	34.715.750	0
1.3.2.5.3.1.5	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.5	6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	4,974,750	0	0	4.974.750	0	0	4.974.750	0
1.3.2.5.3.1.6	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 2016	9,842,000	0	0	9.842.000	0	0	9.842.000	0
1.3.2.5.3.3		KURSI KERJA PEJABAT		43,029,150			27.944.983	695.000	1.520.000	30.159.983	12,869,167
1.3.2.5.3.3.4	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 2012	3,804,000	0	0	3.804.000	0	0	3.804.000	0
1.3.2.5.3.3.4	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	5 2016	4,490,000	0	0	4.490.000	0	0	4.490.000	0
1.3.2.5.3.3.4	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7 2025	8,250,000	4	6	0	0	825.000	825.000	7,425,000
1.3.2.5.3.3.5	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	1,745,075	0	0	1.745.075	0	0	1.745.075	0
1.3.2.5.3.3.5	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	1,745,075	0	0	1.745.075	0	0	1.745.075	0
1.3.2.5.3.3.5	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 2016	4,155,000	0	0	4.155.000	0	0	4.155.000	0
1.3.2.5.3.3.5	6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2024	6,950,000	3	11	115.833	695.000	695.000	1.505.833	5,444,167
1.3.2.5.3.3.6	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 2016	2,695,000	0	0	2.695.000	0	0	2.695.000	0
1.3.2.5.3.3.6	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 2016	2,695,000	0	0	2.695.000	0	0	2.695.000	0
1.3.2.5.3.3.8	1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	2	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.5.3.3.8	1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12 2005	3,960,000	0	0	3.960.000	0	0	3.960.000	0
1.3.2.5.3.4		KURSI RAPAT PEJABAT		30,292,900			30.292.900	0	0	30.292.900	0
1.3.2.5.3.4.2	1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	12 2005	3,940,200	0	0	3.940.200	0	0	3.940.200	0
1.3.2.5.3.4.7	1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	12 2005	22,412,500	0	0	22.412.500	0	0	22.412.500	0
1.3.2.5.3.4.5	1	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	12 2005	3,940,200	0	0	3.940.200	0	0	3.940.200	0
1.3.2.5.3.7		LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		62,844,000			62.844.000	0	0	62.844.000	0
1.3.2.5.3.7.7	1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2005	5,099,600	0	0	5.099.600	0	0	5.099.600	0
1.3.2.5.3.7.7	2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2005	5,099,600	0	0	5.099.600	0	0	5.099.600	0
1.3.2.5.3.7.7	3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10 2009	9,812,500	0	0	9.812.500	0	0	9.812.500	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.7.7	4	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10 2009	9,812,500	0	0	9.812.500	0	0	9.812.500	0
1.3.2.5.3.7.6	1	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	12 2005	11,899,800	0	0	11.899.800	0	0	11.899.800	0
1.3.2.5.3.7.7	1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2009	7,040,000	0	0	7.040.000	0	0	7.040.000	0
1.3.2.5.3.7.7	2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2009	7,040,000	0	0	7.040.000	0	0	7.040.000	0
1.3.2.5.3.7.7	3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12 2009	7,040,000	0	0	7.040.000	0	0	7.040.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		379,050,500			123.680.016	10.992.100	14.113.458	148.785.574	230,264,926
1.3.2.6.1.1		PERALATAN STUDIO AUDIO		98,418,000			42.073.000	5.730.000	5.730.000	53.533.000	44,885,000
1.3.2.6.1.1.7	1	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	12 2024	49,800,000	3	11	830.000	4.980.000	4.980.000	10.790.000	39,010,000
1.3.2.6.1.1.36	1	Microphone/Wireless MIC	11 2013	13,700,000	0	0	13.700.000	0	0	13.700.000	0
1.3.2.6.1.1.48	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	4	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	6	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 2016	1,287,000	0	0	1.287.000	0	0	1.287.000	0
1.3.2.6.1.1.48	7	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6 2018	1,848,000	0	0	1.848.000	0	0	1.848.000	0
1.3.2.6.1.1.48	8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6 2018	1,848,000	0	0	1.848.000	0	0	1.848.000	0
1.3.2.6.1.1.48	9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7 2019	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.6.1.1.48	10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7 2019	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.6.1.1.48	11	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7 2019	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.6.1.1.48	12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	3	11	25.000	150.000	150.000	325.000	1,175,000
1.3.2.6.1.1.48	13	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	3	11	25.000	150.000	150.000	325.000	1,175,000
1.3.2.6.1.1.48	14	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	3	11	25.000	150.000	150.000	325.000	1,175,000
1.3.2.6.1.1.48	15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	3	11	25.000	150.000	150.000	325.000	1,175,000
1.3.2.6.1.1.48	16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12 2024	1,500,000	3	11	25.000	150.000	150.000	325.000	1,175,000
1.3.2.6.1.1.72	1	Audio Cassette Recorder	3 2012	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.6.1.1.72	2	Audio Cassette Recorder	3 2012	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.6.1.1.36	1	Microphone/Wireless MIC	6 2014	10,800,000	0	0	10.800.000	0	0	10.800.000	0
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		250,829,000			81.607.016	5.262.100	7.886.733	94.755.849	156,073,151
1.3.2.6.1.2.60	3	Camera Film	3 2012	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.6.1.2.105	3	Layar Film/Projector	12 2015	9,955,000	0	0	9.955.000	0	0	9.955.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.1.2.105	4	Layar Film/Projector	12 2015	9,955,000	0	0	9.955.000	0	0	9.955.000	0
1.3.2.6.1.2.105	6	Layar Film/Projector	5 2016	11,550,000	0	0	11.550.000	0	0	11.550.000	0
1.3.2.6.1.2.126	1	Camera Digital	12 2024	26,321,000	3	11	438.683	2.632.100	2.632.100	5.702.883	20,618,117
1.3.2.6.1.2.126	2	Camera Digital	12 2024	26,300,000	3	11	438.333	2.630.000	2.630.000	5.698.333	20,601,667
1.3.2.6.1.2.126	3	Camera Digital	11 2025	40,000,000	4	10	0	0	1.333.333	1.333.333	38,666,667
1.3.2.6.1.2.130	1	Video Conference	12 2025	38,739,000	4	11	0	0	645.650	645.650	38,093,350
1.3.2.6.1.2.163	1	Camera Conference	12 2025	38,739,000	4	11	0	0	645.650	645.650	38,093,350
1.3.2.6.1.2.105	1	Layar Film/Projector	8 2013	34,520,000	0	0	34.520.000	0	0	34.520.000	0
1.3.2.6.1.6	1	ALAT STUDIO LAINNYA	12 2025	29,803,500	4	11	0	0	496.725	496.725	29,306,775
1.3.2.6.1.6.1		Alat Studio Lainnya		29,803,500			0	0	496.725	496.725	29,306,775
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		86,135,000			86.135.000	0	0	86.135.000	0
1.3.2.6.2.1	2	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	11 2009	78,160,000	0	0	78.160.000	0	0	78.160.000	0
1.3.2.6.2.1.1		Telephone (PABX)		34,950,000			34.950.000	0	0	34.950.000	0
1.3.2.6.2.1.10		Facsimile		8,200,000			8.200.000	0	0	8.200.000	0
1.3.2.6.2.1.10		Facsimile		6,545,000			6.545.000	0	0	6.545.000	0
1.3.2.6.2.1.1		Telephone (PABX)		28,465,000			28.465.000	0	0	28.465.000	0
1.3.2.6.2.6	1	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	12 2009	7,975,000	0	0	7.975.000	0	0	7.975.000	0
1.3.2.6.2.6.2		Wireless Amplifier		7,975,000			7.975.000	0	0	7.975.000	0
1.3.2.8		ALAT LABORATORIUM		11,902,000			11.902.000	0	0	11.902.000	0
1.3.2.8.1		UNIT ALAT LABORATORIUM									
1.3.2.8.1.56	1	ALAT LABORATORIUM LAIN	12 2005	11,902,000	0	0	11.902.000	0	0	11.902.000	0
1.3.2.8.1.56.81		Meja Kerja		11,902,000			11.902.000	0	0	11.902.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER		985,207,100			449.471.877	46.521.092	68.371.899	564.364.868	420,842,232
1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT										
1.3.2.10.1.1	KOMPUTER JARINGAN	69,805,000	1.454.271		8.725.625	8.725.625					
1.3.2.10.1.1.4	2	Internet	12 2024	69,805,000	2	11	1.454.271	8.725.625	8.725.625	18.905.521	50,899,479
1.3.2.10.1.2	17	PERSONAL KOMPUTER	11 2011	915,402,100	0	0	448.017.606	37.795.467	59.646.274	545.459.347	369,942,753
1.3.2.10.1.2.1		P.C Unit		12,494,000			12.494.000	0	0	12.494.000	0
1.3.2.10.1.2.1		P.C Unit		4 2012			12,676,400	0	0	12.676.400	0
1.3.2.10.1.2.1		P.C Unit		11 2013			29,700,000	0	0	29.700.000	0
1.3.2.10.1.2.1		P.C Unit		9 2015			13,950,000	0	0	13.950.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.1	46	P.C Unit	12 2015	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.10.1.2.1	47	P.C Unit	12 2015	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.10.1.2.1	48	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	49	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	53	P.C Unit	6 2018	13,353,000	0	0	13.353.000	0	0	13.353.000	0
1.3.2.10.1.2.1	55	P.C Unit	7 2019	9,866,667	0	0	9.866.667	0	0	9.866.667	0
1.3.2.10.1.2.1	56	P.C Unit	7 2019	9,866,667	0	0	9.866.667	0	0	9.866.667	0
1.3.2.10.1.2.1	57	P.C Unit	7 2019	0	0	0	9.866.666	0	0	9.866.666	(9,866,666)
1.3.2.10.1.2.1	58	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	0	10.601.171	1.514.454	0	12.115.625	0
1.3.2.10.1.2.1	59	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	0	10.601.171	1.514.454	0	12.115.625	0
1.3.2.10.1.2.1	60	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	0	10.601.171	1.514.454	0	12.115.625	0
1.3.2.10.1.2.1	61	P.C Unit	7 2021	12,115,625	0	0	10.601.171	1.514.454	0	12.115.625	0
1.3.2.10.1.2.1	62	P.C Unit	4 2023	15,000,000	1	3	6.562.500	1.875.000	1.875.000	10.312.500	4,687,500
1.3.2.10.1.2.1	63	P.C Unit	6 2024	14,188,500	4	10	4.138.312	3.547.126	3.547.124	11.232.562	2,955,938
1.3.2.10.1.2.1	64	P.C Unit	6 2024	14,188,500	0	0	0	0	0	0	14,188,500
1.3.2.10.1.2.1	65	P.C Unit	12 2024	20,000,000	2	11	416.667	2.500.000	2.500.000	5.416.667	14,583,333
1.3.2.10.1.2.1	66	P.C Unit	12 2024	20,000,000	2	11	416.667	2.500.000	2.500.000	5.416.667	14,583,333
1.3.2.10.1.2.1	67	P.C Unit	12 2024	20,000,000	2	11	416.667	2.500.000	2.500.000	5.416.667	14,583,333
1.3.2.10.1.2.1	68	P.C Unit	12 2024	20,000,000	2	11	416.667	2.500.000	2.500.000	5.416.667	14,583,333
1.3.2.10.1.2.1	69	P.C Unit	12 2024	20,000,000	2	11	416.667	2.500.000	2.500.000	5.416.667	14,583,333
1.3.2.10.1.2.1	73	P.C Unit	6 2025	0	17	1	0	1.789.875	10.739.250	12.529.125	(12,529,125)
1.3.2.10.1.2.1	74	P.C Unit	6 2025	17,182,800	0	0	0	0	0	0	17,182,800
1.3.2.10.1.2.1	75	P.C Unit	6 2025	17,182,800	0	0	0	0	0	0	17,182,800
1.3.2.10.1.2.1	76	P.C Unit	6 2025	17,182,800	0	0	0	0	0	0	17,182,800
1.3.2.10.1.2.1	77	P.C Unit	6 2025	17,182,800	0	0	0	0	0	0	17,182,800
1.3.2.10.1.2.1	78	P.C Unit	6 2025	17,182,800	0	0	0	0	0	0	17,182,800
1.3.2.10.1.2.1	79	P.C Unit	7 2019	9,866,666	0	0	0	0	0	0	9,866,666
1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	3 2010	19,800,000	0	0	19.800.000	0	0	19.800.000	0
1.3.2.10.1.2.2	4	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	5	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	6	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0
1.3.2.10.1.2.2	7	Lap Top	3 2016	7,700,000	0	0	7.700.000	0	0	7.700.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.2	8	Lap Top	7 2019	9,470,000	0	0	9.470.000	0	0	9.470.000	0
1.3.2.10.1.2.2	9	Lap Top	7 2021	13,600,000	0	0	11.900.000	1.700.000	0	13.600.000	0
1.3.2.10.1.2.2	10	Lap Top	7 2021	13,600,000	0	0	11.900.000	1.700.000	0	13.600.000	0
1.3.2.10.1.2.2	11	Lap Top	7 2021	13,600,000	0	0	11.900.000	1.700.000	0	13.600.000	0
1.3.2.10.1.2.2	12	Lap Top	6 2024	7,950,000	2	5	1.159.375	993.750	993.750	3.146.875	4,803,125
1.3.2.10.1.2.2	13	Lap Top	7 2025	19,314,000	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	16,899,750
1.3.2.10.1.2.2	14	Lap Top	7 2025	19,314,000	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	16,899,750
1.3.2.10.1.2.2	15	Lap Top	7 2025	19,314,000	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	16,899,750
1.3.2.10.1.2.2	16	Lap Top	7 2025	19,314,000	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	16,899,750
1.3.2.10.1.2.2	17	Lap Top	7 2025	19,314,000	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	16,899,750
1.3.2.10.1.2.3	8	Note Book	5 2011	14,600,000	0	0	14.600.000	0	0	14.600.000	0
1.3.2.10.1.2.3	12	Note Book	4 2012	14,520,000	0	0	14.520.000	0	0	14.520.000	0
1.3.2.10.1.2.3	16	Note Book	9 2015	8,900,000	0	0	8.900.000	0	0	8.900.000	0
1.3.2.10.1.2.3	17	Note Book	12 2015	8,888,000	0	0	8.888.000	0	0	8.888.000	0
1.3.2.10.1.2.3	18	Note Book	12 2015	8,888,000	0	0	8.888.000	0	0	8.888.000	0
1.3.2.10.1.2.3	19	Note Book	12 2024	10,500,000	2	11	218.750	1.312.500	1.312.500	2.843.750	7,656,250
1.3.2.10.1.2.3	20	Note Book	12 2024	10,500,000	2	11	218.750	1.312.500	1.312.500	2.843.750	7,656,250
1.3.2.10.1.2.1	3	P.C Unit	7 2009	14,800,000	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	0
1.3.2.10.1.2.1	4	P.C Unit	12 2009	14,905,000	0	0	14.905.000	0	0	14.905.000	0
1.3.2.10.1.2.1	5	P.C Unit	7 2013	14,800,000	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	0
1.3.2.10.1.2.1	6	P.C Unit	6 2014	14,760,000	0	0	14.760.000	0	0	14.760.000	0
1.3.2.10.1.2.1	7	P.C Unit	4 2023	15,000,000	1	3	6.562.500	1.875.000	1.875.000	10.312.500	4,687,500
1.3.2.10.1.2.2	1	Lap Top	7 2009	12,600,000	0	0	12.600.000	0	0	12.600.000	0
1.3.2.10.1.2.1	1	P.C Unit	6 2025	17,182,800	3	5	0	357.975	2.147.850	2.505.825	14,676,975
1.3.2.10.1.2.1	2	P.C Unit	6 2025	17,182,800	3	5	0	357.975	2.147.850	2.505.825	14,676,975
1.3.2.10.1.2.1	3	P.C Unit	6 2025	17,182,800	3	5	0	357.975	2.147.850	2.505.825	14,676,975
1.3.2.10.1.2.1	4	P.C Unit	6 2025	17,182,800	3	5	0	357.975	2.147.850	2.505.825	14,676,975
1.3.2.10.1.2.2	1	Lap Top	7 2025	19,314,000	0	0	0	0	0	0	19,314,000
1.3.2.10.1.2.2	2	Lap Top	7 2025	19,314,000	0	0	0	0	0	0	19,314,000
1.3.2.10.1.2.2	18	Lap Top	7 2025	0	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	(2,414,250)
1.3.2.10.1.2.2	19	Lap Top	7 2025	0	3	6	0	0	2.414.250	2.414.250	(2,414,250)
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		115,659,500			76.597.155	5.079.470	3.770.688	85.447.313	30,212,187



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		99,894,500			76.534.655	4.704.470	3.129.750	84.368.875	15,525,625
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2007	2,146,375	0	0	2.146.375	0	0	2.146.375	0
1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2007	2,146,375	0	0	2.146.375	0	0	2.146.375	0
1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2011	2,406,000	0	0	2.406.000	0	0	2.406.000	0
1.3.2.10.2.3.3	7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 2011	1,400,000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0
1.3.2.10.2.3.3	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 2012	2,288,000	0	0	2.288.000	0	0	2.288.000	0
1.3.2.10.2.3.3	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 2012	2,288,000	0	0	2.288.000	0	0	2.288.000	0
1.3.2.10.2.3.3	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4 2012	2,288,000	0	0	2.288.000	0	0	2.288.000	0
1.3.2.10.2.3.3	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2012	2,420,000	0	0	2.420.000	0	0	2.420.000	0
1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	3,465,000	0	0	3.465.000	0	0	3.465.000	0
1.3.2.10.2.3.3	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 2016	4,125,000	0	0	4.125.000	0	0	4.125.000	0
1.3.2.10.2.3.3	19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9 2017	4,164,000	0	0	4.164.000	0	0	4.164.000	0
1.3.2.10.2.3.3	20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2018	4,102,000	0	0	4.102.000	0	0	4.102.000	0
1.3.2.10.2.3.3	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2018	4,102,000	0	0	4.102.000	0	0	4.102.000	0
1.3.2.10.2.3.3	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	0	2.204.606	314.944	0	2.519.550	0
1.3.2.10.2.3.3	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	0	2.204.606	314.944	0	2.519.550	0
1.3.2.10.2.3.3	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	0	2.204.606	314.944	0	2.519.550	0
1.3.2.10.2.3.3	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	0	2.204.606	314.944	0	2.519.550	0
1.3.2.10.2.3.3	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2021	2,519,550	0	0	2.204.606	314.944	0	2.519.550	0
1.3.2.10.2.3.3	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 2023	3,450,000	1	4	1.437.500	431.250	431.250	2.300.000	1,150,000
1.3.2.10.2.3.3	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2024	18,138,000	2	11	377.875	2.267.250	2.267.250	4.912.375	13,225,625
1.3.2.10.2.3.2	1	Monitor	7 2009	7,650,000	0	0	7.650.000	0	0	7.650.000	0
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2013	2,487,000	0	0	2.487.000	0	0	2.487.000	0
1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 2023	3,450,000	1	4	1.437.500	431.250	431.250	2.300.000	1,150,000
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2011	2,406,000	0	0	0	0	0	0	2,406,000
1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2011	0	0	0	2.406.000	0	0	2.406.000	(2,406,000)
1.3.2.10.2.4		PERALATAN JARINGAN		15,765,000			62.500	375.000	640.938	1.078.438	14,686,562
1.3.2.10.2.4.23	1	Wireless Access Point	12 2024	3,000,000	2	11	62.500	375.000	375.000	812.500	2,187,500
1.3.2.10.2.4.26	1	Acces Point	12 2025	12,765,000	3	11	0	0	265.938	265.938	12,499,062



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		8,965,554,654			2,532,588,655	88,460,631	88,648,495	2,709,697,781	6,255,856,873
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG									
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		8,906,994,654			2.507.895.855	87.875.031	88.062.895	2.683.833.781	6,223,160,873
1.3.3.1.1.1		BANGUNAN GEDUNG KANTOR		6,880,112,240			1.646.400.248	67.273.079	67.460.943	1.781.134.270	5,098,977,970
1.3.3.1.1.1.1	14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 2004	310,041,000	28	11	124.533.135	3.100.410	3.100.410	130.733.955	179,307,045
1.3.3.1.1.1.1	15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 1993	798,086,940	32	11	285.976.067	6.452.826	6.640.690	299.069.583	499,017,357
1.3.3.1.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 2009	452,782,000	33	11	136.589.237	4.527.820	4.527.820	145.644.877	307,137,123
1.3.3.1.1.1.1	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9 2014	5,319,202,300	38	8	1.099.301.809	53.192.023	53.192.023	1.205.685.855	4,113,516,445
1.3.3.1.1.9		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN		1,031,250,000			392.547.339	10.329.423	10.329.423	413.206.185	618,043,815
1.3.3.1.1.9.1	1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	12 2005	1,031,250,000	29	11	392.547.339	10.329.423	10.329.423	413.206.185	618,043,815
1.3.3.1.1.10		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN		949,040,260			467.317.541	9.806.607	9.806.607	486.930.755	462,109,505
1.3.3.1.1.10.5	2	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	12 2014	39,500,000	38	11	7.965.833	395.000	395.000	8.755.833	30,744,167
1.3.3.1.1.10.1	1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12 1998	909,540,260	22	11	459.351.708	9.411.607	9.411.607	478.174.922	431,365,338
1.3.3.1.1.37		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA		46,592,154			1.630.727	465.922	465.922	2.562.571	44,029,583
1.3.3.1.1.37.1	1	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	4 2023	46,592,154	47	3	1.630.727	465.922	465.922	2.562.571	44,029,583
1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		58,560,000			24.692.800	585.600	585.600	25.864.000	32,696,000
1.3.3.1.2.5		ASRAMA		58,560,000			24.692.800	585.600	585.600	25.864.000	32,696,000
1.3.3.1.2.5.1	1	Asrama Permanen	12 2003	58,560,000	27	11	24.692.800	585.600	585.600	25.864.000	32,696,000
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		264,662,692			39,072,166	3,891,663	3,891,662	46,855,491	217,807,201
1.3.4.2		BANGUNAN AIR									
1.3.4.2.6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		2,936,650			740.279	36.708	36.708	813.695	2,122,955
1.3.4.2.6.3		BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU		2,936,650			740.279	36.708	36.708	813.695	2,122,955
1.3.4.2.6.3.3	1	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	12 2014	2,936,650	28	11	740.279	36.708	36.708	813.695	2,122,955
1.3.4.3		INSTALASI									
1.3.4.3.1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		115,481,042			320.781	1.924.684	1.924.684	4.170.149	111,310,893
1.3.4.3.1.2		INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR		115,481,042			320.781	1.924.684	1.924.684	4.170.149	111,310,893
1.3.4.3.1.2.2	1	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Sedang	12 2024	115,481,042	28	11	320.781	1.924.684	1.924.684	4.170.149	111,310,893
1.3.4.3.6		INSTALASI GARDU LISTRIK		121,715,000			29.698.167	1.521.438	1.521.437	32.741.042	88,973,958



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.4.3.6.3	2	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK		121,715,000			29.698.167	1.521.438	1.521.437	32.741.042	88,973,958
1.3.4.3.6.3.3		Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	9 2014	51,920,000	28	8	13.412.667	649.000	649.000	14.710.667	37,209,333
1.3.4.3.6.3.3		Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	9 2015	69,795,000	29	8	16.285.500	872.438	872.437	18.030.375	51,764,625
1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN		24,530,000			8.312.939	408.833	408.833	9.130.605	15,399,395
1.3.4.3.7.1	3	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT		24,530,000			8.312.939	408.833	408.833	9.130.605	15,399,395
1.3.4.3.7.1.4		Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK)	11 2014	24,530,000	18	10	8.312.939	408.833	408.833	9.130.605	15,399,395
5		ASET TETAP LAINNYA		11,573,000			0	0	0	0	11,573,000
1.3.5.1		BAHAN PERPUSTAKAAN									
1.3.5.1.1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		10,973,000			0	0	0	0	10,973,000
1.3.5.1.1.1	1	BUKU UMUM		9,393,000			0	0	0	0	9,393,000
1.3.5.1.1.1.5		Ilmu Perpustakaan	12 2003	9,393,000	0	0	0	0	0	0	9,393,000
1.3.5.1.1.4		BUKU ILMU SOSIAL		1,580,000			0	0	0	0	1,580,000
1.3.5.1.1.4.4	1	Ekonomi	12 2003	1,580,000	0	0	0	0	0	0	1,580,000
1.3.5.1.5		KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		600,000			0	0	0	0	600,000
1.3.5.1.5.1		KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		600,000			0	0	0	0	600,000
1.3.5.1.5.1.1	1	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original)	12 1989	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
1.3.5.1.5.1.6	1	Karya Seni Lain-lain	12 1995	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
Jumlah Aset Tetap				15,424,019,334			7.549.588.926	181.786.193	213.184.367	7.944.559.486	7,479,459,848
Aset Tetap yang dihapuskan				297,648,975							
2		PERALATAN DAN MESIN		297,648,975			297,648,975	0	0	297,648,975	0
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2,600,000			2.600.000	0	0	2.600.000	0
1.3.2.2.1.4	23	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		2,600,000			2.600.000	0	0	2.600.000	0
1.3.2.2.1.4.1		Sepeda Motor	12 1995	2,600,000	0	0	2.600.000	0	0	2.600.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		12,195,000			12.195.000	0	0	12.195.000	0
1.3.2.5.1.1	1	MESIN KETIK		3,250,000			3.250.000	0	0	3.250.000	0
1.3.2.5.1.1.1		Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	6 2009	3,250,000	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		8,945,000			8.945.000	0	0	8.945.000	0
1.3.2.5.1.4.1	1	Lemari Besi/Metal	12 2005	4,990,000	0	0	4.990.000	0	0	4.990.000	0
1.3.2.5.1.4.2	1	Lemari Kayu	12 1996	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.1.4.2	4	Lemari Kayu	12 1996	1,780,000	0	0	1.780.000	0	0	1.780.000	0
1.3.2.5.1.4.5	2	Filing Cabinet Besi	12 1995	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.1.4.7	1	Brandkas	12 1982	975,000	0	0	975.000	0	0	975.000	0
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		95,412,000			95.412.000	0	0	95.412.000	0
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		12,192,000			12.192.000	0	0	12.192.000	0
1.3.2.5.2.1.4	44	Kursi Kayu	10 2014	600,000	0	0	600.000	0	0	600.000	0
1.3.2.5.2.1.2	1	Meja Kerja Kayu	12 1982	702,000	0	0	702.000	0	0	702.000	0
1.3.2.5.2.1.2	2	Meja Kerja Kayu	12 1982	1,015,000	0	0	1.015.000	0	0	1.015.000	0
1.3.2.5.2.1.2	11	Meja Kerja Kayu	12 1996	4,080,000	0	0	4.080.000	0	0	4.080.000	0
1.3.2.5.2.1.2	15	Meja Kerja Kayu	5 2009	995,000	0	0	995.000	0	0	995.000	0
1.3.2.5.2.1.10	5	Tempat Tidur Kayu	12 1994	1,800,000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
1.3.2.5.2.1.10	10	Tempat Tidur Kayu	12 1996	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.10	12	Tempat Tidur Kayu	12 1996	1,800,000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
1.3.2.5.2.3		ALAT PEMBERSIH		2,475,000			2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.2.3.1	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	12 2005	2,475,000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000	0
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		5,800,000			5.800.000	0	0	5.800.000	0
1.3.2.5.2.4.4	24	A.C. Split	12 2008	5,800,000	0	0	5.800.000	0	0	5.800.000	0
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		74,945,000			74.945.000	0	0	74.945.000	0
1.3.2.5.2.6.17	1	Mic Conference	12 2004	12,900,000	0	0	12.900.000	0	0	12.900.000	0
1.3.2.5.2.6.21	1	Camera Video	4 2012	12,441,000	0	0	12.441.000	0	0	12.441.000	0
1.3.2.5.2.6.77	6	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4 2012	11,715,000	0	0	11.715.000	0	0	11.715.000	0
1.3.2.5.2.6.77	7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7 2012	1,787,500	0	0	1.787.500	0	0	1.787.500	0
1.3.2.5.2.6.2	2	Televisi	12 1997	2,250,000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0
1.3.2.5.2.6.2	3	Televisi	12 2004	6,789,000	0	0	6.789.000	0	0	6.789.000	0
1.3.2.5.2.6.2	4	Televisi	12 2007	4,975,000	0	0	4.975.000	0	0	4.975.000	0
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	12 2003	15,527,500	0	0	15.527.500	0	0	15.527.500	0
1.3.2.5.2.6.38	1	Dispenser	12 2007	1,580,000	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	0
1.3.2.5.2.6.38	2	Dispenser	5 2009	1,660,000	0	0	1.660.000	0	0	1.660.000	0
1.3.2.5.2.6.38	3	Dispenser	5 2009	1,660,000	0	0	1.660.000	0	0	1.660.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.6.38	4	Dispenser	5 2009	1,660,000	0	0	1.660.000	0	0	1.660.000	0
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		2,380,075			2.380.075	0	0	2.380.075	0
1.3.2.5.3.3		KURSI KERJA PEJABAT		2,380,075			2.380.075	0	0	2.380.075	0
1.3.2.5.3.3.5	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2005	1,745,075	0	0	1.745.075	0	0	1.745.075	0
1.3.2.5.3.3.8	4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 2016	635,000	0	0	635.000	0	0	635.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		31,300,000			31.300.000	0	0	31.300.000	0
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		31,300,000			31.300.000	0	0	31.300.000	0
1.3.2.6.1.2.105	2	Layar Film/Projector	11 2013	19,750,000	0	0	19.750.000	0	0	19.750.000	0
1.3.2.6.1.2.105	5	Layar Film/Projector	5 2016	11,550,000	0	0	11.550.000	0	0	11.550.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		146,411,900			146.411.900	0	0	146.411.900	0
1.3.2.10.1.2		PERSONAL KOMPUTER		146,411,900			146.411.900	0	0	146.411.900	0
1.3.2.10.1.2.1	11	P.C Unit	9 2009	12,000,000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
1.3.2.10.1.2.1	12	P.C Unit	9 2009	12,000,000	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
1.3.2.10.1.2.1	15	P.C Unit	11 2011	12,494,000	0	0	12.494.000	0	0	12.494.000	0
1.3.2.10.1.2.1	19	P.C Unit	4 2012	12,676,400	0	0	12.676.400	0	0	12.676.400	0
1.3.2.10.1.2.1	35	P.C Unit	7 2012	16,966,000	0	0	16.966.000	0	0	16.966.000	0
1.3.2.10.1.2.1	36	P.C Unit	7 2012	7,475,000	0	0	7.475.000	0	0	7.475.000	0
1.3.2.10.1.2.1	44	P.C Unit	10 2014	14,900,000	0	0	14.900.000	0	0	14.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	50	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	51	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	52	P.C Unit	3 2016	9,982,500	0	0	9.982.500	0	0	9.982.500	0
1.3.2.10.1.2.1	54	P.C Unit	6 2018	13,353,000	0	0	13.353.000	0	0	13.353.000	0
1.3.2.10.1.2.3	3	Note Book	5 2011	14,600,000	0	0	14.600.000	0	0	14.600.000	0
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		7,350,000			7.350.000	0	0	7.350.000	0
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		7,350,000			7.350.000	0	0	7.350.000	0
1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 2011	7,350,000	0	0	7.350.000	0	0	7.350.000	0
Jumlah Aset Tetap yang dihapuskan				297,648,975			297.648.975	0	0	297.648.975	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Perindustrian

Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Jumlah				15,721,668,309			7.847.237.901	181.786.193	213.184.367	8.242.208.461	7,479,459,848

LAMPIRAN XI



BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.05.01.04.001	0001 s/d 0002	Lemari Besi/Metal	Elite / -	-	-	Pembelian	2002	-		1	2	418.000,00	
2	02.05.01.04.002	0005	Lemari Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1983	-		1	1	150.000,00	
3	02.05.01.04.002	0022	Lemari Kayu	Almari arsip	-		Pembelian	1985			1	1	300.000,00	
4	02.05.01.04.002	0023	Lemari Kayu	Alamari arsip	-		Pembelian	1985			1	1	250.000,00	
5	02.05.01.04.002	0007	Lemari Kayu	Almari arsip	-		Pembelian	1987			1	1	150.000,00	
6	02.05.01.04.002	0001	Lemari Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1988	-		1	1	150.000,00	
7	02.05.01.04.002	0017	Lemari Kayu	almari arsip	-		Pembelian	1992			1	1	200.000,00	
8	02.05.01.04.002	0001 s/d 0002	Lemari Kayu	Almari arsip	-		Pembelian	1995			1	2	600.000,00	
9	02.05.01.04.002	0012	Lemari Kayu	Almari arsip	-		Pembelian	1996			1	1	200.000,00	
10	02.05.01.04.002	0020	Lemari Kayu	almari arsip	-		Pembelian	2001			1	1	300.000,00	
11	02.05.01.04.002	0005	Lemari Kayu	0 / Lemari Kecil	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	25.000,00	
12	02.05.01.04.002	0006	Lemari Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	250.000,00	
13	02.05.01.04.003	0001	Rak Besi	0 / Rak piring almunium	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	145.000,00	
14	02.05.01.04.004	0001	Rak Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1979	-		1	1	200.000,00	
15	02.05.01.04.004	0002	Rak Kayu	- / -	-	kayu kaca	Pembelian	1979			1	1	100.000,00	
16	02.05.01.04.004	0002	Rak Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1980	-		1	1	150.000,00	
17	02.05.01.04.004	0003	Rak Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1981	-		1	1	100.000,00	
18	02.05.01.04.004	0004	Rak Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1982	-		1	1	100.000,00	
19	02.05.01.04.004	0002	Rak Kayu	0 / Rak TV	-	-	Pembelian	1997	-		1	1	250.000,00	
20	02.05.01.04.005	0003	Filing Cabinet Besi	Yunika / -	-	-	Pembelian	1982	-		1	1	100.000,00	
21	02.05.01.04.005	0004	Filing Cabinet Besi	Royal / -	-	-	Pembelian	1983	-		1	1	100.000,00	
22	02.05.01.04.008	0001	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	SR 23 / -	-	Besi	Pembelian	2003	-		1	1	62.500,00	
23	02.05.01.05.005	0002	White Board	Mitsubhsi / -	-	-	Pembelian	1985	-		1	1	75.000,00	
24	02.05.01.05.005	0003	White Board	0 / -	-	-	Pembelian	1986	-		1	1	75.000,00	
25	02.05.01.05.005	0004	White Board	0 / -	-	-	Pembelian	1991	-		2	1	75.000,00	
26	02.05.01.05.005	0005	White Board	Mitsubhsi / -	-	-	Pembelian	1995	-		1	1	75.000,00	
27	02.05.01.05.005	0007	White Board	Sansiba / -	-	-	Pembelian	1998	-		1	1	75.000,00	
28	02.05.01.05.005	0008	White Board	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	75.000,00	



BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	02.05.01.05.077	0001 s/d 0002	Papan Pengumuman	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	2	150.000,00	
30	02.05.01.05.077	0002	Papan Pengumuman	0 / Papan Jumlah PK	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	
31	02.05.02.01.002	0001 s/d 0002	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1980	-		1	2	175.000,00	
32	02.05.02.01.002	0001 s/d 0002	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1982	-		1	2	150.000,00	
33	02.05.02.01.002	0001 s/d 0004	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1983	-		1	4	400.000,00	
34	02.05.02.01.002	0081	Meja Kerja Kayu	- / -	-	kayu	Pembelian	1983	-		1	1	100.000,00	
35	02.05.02.01.002	0001 s/d 0002	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1984	-		1	2	100.000,00	
36	02.05.02.01.002	0016	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1984	-		2	1	150.000,00	
37	02.05.02.01.002	0001 s/d 0003	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1986	-		1	3	190.000,00	
38	02.05.02.01.002	0022	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1988	-		2	1	50.000,00	
39	02.05.02.01.002	0023	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1989	-		1	1	50.000,00	
40	02.05.02.01.002	0001 s/d 0002	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1992	-		1	2	450.000,00	
41	02.05.02.01.002	0025	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1992	-		2	1	100.000,00	
42	02.05.02.01.002	0035	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1997	-		1	1	200.000,00	
43	02.05.02.01.002	0001 s/d 0006	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	2001	-		1	6	1.150.000,00	
44	02.05.02.01.002	0048	Meja Kerja Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	
45	02.05.02.01.003	0001	Kursi Besi/Metal	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	350.000,00	
46	02.05.02.01.004	0001 s/d 0004	Kursi Kayu	- / -	-	kayu rotan	Pembelian	1983	-		1	4	200.000,00	
47	02.05.02.01.004	0009	Kursi Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1983	-		1	1	50.000,00	
48	02.05.02.01.004	0022	Kursi Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1994	-		1	1	400.000,00	
49	02.05.02.01.004	0008	Kursi Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	1996	-		1	1	30.000,00	
50	02.05.02.01.004	0001 s/d 0003	Kursi Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	2001	-		1	3	300.000,00	
51	02.05.02.01.004	0027	Kursi Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	2001	-		2	1	200.000,00	
52	02.05.02.01.004	0054	Kursi Kayu	- / -	-	-	Pembelian	2001	-		1	1	100.000,00	
53	02.05.02.01.004	0011	Kursi Kayu	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	300.000,00	
54	02.05.02.01.005	0003	Sice	- / -	-	Kayu spon	Pembelian	1986	-		1	1	475.000,00	
55	02.05.02.01.005	0006	Sice	- / -	-	Kayu spon	Pembelian	1995	-		1	1	475.000,00	
56	02.05.02.01.005	0002	Sice	- / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	100.000,00	



BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

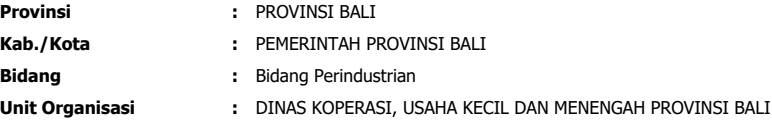
NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	02.05.02.01.005	0008	Sice	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	475.000,00	
58	02.05.02.01.012	0003	Meja Telepon	0 / kayu	-	-	Pembelian	2007	-		1	1	499.950,00	
59	02.05.02.01.024	0001	Meja 1/2 Biro	0 / -	-	Kayu	Pembelian	1982	-		2	1	145.000,00	
60	02.05.02.01.024	0001 s/d 0002	Meja 1/2 Biro	0 / -	-	Kayu	Pembelian	1983	-		2	2	378.000,00	
61	02.05.02.01.024	0005	Meja 1/2 Biro	0 / Meja belajar	-	Kayu	Pembelian	1993	-		1	1	450.000,00	
62	02.05.02.01.027	0001	Meja Makan Besi	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	150.000,00	
63	02.05.02.01.032	0002	Kursi Putar	0 / -	-	-	Pembelian	1991	-		1	1	350.000,00	
64	02.05.02.01.032	0003	Kursi Putar	0 / -	-	-	Pembelian	1994	-		1	1	350.000,00	
65	02.05.02.01.032	0001 s/d 0002	Kursi Putar	Ichiko / -	-	besi/spon	Pembelian	1996	-		1	2	700.000,00	
66	02.05.02.01.032	0006	Kursi Putar	0 / -	-	-	Pembelian	1998	-		1	1	350.000,00	
67	02.05.02.01.032	0001 s/d 0002	Kursi Putar	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	2	700.000,00	
68	02.05.02.01.032	0008	Kursi Putar	0 / besi	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	350.000,00	
69	02.05.02.01.036	0001 s/d 0004	Kursi Lipat	Elepan / -	-	-	Pembelian	1986	-		1	4	450.000,00	
70	02.05.02.01.036	0004	Kursi Lipat	Elepan / Kursi Besi	-	-	Pembelian	1986	-		1	1	150.000,00	
71	02.05.02.01.036	0006	Kursi Lipat	Elepan / -	-	-	Pembelian	1986	-		2	1	150.000,00	
72	02.05.02.01.036	0001 s/d 0024	Kursi Lipat	Chitos	-	Besi	Pembelian	2011	-		1	24	6.624.000,00	
73	02.05.02.01.050	0001 s/d 0003	Meubeleur lainnya	0 / 1 pintu	-	Kayu	Pembelian	1992	-		2	3	593.750,00	
74	02.05.02.01.050	0012	Meubeleur lainnya	0 / Gantungan handuk	-	-	Pembelian	1999	-		1	1	170.000,00	
75	02.05.02.01.050	0001	Meubeleur lainnya	0 / kain	-	Kain	Pembelian	2003	-		1	1	375.000,00	
76	02.05.02.01.050	0001 s/d 0002	Meubeleur lainnya	0 / Gantungan baju	-	-	Pembelian	2003	-		1	2	65.000,00	
77	02.05.02.01.050	0002	Meubeleur lainnya	0 / kain	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	375.000,00	
78	02.05.02.02.003	0001 s/d 0002	Jam Elektronik	Seiko / -	-	-	Pembelian	1998	-		1	2	50.000,00	
79	02.05.02.02.003	0003	Jam Elektronik	Sonata / -	-	-	Pembelian	2000	-		2	1	50.000,00	
80	02.05.02.02.003	0003	Jam Elektronik	0 / Jam dinding	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	
81	02.05.02.02.003	0005	Jam Elektronik	Casina / Jam dinding	-	Besi/Plastik	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	
82	02.05.02.02.003	0006	Jam Elektronik	Saeiko / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	
83	02.05.02.02.003	0007	Jam Elektronik	Korpri / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	



BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	02.05.02.02.003	0001 s/d 0010	Jam Elektronik	Saeiko	-	Besi/Plastik	Pembelian	2009			1	10	3.500.000,00	
85	02.05.02.02.003	0001 s/d 0005	Jam Elektronik	Seiko	-	Besi/Plastik	Pembelian	2012			1	5	1.875.000,00	
86	02.05.02.02.003	0013	Jam Elektronik	seiko	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013			1	1	425.000,00	
87	02.05.02.02.003	0001 s/d 0005	Jam Elektronik	Pagol / bulat	-	besi/plastik	Pembelian	2015			1	5	1.200.000,00	
88	02.05.02.04.006	0003	Kipas Angin	Maspion / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	61.000,00	
89	02.05.02.05.009	0001	Tabung Gas	Pertamina / -	-	-	Pembelian	1994	-		1	1	380.000,00	
90	02.05.02.06.007	0001	Loudspeaker	TOA / -	-	Besi	Pembelian	1994	-		1	1	253.400,00	
91	02.05.02.06.007	0001	Loudspeaker	Jokiwa / -	-	Besi	Pembelian	1995	-		1	1	400.000,00	
92	02.05.02.06.007	0014	Loudspeaker	Jokiwa / -	-	-	Pembelian	1998	-		1	1	400.000,00	
93	02.05.02.06.007	0015	Loudspeaker	Y2 200 / -	-	-	Pembelian	1999	-		1	1	400.000,00	
94	02.05.02.06.007	0016	Loudspeaker	Y 2 200 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	400.000,00	
95	02.05.02.06.008	0001	Sound System	Jokiwa / Speaker	-	-	Pembelian	1994	-		1	1	400.000,00	
96	02.05.02.06.014	0001	Microphone	Rider WM - 138 / -	-	Besi	Pembelian	2005	-		1	1	287.100,00	
97	02.05.02.06.016	0001	Microphone Table Stand	Maruni MB 209 B / -	-	Besi	Pembelian	2005	-		1	1	475.200,00	
98	02.05.02.06.028	0001	Lambang Garuda Pancasila	0 / -	-	-	Pembelian	1990	-		1	1	75.000,00	
99	02.05.02.06.028	0002	Lambang Garuda Pancasila	0 / -	-	-	Pembelian	1995	-		1	1	75.000,00	
100	02.05.02.06.028	0003	Lambang Garuda Pancasila	0 / -	-	-	Pembelian	2000	-		2	1	20.000,00	
101	02.05.02.06.037	0001 s/d 0002	Kaca Hias	0 / -	-	-	Pembelian	1995	-		1	2	100.000,00	
102	02.05.02.06.037	0003	Kaca Hias	0 / -	-	-	Pembelian	1998	-		1	1	50.000,00	
103	02.05.02.06.037	0004	Kaca Hias	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	50.000,00	
104	02.05.02.06.077	0004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0 / Patung Dewi Sri	-	-	Pembelian	1998	-		1	1	250.000,00	
105	02.05.02.06.077	0005	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0 / -	-	-	Pembelian	2003	-		1	1	400.000,00	
106	02.05.02.06.077	0001 s/d 0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Jemuran pakaian	-	-	Pembelian	2009			1	2	850.000,00	
107	02.05.02.06.077	0001 s/d 0010	Alat Rumah Tangga Lain-lain	- / -	-	kain	Pembelian	2015			1	10	1.950.000,00	
108	02.06.01.01.037	0001	Microphone/Boom Stand	Selaku VXM 286 TS / -	-	Besi	Pembelian	2005	-		1	1	143.550,00	
109	02.06.02.01.001	0001	Telephone (PABX)	0 / LG	-	-	Pembelian	1998	-		1	1	345.545,00	
110	02.06.02.01.003	0004	Pesawat Telephone	Inti / -	-	-	Pembelian	1980	-		1	1	345.545,00	



Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI BALI
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

 PEMERINTAH PROVINSI BALI		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		51.00/04.0/000051/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	
Nomor-SPM : 51.00/03.0/000056/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal : 04 Maret 2025		Tahun Anggaran : 2025	
SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Bank Pengirim: Bank BPD BALI			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0100100000001			
Uang sebesar Rp11.133.069,00 (terbilang: Sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah)			
Kepada : Fridolin Raja Samuel Manurung, A.MdAk. / Bendahara Pengeluaran			
NPWP : 001437292903000			
No. Rekening Bank : 0100100018843			
Nama di Rekening Bank : BEND PENG DINAS KOPERASI UKM PROV BALI			
Bank Penerima - Cabang : Bank BPD BALI - Renon			
Keperluan Untuk : Pembayaran Kewajiban BPJS 4% dari TPP Bulan Desember 2024 pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali			
Pagu Anggaran : Rp11.133.069,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2	2.17.01.1.02.0001	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	
3	5.1.01.01.00.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp11.133.069,00
			Rp11.133.069,00
Potongan-Potongan:			
NO	URAIAN	Jumlah (Rp)	ID Billing
1	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp11.133.069,00	702503042304827
		Rp11.133.069,00	
SP2D yang Dibayarkan:		Rp11.133.069,00	
Jumlah Potongan:		Rp11.133.069,00	
Jumlah Netto:		Rp0,00	
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp11.133.069,00	
Uang Sejumlah: Sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah			

07 MAR 2025



Denpasar, 06 Maret 2025



- Lambar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lambar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lambar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lambar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH PROVINSI BALI

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

51.00/04.0/000004/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025

nomor SPM : 51.00/03.0/000004/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025
tanggal : 09 Januari 2025
CPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2025

Bank Pengirim: Bank BPD BALI

Endekah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0100100000001

sebesar Rp397.412.771,00 (terbilang: Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)

Spada : Terlampir
NPWP : 0000000000000000
No. Rekening Bank : 0000000000
Nama di Rekening Bank : Terlampir
Bank Penerima - Cabang : Bank BPD BALI - Renon
Kepada : Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja PNS pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan UPTD. Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Bali untuk bulan Des. 2024
Tahun Anggaran : Rp397.412.771,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
3	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp396.298.217,00
4	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp41.671.715,00
5	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp395.442.839,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp32.968.077,00	040461741011905	
		Rp32.968.077,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp397.412.771,00
Jumlah Potongan:	Rp32.968.077,00
Jumlah Netto:	Rp364.444.694,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp397.412.771,00

Uang Sejumlah: Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah



13 JAN 2025



- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

Tahun Anggaran: 2026

Nomor SPM:

51.00/03.0/000009/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Nama Unit SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Nama : Fridolin Raja Samuel Manurung, A.Md.Ak. / Bendahara Pengeluaran
No. Rekening Bank : 0100100018843
Nama di Rekening Bank : BEND PENG DINAS KOPERASI UKM PROV BALI
Nama Bank - Cabang : Bank BPD BALI - Renon
NPWP : 001437292903000
Dasar Pembayaran : 51.00/01.0/000001/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026

Untuk Keperluan:

Tambahan Penghasilan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Iuran Jaminan Kesehatan 4% PPPK pada Dinas Koperasi, UPTD Diklat dan UPTD PLUT Koperasi UMKM Prov. Bali untuk bulan Desember 2025

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 51.00/01.0/000001/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026		
2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp693.083,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp12.166.364,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp5.160.703,00
Jumlah		Rp18.020.150,00

Jumlah SPP Diminta

Rp18.020.150,00

Nomor dan Tanggal SPP :

51.00/02.0/000008/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026, tanggal 12 Januari 2026

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21	041688536235321	Rp593.185,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	702601104247305	Rp693.083,00
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	702601104247302	Rp173.270,00
Jumlah			Rp1.459.538,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp18.020.150,00
Jumlah Potongan	Rp1.459.538,00
Jumlah Netto	Rp16.560.612,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp18.020.150,00

Uang Sejumlah: (Delapan belas juta dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah)

Denpasar, 12 Januari 2026
PENGGUNA ANGGARANTRIARYA DHYANA KUBONTUBUH, SE, M.Si.
196905101996031007

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2026

Nomor SPM: 51.00/03.0/000004/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
 Nama Unit SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
 Nama : Fridolin Raja Samuel Manurung, A.Md.Ak. / Bendahara Pengeluaran
 No. Rekening Bank : 0100100018843
 Nama di Rekening Bank : BEND PENG DINAS KOPERASI UKM PROV BALI
 Nama Bank - Cabang : Bank BPD BALI - Renon
 NPWP : 001437292903000
 Dasar Pembayaran : 51.00/01.0/000001/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026

Untuk Keperluan:

Tambahan Penghasilan Beban Kerja, Kondisi Kerja Prestasi Kerja dan Iuran Jaminan Kesehatan 4% PNS pada Dinas Koperasi, UPTD Diklat dan UPTD PLUT Koperasi UMKM Prov. Bali untuk bulan Desember 2025

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 51.00/01.0/000001/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026		
2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp40.030.146,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp11.343.213,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp254.463.749,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp54.112.120,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp121.585.308,00
Jumlah		Rp481.534.536,00

Jumlah SPP Diminta

Rp481.534.536,00

Nomor dan Tanggal SPP:

51.00/02.0/000004/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/M/1/2026, tanggal 12 Januari 2026

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	PPH 21	041652407918910	Rp40.030.146,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	702601104247203	Rp11.343.213,00
3	Iuran Wajib Pegawai 1%	702601104247206	Rp2.835.808,00
Jumlah			Rp54.209.167,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp481.534.536,00
Jumlah Potongan	Rp54.209.167,00
Jumlah Netto	Rp427.325.369,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp481.534.536,00

Uang Sejumlah: (Empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Denpasar, 12 Januari 2026
 PENGGUNA ANGGARAN


TRI ARYA DHYANA KUBONTUBUH, SE. M.Si.
 196905101996031007

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran